

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU (PWT) KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Tahun Anggaran 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

KATA PENGANTAR

LAPORAN AKHIR

**Dokumen Penyusunan
Rencana Pembangunan
Wilayah Terpadu (PWT)
Kabupaten Kepulauan Yapen**

Tahun 2015

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2015.

Laporan Akhir ini berisi gambaran mengenai Latar Belakang, Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Pendekatan dan Metodologi Analisis PWT, Analisis Pembangunan Wawasan Terpadu, Konsep dan Strategi, serta Matrik Program Prioritas Pembangunan Kawasan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Harapan kami nantinya dokumen ini dapat di jadikan acuan ataupun petunjuk dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan dan pembangunan wilayah secara terpadu.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak – pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan dokumen ini. Penyusun mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan dokumen ini jauh dari sempurna. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dalam mengupayakan hasil kerja yang lebih baik.

Yapen, November 2015

Tim Penyusun

Agus Tri Basuki, SE., M.Si

Henry Krismawan, SE., M.Si.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Pustaka	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Landasan Hukum	1-5
1.3. Tujuan	1-7
1.4. Indikator Keluaran.....	1-7
1.5. Sistematis Pelaksanaan Kegiatan.....	1-8
BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH	
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	2-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial	2-16
2.3. Aspek Pelayanan Umum	2-24
2.4. Aspek Perekonomian	2-42
BAB III. PENDEKATAN DAN TAHAPAN PENYUSUNAN PWT	
3.1. Pendekatan Perencanaan Wilayah.....	3-1
3.2. Teori Perencanaan dan Perkembangannya	3-14
3.3. Prosedur dan Sistem Perencanaan Wilayah.....	3-22
3.4. Proses Perencanaan Wilayah.....	3-27
3.5. Tahapan Penyusunan PWT	3-32
BAB IV. ANALISIS PEMBANGUNAN KAWASAN TERPADU	
4.1. Identifikasi Kawasan PWT	4-1
4.2. Analisis Kawasan PWT	4-21
4.3. Pembobotan	4-58
4.4. Penentuan Prioritas Kawasan PWT.....	4-62
4.5. Penetapan Program Kewilayahan	4-66
BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
5.1. Arah Pembangunan	5-1
5.2. Sasaran Pembangunan Lima Tahun.....	5-15

BAB VI. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN

6.1. Matrik Program Pembangunan Kawasan Terpadu
Kabupaten Kepulauan Yapen..... 6-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Penggunaan lahan di Kabupaten Kepulauan Yapen, Tahun 2008	2-6
Tabel 2.2.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011-2031.....	2-9
Tabel 2.3.	Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2012.....	2-13
Tabel 2.4.	Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen Senurut Struktur Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2011-2012.....	2-14
Tabel 2.5.	Sebaran Penduduk dan Luas Wilayah Menurut Distrik Tahun 2008-2012	2-15
Tabel 2.6.	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan (APT)Tahun 2008-2012 Kabupaten Kepulauan Yapen	2-17
Tabel 2.7.	Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB), Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian BalitaTahun 2009-2013.....	2-18
Tabel 2.8.	Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan KerjaTahun 2008-2012 Kabupaten Kepulauan Yapen	2-19
Tabel 2.9.	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas menurut Lapangan UsahaTahun 2011-2012 Kabupaten Kepulauan Yapen	2-21
Tabel 2.10.	Perkembangan Seni, Budaya dan Olah raga Tahun 2008-2012 Kabupaten Kepulauan Yapen..	2-23
Tabel 2.11.	Kondisi Fisik Bangunan Sekolah Tahun 2009-2013 Kabupaten Kepulauan Yapen	2-25
Tabel 2.12.	Kualifikasi Ijazah S1-DIV dan SertifikasiTahun 2011-2013 Kabupaten Kepulauan Yapen.....	2-26
Tabel 2.13.	Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2009-2013 Kabupaten Kepulauan Yapen.....	2-28
Tabel 2.14.	Jumlah Puskesmas, Pustu Tahun 2009 – 2013 Kabupaten Kepulauan Yapen.....	2-29
Tabel 2.15.	Rumah Sakit, Dokter dan Tenaga Medis Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Kepulauan Yapen.....	2-30

Tabel 2.16.	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2009 – 2013 Kabupaten Kepulauan Yapen	2-33
Tabel 2.17.	Persentase Luas Permukiman yang Tertata Tahun 2008 -2012 Kabupaten Kepulauan Yapen	2-34
Tabel 2.18.	Jumlah Arus Penumpang Umum Tahun 2009-2013 Kabupaten Kepulauan Yapen	2-36
Tabel 2.19.	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Menurut Distrik Tahun 2013 Kabupaten Kepulauan Yapen	2-36
Tabel 2.20.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus Tahun 2009 s/d 2013 Kabupaten Kepulauan Yapen	2-39
Tabel 2.21.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus Tahun 2008 s/d 2012 Kabupaten Kepulauan Yapen	2-39
Tabel 2.22.	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2009 -2013 Kabupaten Kepulauan Yapen	2-40
Tabel 2.23.	Estimasi Potensi SD Ikan di Perairan Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Pendekatan Rasio Luas Perairan Kabupaten Yapen dibanding Luas Perairan WPP 7	2-44
Tabel 2.24.	Lokasi dan Luas Perairan Laut di Kabupaten Kepulauan Yapen yang Diperkirakan Memiliki Potensi untuk Pengembangan Budidaya Laut	2-49
Tabel 2.25.	Luas Areal Perairan Laut yang Direkomendasikan dan Luas Efektif bagi Pengembangan Budidaya Laut di Kabupaten Kepulauan Yapen	2-54
Tabel 4.1.	Nama, Fungsi, dan Sektor Unggulan Kawasan	4-13
Tabel 4.2.	Uraian Visi, Misi, dan Program Bupati Kepulauan Yapen	4-15
Tabel 4.3.	Hasil Rumusan dan Kesepakatan Kawasan	4-17
Tabel 4.4.	Hasil Persetujuan Kawasan yang akan Dianalisis	4-20
Tabel 4.5.	Gambaran Umum Kawasan PWT	4-22
Tabel 4.6.	Hasil Analisis Gambaran Umum Kawasan	

	Strategis Agropolitandan Minapolitan Kepulauan Yapen	4-24
Tabel 4.7.	Hasil Analisis Gambaran Umum Kawasan Strategis Perkampungan Nelayan Tradisional	4-27
Tabel 4.8.	Hasil Analisis Gambaran Umum Kawasan Pendukung Waterfront Kampung Ansus Kepulauan Yapen	4-30
Tabel 4.9.	Analisis Rumusan Permasalahan Pembangunan Kawasan Strategis Agropolitandan Minapolitan Kepulauan Yapen	4-35
Tabel 4.10.	Analisis Rumusan Permasalahan Pembangunan Kawasan Strategis Perkampungan Nelayan Tradisional	4-36
Tabel 4.11.	Analisis Rumusan Permasalahan Pembangunan Kawasan Pendukung Waterfront Kampung Ansus Kepulauan Yapen.....	4-37
Tabel 4.12.	Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis Pengembangan Kawasan Kawasan Strategis Agropolitan dan Minapolitan Kepulauan Yapen....	4-39
Tabel 4.13.	Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis Pengembangan Kawasan Kawasan Strategis Perkampungan Nelayan Tradisional Kepulauan Yapen	4-40
Tabel 4.14.	Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis Pengembangan Kawasan Kawasan Strategis Perkampungan Nelayan Tradisional Kepulauan Yapen	4-41
Tabel 4.15.	Perumusan Isu-Isu Strategis Pembangunan Kawasan Kabupaten Kepulauan Yapen.....	4-42
Tabel 4.16.	Indikasi Program Kewilayahan Kabupaten Kepulauan Yapen	4-45
Tabel 4.17.	Indikasi Program Kewilayahan Kabupaten Kepulauan Yapen	4-53
Tabel 4.18.	Kawasan PWT Terpilih Kabupaten Kepulauan Yepen	4-56
Tabel 4.19.	Hasil Bobot Kepentingan Variabel terhadap PWT Kawasan Strategis Agropolitan dan Minapolitan ..	4-59
Tabel 4.20.	Hasil Bobot Kepentingan Variabel terhadap PWT Kawasan Strategis Perkampungan Nelayan	

	Tradisional	4-60
Tabel 4.21.	Hasil Bobot Kepentingan Variabel terhadap PWT Kawasan Pendukung Waterfront Kampung Ansus	4-61
Tabel 4.22.	Kesepakatan Hasil Bobot Kawasan Strategis Agropolitan dan Minapolitan.....	4-62
Tabel 4.23.	Kesepakatan Hasil Bobot Kawasan Strategis Perkampungan Nelayan Tradisional.....	4-63
Tabel 4.24.	Kesepakatan Hasil Bobot Kawasan Pendukung Waterfront Kampung Ansus.....	4-63
Tabel 4.25.	Hasil Nilai Kawasan terhadap Prioritas PWT	4-64
Tabel 4.26.	Penilaian/Skoring Kawasan Strategis Agropolitan dan Minapolitan.....	4-64
Tabel 4.27.	Penilaian/Skoring Kawasan Strategis Perkampungan Nelayan Tradisional.....	4-65
Tabel 4.28.	Penilaian/Skoring Kawasan Pendukung Waterfront Kampung Ansus.....	4-65
Tabel 4.29.	Ranking Prioritas Pengembangan Kawasan.....	4-66
Tabel 6.1.	Rencana Program Kewilayahan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan PWT Kawasan Waterfront Kampung Ansus.....	6-1
Tabel 6.2.	Rencana Program Kewilayahan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan PWT Kawasan Perkampungan Nelayan Tradisional.....	6-5
Tabel 6.3.	Rencana Program Kewilayahan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan PWT Kawasan Agropolitan dan Monapolitan.....	6-8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya	2-7
Gambar 3.1.	Beberapa Rencana Wilayah berdasar Perbedaan Pendekatan	3-14
Gambar 3.2.	Perkembangan Teori Perencanaan Wilayah.....	3-17
Gambar 3.3.	Perkembangan Teori Perencanaan Wilayah.....	3-21
Gambar 3.4.	Kedudukan Pembangunan Wilayah Terpadu dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.....	3-35
Gambar 3.5.	Tahapan dan Tata Cara Penyusunan PWTJP	3-37
Gambar 3.6.	Tahapan dan Tata Cara Penyusunan PWTJM ...	3-38



PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Istilah pembangunan menurut Todaro (1998), pada hakikatnya merupakan cerminan proses terjadinya perubahan sosial suatu masyarakat, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok sosial atau institusi yang ada di dalamnya untuk mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik. Sedangkan istilah pembangunan berkelanjutan (sustainable development) (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987) adalah proses pembangunan yang mencakup tidak hanya wilayah (lahan, kota) tetapi juga semua unsur, bisnis, masyarakat, dan sebagainya) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan".

Sementara itu pengertian dan penerapan pembangunan wilayah pada umumnya dikaitkan dengan kebijakan ekonomi atau keputusan politik yang berhubungan dengan alokasi secara

spasial dari kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan. Menurut Cullis dan Jones (Nugroho dan Dahuri, 2004; Sugiharto, 2006). Pembangunan wilayah sangat tepat diimplementasikan dalam perekonomian yang tumbuh dengan mengandalkan pengelolaan sumberdaya publik (common and public resources), antara lain sektor kehutanan, perikanan, atau pengelolaan wilayah.

Dengan demikian pembangunan wilayah tentu saja memiliki kompleksitas permasalahan terkait dengan pengelolaan sumberdaya-sumberdaya tersebut, mengintensifkan pembinaan lingkungannya ataupun yang terkait dengan masalah moral pelaksanaannya. Namun untuk sebagian orang lain, konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan wilayah yang berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial di wilayah tersebut.

Mengingat pembangunan wilayah yang berkelanjutan memiliki makna yang multidimensional, maka diperlukan mekanisme pengambilan keputusan yang tepat melalui analisis kebijakan pembangunan wilayah yang mampu mengkombinasikan dan mentransformasikan substansi dan metode beberapa disiplin ilmu. Lebih jauh lagi analisis tersebut harus menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah publik tersebut.

Pembangunan wilayah terpadu merupakan kebijakan untuk mendorong pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan kewilayahan. Kebijakan ini

LAPORAN AKHIR

dibutuhkan agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam pemanfaatan sumber daya dan sumber dana pembangunan di daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Wilayah Terpadu adalah sebuah metode inovatif untuk mengidentifikasi kebutuhan program kewilayahan yang layak dan mendesak untuk dilakukan dalam konteks PWT. Sekaligus memberikan gambaran tentang visi bersama yang dilakukan melalui proses partisipatif yang sistematis diantara sektor terkait. Gambaran visi bersama ini disertai dengan aspek penting lainnya seperti program kewilayahan, tolok ukur, aktor, kebijakan, strategi dan berbagai informasi lain sesuai kebutuhan pelaksanaan PWT.

Melalui pemanfaatan PWT, maka penentuan program kewilayahan akan lebih fokus dan memperjelas maksud, tujuan, peran dan fungsi masing-masing aktor (khususnya SKPD) yang terlibat dalam PWT.

Selain itu PWT dirancang sesuai dengan prinsip dasar dan kebutuhan dinamika perencanaan pembangunan kontemporer yang kental dengan aspek efisiensi, peningkatan transparansi, partisipatif, komunikatif dan pencapaian yang efektif. Metode ini juga sesuai dengan pemanfaatan pola strategic planning, perencanaan kolektif, aktivasi kesadaran bersama (*awareness*) dan penguatan jejaring (*networking*) yang melekat pada pendekatan Regional Management. Oleh karena itu PWT merupakan salah satu instrumen penting dan perlu digunakan dalam aplikasi konsep PWT.

PWT sangat bermanfaat untuk hasil yang tajam dalam penyusunan dokumen PWT, yaitu yang tertuang dalam PWTJP, PWTJM dan PWT Tahunan. Dalam Pedoman PWT sesuai arahan

Permendagri No. 72 Tahun 2014 telah disampaikan petunjuk teknis secara formal. S-PWT menajamkan dan memberi bobot perencanaan berupa validasi dari para pelaku yang langsung terlibat dalam PWT di Daerah. Pelaksanaan yang mudah, praktis dan singkat sehingga meringankan Daerah dalam penyusunan PWTJP, PWTJM dan PWT Tahunan.

PWT biasa dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi, workshop, musrenbang, FGD dan lain sebagainya. Metode ini mengedepankan aspek partisipatif aktif dari para peserta yang kompeten.

Penyusunan PWTJP daerah merupakan bagian dari arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu pada RPJPN memperhatikan RPJP Provinsi dan berpedoman pada RTRW daerah. Arah kebijakan dalam pembangunan wilayah terpadu jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok PWTJP secara bertahap yang tertuang dalam RPJPD. Sedangkan Penyusunan PWTJM daerah merupakan penjabaran arah kebijakan dan sasaran pokok PWTJP selama 5 (lima) tahun dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). PWTJM diprioritaskan pada program-program pembangunan di kawasan strategis daerah dan atau kawasan yang mendukung kawasan strategis nasional/provinsi ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya serta daya dukung lingkungan hidup.

Dengan demikian kebijakan PWT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJP dan RPJMD. Kebijakan PWT ini diharapkan

dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menterjemahkan, mengisi dan mengaplikasikan prinsip-prinsip pemanfaatan ruang secara langsung, nyata dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan dampak positif yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat secara luas, melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah terpadu.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tentang menyusun RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013-2017.

1.3. TUJUAN

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Memperoleh analisa sekaligus penyusunan program kewilayah jangka panjang dan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Yapen.
2. Memperoleh skenario kewilayah berdasarkan analisis rumusan masalah pembangunan, analisis isu strategis dan kebijakan untuk dituangkan PWTJP dan PWTJM Daerah.
3. Memperoleh acuan untuk membangun dan mengembangkan kapasitas terkait PWT secara partisipatif diantara stakeholder.
4. Membangun komitmen kolaboratif lintas sektor dan pelaku dalam konteks PWT.

1.4. INDIKATOR KELUARAN

1.4.1. Kualitatif

Terciptanya keterpaduan, keserasian dan koordinasi dari berbagai input pembangunan baik berupa program sektoral, program pembangunan daerah maupun program-program khusus dengan upaya dan kebijakan pembangunan yang telah disusun pemerintah daerah berdasarkan potensi dan kebutuhan nyata di daerah.

1.4.2. Kuantitatif

Tersusunnya 1 Dokumen Rancangan Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah Daerah

1.5. SISTEMATIKA PELAKSANAAN KEGIATAN

1.5.1. Metode Pelaksanaan

Kerjasama dengan pihak ketiga serta koordinasi dan pembahasan/diskusi tim, khususnya menggunakan pendekatan Skenario PWT sebagai instrumen perencanaan penyusunan PWT.

1.5.2. Tahapan Kegiatan

1. Tahapan Kegiatan Penyusunan PWTJP :
 - a. Identifikasi permasalahan dan gambaran umum kawasan, dilakukan melalui pengolahan data dan informasi kawasan serta penelaahan RTRW.
 - b. Perumusan isu strategis kawasan, dilakukan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan kawasan dan penelaahan arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPN/RPJP Provinsi.
 - c. Perumusan arah kebijakan dan sasaran PWTJP, dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pembangunan wilayah/kawasan dalam RPJP Provinsi serta mempedomani tujuan, kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang dalam RTRW.
2. Tahapan Kegiatan Penyusunan PWTJM :
 - a. **Identifikasi kawasan PWT**, dilakukan untuk memperoleh keterkaitan kawasan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, serta selaras

dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Langkah-langkah dalam identifikasi kawasan PWT adalah :

- Melakukan penelaahan terhadap struktur dan pola ruang pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Daerah.
 - Menguraikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih untuk memperoleh gambaran secara umum dari misi dan program kepala daerah terpilih yang terkait dengan pembangunan kewilayahan/kawasan.
 - Menghitung besarnya keterkaitan masing-masing kawasan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih untuk melihat besarnya keterkaitan masing-masing kawasan dengan misi dan program kepala daerah terpilih.
 - Melakukan pembahasan hasil kesepakatan dengan kepala daerah untuk menyetujui kawasan-kawasan yang akan dianalisis lebih lanjut.
- b. Analisis kawasan PWT**, dilakukan untuk mengetahui kondisi kawasan secara umum yang antara lain mencakup potensi dan permasalahan pada masing-masing kawasan yang akan disetujui oleh kepala daerah. Hasil analisis ini akan digunakan untuk merumuskan strategi dan kebijakan serta program indikatif PWT pada kawasan. Analisis pada masing-masing kawasan dilakukan melalui tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut :
- Analisis gambaran umum, memberikan pemahaman awal bagi tim tentang apa,

bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan kawasan yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi factor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan kawasan dengan pencapaian target sesuai program kepala daerah.

- Analisis rumusan masalah, menguraikan tentang berbagai faktor kendala dalam pembangunan kawasan.
- Analisis isu-isu strategis, merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan kawasan sebagai kelanjutan dari analisis-analisis yang telah dilakukan sebelumnya.
- Analisis strategis dan kebijakan, merupakan pedoman dalam merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan kawasan terpadu dan sesuai dengan visi, misi, program dan target capaian kepala daerah.
- Penyusunan indikasi program kewilayah dan kebutuhan pendanaan, penyusunan indikasi program kewilayahan beserta kebutuhan pendanaannya di setiap kawasan PWT disusun berdasarkan hasil analisis sektor unggulan/aspek prioritas dari masing-masing kawasan strategis daerah, dan kawasan yang mendukung pengembangan kawasan strategis nasional/provinsi.

- c. Pembobotan,** dilakukan atas kawasan yang mendukung kawasan strategis nasional/provinsi yang terpilih. Pembobotan ini ditujukan untuk menemukan tingkat kepentingan aspek ekonomi, social budaya, dan lingkungan terhadap peran kawasan terpilih melalui penghitungan bobot factor-faktor yang terdapat pada masing-masing aspek.
- d. Penentuan prioritas kawasan PWT,** dilakukan penghitungan dan penentuan besarnya bobot kawasan, selanjutnya masing-masing anggota tim penyusun dan atau secara partisipatif melakukan penilaian terhadap masing-masing kawasan.
- e. Penetapan program kewilayahan,** tahapan prioritas kegiatan ditentukan melalui aspek-aspek pembangunan yang merupakan variable dalam tipologi kawasan. Aspek pembangunan yang mempunyai nilai bobot tertinggi dijadikan prioritas pertama pada pembangunan PWT, kemudian disusul dengan aspek pembangunan prioritas kedua, ketiga dan seterusnya. Tahapan prioritas kegiatan PWT tidak menggambarkan tahun pelaksanaan kegiatan, karena kegiatan dapat dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran.



GAMBARAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Analisis pada aspek geografi Kabupaten Kepulauan Yapen dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Gambaran kondisi demografi Kabupaten Kepulauan Yapen antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

2.1.1. Aspek Geografi

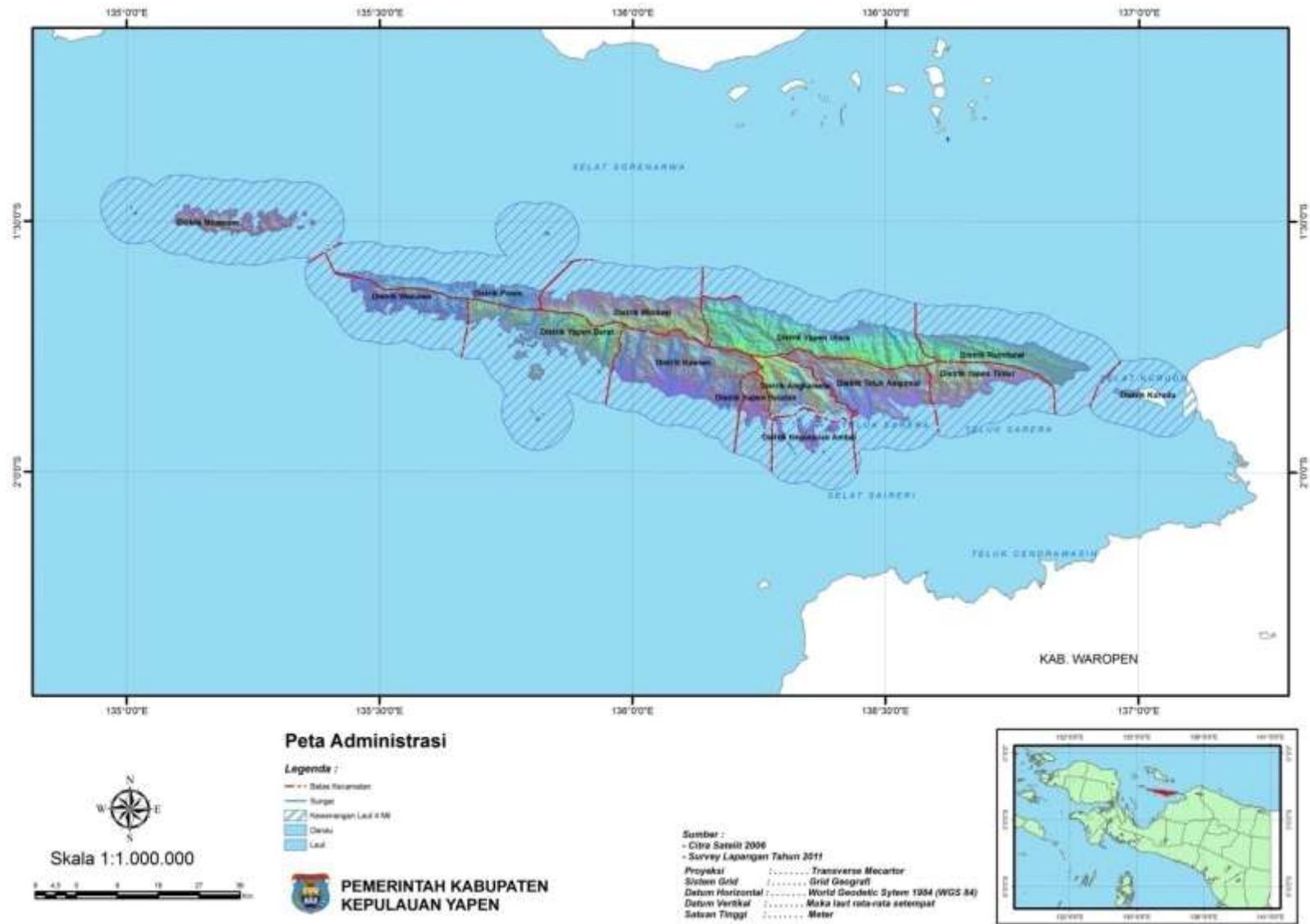
Kabupaten Kepulauan Yapen berada di Teluk Cendrawasih pada posisi 134°46"-137°21,964" Bujur Timur dan 1°27'47,714"-1°58'36,376" Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Biak Numfor di Selat Sorenawai;

LAPORAN AKHIR

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Waropen di Selat Saireri;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat di Selat Gelvink Bay;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sarmi dan Jayapura di Sungai Mamberamo.

LAPORAN AKHIR



LAPORAN AKHIR

Kabupaten Kepulauan Yapen secara administrasi pada tahun 2010 terdiri dari 14 distrik, 5 kelurahan, dan 106 kampung yang rinciannya disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Banyaknya Kelurahan dan Desa serta Luas Distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012

No.	Distrik	Desa	Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase
1	Angkaisera	14	0	177,39	2,48
2	Kepulauan Ambai	10	0	301,37	4,22
3	Kosiwo	10	0	606,66	8,49
4	Poom	6	0	730,39	10,22
5	Pulau Miobo	5	0	134,00	7,11
6	Pulau Yerui	1	0	574,03	10,21
7	Raimbawi	6	0	779,49	5,28
8	Teluk Ampimoi	9	0	451,63	6,32
9	Windesi	8	0	479,69	6,71
10	Wonawa	5	0	960,68	9,53
11	Yapen Barat	7	1	793,36	11,10
12	Yapen Selatan	10	4	140,42	1,96
13	Yapen Timur	9	0	393,17	5,50
14	Yapen Utara	6	0	775,58	10,85
Kepulauan Yapen		106	5	7.146,97	100,00
	Hutan Negara			785,26	25,08
	Daratan			2.432,49	64,61
	Lautan			4.714,48	35,39

Sumber : Kepulauan Yapen Dalam Angka 2013

Catatan: Hasil Kajian Luas Wilayah Daerah Tahun 2008 (luas wilayah darat 2.432,49 km² dan luas wilayah perairan 4.713,67 km²)

Berdasarkan Tabel 2.1. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki 14 distrik dengan luas wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen seluas 7.146,97 km² dimana luas daratan adalah 2.432,49 km² (34,04%) sementara lautan seluas 4.714,48 km² (65,96%).

Secara topografi, sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen berbukit dan bergunung-gunung dan sebagian kecil wilayah dengan kondisi datar dan landai terutama pada bagian timur dan bagian Barat Pulau Yapen. Tingkat kemiringan lahan sangat bervariasi mulai dari yang datar, bergelombang hingga pada berbukit. Tingkat kemiringan lahan antara 0-4% yang disebut sebagai daerah pantai, sedangkan kemiringan lahan antara 40-60% adalah kemiringan lahan yang disebut sebagai

daerah bergelombang hingga berbukit, lahan ini lebih dominan sekitar pulau Yapen. Ketinggian wilayah pantai berada pada kisaran 0-10 m di atas permukaan laut, sedangkan bagian tengah berada pada ketinggian 200-1.500 m di atas permukaan laut.

Kondisi iklim baik makro maupun mikro di Kabupaten Kepulauan Yapen dipengaruhi oleh faktor-faktor alam yang turut memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim. Faktor-faktor tersebut meliputi ketinggian dari permukaan laut mendominasi di atas 100 m, variasi topografi yang beragam dan didominasi lereng di atas 30%. Kondisi hutan baik dengan penutupan lahan (land cover) di atas 71,4%, menyebabkan antar distrik/kampung memiliki variasi iklim yang berbeda setiap tahunnya.

Secara umum formasi geologi di Pulau Yapen didominasi oleh formasi konglomerat anis yang memiliki luas 693,26 km² (28,50%) yang umur geologinya merupakan batuan sedimen tersier (tertiary). Karena adanya perbedaan iklim, bahan organik, bahan induk, topografi dan waktu maka proses pembentukan tanah dan kesuburannya berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki variasi jenis tanah pada tingkat ordo, secara umum terdiri dari entisol, inceptisol, alfisol ultisol dan oxisol yang menyebar pada seluruh daerah Pulau Yapen.

Kondisi hidrologi di Kabupaten Kepulauan Yapen sangat dipengaruhi oleh curah hujan dan keberadaan beberapa sungai yang relatif besar. Tingkat curah hujan pada wilayah ini termasuk dalam kategori cukup tinggi, sehingga mengakibatkan sering timbulnya luapan/limpasan air pada beberapa tubuh sungai pada akhirnya menimbulkan genangan-genangan air di beberapa tempat. Umumnya sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Yapen digunakan oleh masyarakat setempat sebagai

LAPORAN AKHIR

sumber mata air untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, sumber mata pencaharian penduduk, kegiatan pertanian dan juga dimanfaatkan sebagai sarana perhubungan transportasi. Selain sungai-sungai kecil yang tersebar pada hamper seluruh wilayah kampung juga terdapat beberapa sungai besar, salah satu diantaranya adalah Sungai Mantembu. Sungai ini termasuk dalam Sub DAS Marau, Sub-sub DAS Mariadei. Sungai ini berkontribusi terhadap bencana banjir yang sering terjadi di Ibukota Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu Kota Serui.

Tabel 2.2. Penggunaan lahan di Kabupaten Kepulauan Yapen, Tahun 2008

No.	Penggunaan Lahan	Luas	
		Hektar	Persentase
1	Fasilitas	294,885	0,121
2	Hutan	222.192,477	91,157
3	Hutan Mangrove Sekunder	1.829,305	0,705
4	Hutan rawa Sekunder	649,666	0,267
5	Jalan	199,096	0,082
6	Jembatan	0,030	0,00001
7	Kawasan Industri	88,389	0,036
8	Kebun Campuran	10.816,513	4,438
9	Kebun Sejenis	465,533	0,191
10	Kuburan	40,138	0,016
11	Pantai	46,174	0,019
12	Pemukiman	1.376,316	0,565
13	Penggunaan Lainnya	0,013	0,000
14	Pertambangan Batu	6,721	0,003
15	Sawah	7,732	0,003
16	Semak Belukar	4.669,341	1,916
17	Tanah Terbuka	6,415	0,003
18	Tegalan	136,311	0,056
19	Tubuh Air	923,155	0,379
Jumlah		243.748,210	100

Sumber : Laporan Akhir Profil Daerah Rawan Bencana, Kabupaten Kepulauan Yapen, 2009

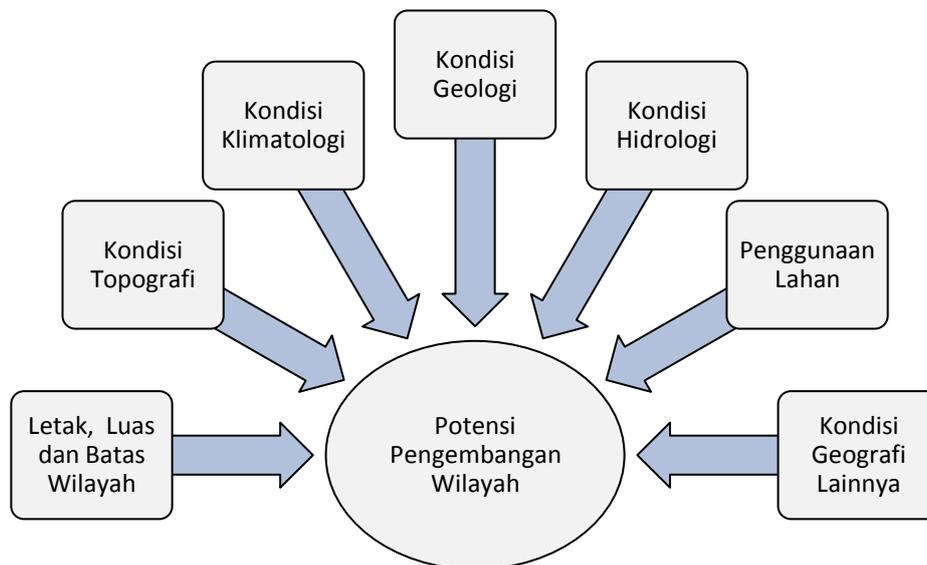
Penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah berupa kelompok hutan mencapai 222.192,477 Ha atau 91,157% dari total penggunaan lahan di kabupaten, menyusul kelompok lahan untuk tanaman pertanian yaitu kebun campuran seluas 10.816,513 Ha atau 4,438%, permukiman seluas

LAPORAN AKHIR

1.376,316 Ha atau 0,565%, semak belukar seluas 4.669,341 Ha atau 1,916%, tanah terbuka seluas 6,415 Ha atau 0,003% dan tubuh air seluas 923,155 Ha atau 0,379%. Kondisi penggunaan lahan secara rinci untuk masing-masing peruntukan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah di atas dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya disajikan pada diagram sebagai berikut.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Kepulauan Yapen 2011-2031 yang disebutkan beberapa kawasan khusus yang diprioritaskan untuk dikembangkan, yaitu :

LAPORAN AKHIR

1. Kawasan tertinggal, yaitu kawasan yang memiliki keterbatasan sumberdaya dan atau aksesibilitas sehingga tidak dapat memanfaatkan ataupun menangkap peluang ekonomi yang ada. Daerah tersebut berada di semua Distrik
2. Kawasan kritis, yaitu kawasan yang rawan terjadinya bencana alam dan pada umumnya mempunyai kemiringan lahan yang curam serta daya dukung lahan yang labil. Daerah tersebut antara lain: Kelurahan Tarau di Distrik Yapen Selatan, Kelurahan Serui Jaya di Distrik Yapen Selatan, Kelurahan Serui Kota di Distrik Yapen Selatan, Kelurahan Anotaurei di Distrik Yapen Selatan, Kelurahan Ansus di Distrik Yapen Barat, Kampung Miosnom di Distrik Pulau Yerui, dan Kampung Kurudu di Distrik Pulau Kurudu.
3. Kawasan Andalan, yaitu kawasan yang secara ekonomi berpotensi untuk mendorong pertumbuhan wilayah. Kawasan tersebut adalah Yapen Selatan terdiri dari Distrik Yapen Selatan, Kosiwo, dan Angkaisera dengan pusat pengembangan di Serui. Yapen Timur terdiri dari Yapen Timur, Teluk Ampimoi, dan Raimbawi dengan pusat pengembangan di Dawai. Kepulauan Ambai terdiri dari Distrik Kepulauan Ambai dengan pusat pengembangan di Ambai I. Yapen Barat terdiri dari Distrik Wonawa, Poom, dan Yapen Barat dengan pusat pengembangan di Ansus (Yapen Barat). Yapen Utara terdiri dari Distrik Yapen Utara dan Windesi dengan pusat pengembangan di Yobi.
4. Kawasan Perkotaan, yaitu kawasan terpadu yang dikaitkan dengan fungsi sebagai ibukota yang mempunyai daya tarik bagi penanam modal. Kawasan tersebut adalah Kota Serui Distrik Yapen Selatan, Angkaisera Distrik Angkaisera,

LAPORAN AKHIR

Kepulauan Ampimoi, Wonawa Distrik Wonawa dan Yobi Distrik Yapen Utara,

5. Kawasan Perdesaan, yaitu kawasan yang diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan Kabupaten Kepulauan Yapen Kawasan tersebut adalah Ansus Distrik Yapen Barat, Kosiwo Distrik Kosiwo, Poom Distrik Poom, Raimbawi Distrik Raiibawi, Telik Ampimoi Distrik Teluk Ampimoi, Windesi Distrik Windesi, dan Dawai Distrik Yapen Timur.

Tabel 2.3. memperlihatkan rencana ruang dan lokasi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011-2031 yang menjadi acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang pembangunan untuk 20 tahun ke depan.

Tabel 2.3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011-2031

No	Nama Rencana Ruang	Lokasi
1.	Struktur Ruang	
	1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kota Serui
	2) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	Perkotaan Angkaisera, Kepulauan Ambai, Wonawa, dan Yapen Utara
	3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Perkotaan Yapen Barat, Kosiwo, Poom, Raimbawi, Teluk Ampimoi, Windesi, dan Yapen Timur
4) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Kelurahan Tarau, Kelurahan Serui Jaya, Kelurahan Serui Kota, Kelurahan Anotaurei, Kelurahan Ansus, Miosnom, dan Kurudu	
2.	Wilayah Pengembangan	
	1) WP Yapen Selatan	Kota Serui, Distrik Kosiwo, dan Angkaisera
	2) WP Yapen Timur	Distrik Yapen Timur, Distrik Teluk Ampimoi dan Raimbawi
	3) WP Kepulauan Ambai	Distrik Kepulauan Ambai
	4) WP Yapen Barat	Distrik Yapen Barat, Distrik Poom dan Wonawa
5) WP Yapen Utara	Distrik Yapen Utara, Distrik Windesi	
3.	Pola Ruang	
	1) Kawasan Lindung (1) Kawasan Hutan Lindung	Distrik Angkaisera, Kepulauan Ambai, Distrik Yapen Barat, Kosiwo, Poom, Rainbawi, Teluk

LAPORAN AKHIR

No	Nama Rencana Ruang	Lokasi
		Ampimoi, Windesi, Wonawa, Yapen Selatan,
		Yapen Timur, dan Distrik Yapen Utara
	(2) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	Tersebar di seluruh Distrik
	(3) Kawasan Perlindungan Setempat	
	a. Sempadan Pantai	Seluruh Distrik
	b. Sempadan Sungai	Tersebar di seluruh distrik
	c. Kawasan Sekitar Mata Air	Semua distrik
	d. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	Tersebar di seluruh distrik
	(4) Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Cagar Budaya	
	a. Cagar Alam	Distrik Winbesi, Distrik Kosiwo, Distrik Yapen Selatan, Distrik Yapen Utara, Distrik Angkaisera, Distrik Teluk Ampimoi, Distrik Rainbawi dan Distrik Yapen Timur
	b. Cagar Budaya Tradisional	Kampung Serui Laut, Ambai, Ansus Distrik Yapen Selatan dan Distrik Kepulauan Ambai
	(5) Kawasan Rawan Bencana :	
	a. Rawan Tanah Longsor	Distrik Kosiwo, Angkaisera, Yapen Utara, Teluk Ampimoi
	b. Rawan Gelombang Pasang	Distrik Poom, Raimbawi, Yapen Selatan, Kosiwo, Windesi, Teluk Ampimoi
	c. Rawan Banjir	Pesisir Distrik Yapen Selatan, Teluk Ampimoi, Windesi, Kosiwo, Distrik Yapen Utara
	d. Rawan Bencana Angin Ribut	Semua distrik terutama di Distrik Teluk Ampimoi, Distrik Yapen Barat, distrik Yapen selatan, Distrik Windesi, Distrik Raimbawi yang berada di pesisir Kepulauan Yapen
	e. Rawan Terkena Dampak Perubahan Iklim	semua distrik yang berada di pesisir Kepulauan Yapen
	(6) Kawasan Lindung Geologi	
	a. Rawan Bencana Alam Geologi (Rawan Tsunami)	Distrik Wonawa, Distrik Poom, Distrik Windesi, Distrik Yapen Utara dan Distrik Yapen Timur
	b. Rawan gempa Bumi	Distrik Wonawa, Distrik Poom, Distrik Yapen Utara, Distrik Raimbawi, Distrik Teluk Ampimoi, Distrik Angkaisera dan Distrik Kosiwo

LAPORAN AKHIR

No	Nama Rencana Ruang	Lokasi
	(7) Kawasan Lindung Lainnya (Kawasan Terumbu Karang)	Seluruh distrik di perairan kabupaten
	2) Kawasan Budidaya	
	(1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	
	a. Hutan Produksi Terbatas	Distrik Rainbawi, Distrik Yapen Utara, Windesi, Poom, Miosnom, Wonawa, Yapen Barat, Kosiwo, Yapen Selatan, Angkaisera, Teluk Ampimoi dan Distrik Yapen Timur
	b. Hutan Produksi Tetap	Distrik Kepulauan Ambai, Pulau kurang di Distrik Yapen Barat, dan Kurudu di Distrik Rainbawi
	c. Hutan Produksi Konversi	Distrik Rainbawi, Distrik Yapen Timur, Distrik Teluk Ampimoi dan Distrik Angkaisera
	(2) Kawasan Peruntukan Pertanian	
	a. Tanaman Pangan	Yapen Timur, Yapen Selatan, Yapen Utara, Yapen Barat, Angkaisera, Kosiwo dan Poom
	b. Holtikultura	Yapen Timur, Yapen Selatan, Yapen Utara, Yapen Barat, Angkaisera, Kosiwo dan Poom
	c. Perkebunan	Kosiwo, Angkaisera dan Yapen Utara
	d. Peternakan	tersebar di seluruh distrik
	(3) Kawasan Peruntukan Perikanan	
	a. Perikanan Tangkap	Distrik Yapen Timur, Distrik Yapen Barat, Miobo, Yapen Utara, Windesi, Poom, Wonawa, Kosiwo, Kepulauan Ambai, Teluk Ampimoi, Yerui, Angkaisera, Yapen selatan dan Rainbawi
	b. Budidaya Perikanan	
	a) Rumput Laut dan teripang	Kosiwo, Yapen Barat, Yerui, Teluk Ampimoi, Wonawa, Yapen Selatan
	b) Kerapu	Yerui, Wonawa, Yapen Barat, Kepulauan Ambai, Kosiwo, dan Teluk Ampimoi, dan Ambai
	c. Pengolahan Hasil Perikanan	Yapen Selatan
	(4) Kawasan Peruntukan Pertambangan	
	a. Pertambangan Mineral atau Batubara	Distrik Yapen Selatan
	(5) Kawasan Peruntukan Industri	
	a. Industri Besar	Wilayah Yapen Timur
	b. Industri Sedang	Kawasan Perdagangan dan Jasa

LAPORAN AKHIR

No	Nama Rencana Ruang	Lokasi
	c. Industri Kecil	Area Pemukiman Penduduk
	(6) Kawasan Peruntukan Pariwisata	
	a. Pariwisata Sejarah	Serui Distrik Yapen Selatan
	b. Pariwisata Alam	Distrik Kosiwo, Yapen Timur, Poom, Yapen Utara, Yapen Selatan dan Rainbawi
	c. Pariwisata Budaya	Yapen Selatan, Kepulauan Ambai, dan Yapen Timur
	d. Pariwisata Bahari	Keplauan Ambai, Yapen Barat dan Yerui
	(7) Kawasan Peruntukan Permukiman	
	a. Permukiman Perkotaan	Serui di Distrik Yapen selatan, Angkaisera di Distrik Angkaisera, Ambai di Kepulauan Ambai, Wonowa di Distrik Wonowa dan Yobi di Distrik Yapen Utara
	b. Permukiman Perdesaan	seluruh kampung di Kabupaten Kepulauan yapen
	(8) Kawasan Peruntukan Lainnya	
	a. Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan	Polres Kepulauan Yapen di Yapen Selatan, Polsek yang terdapat di setiap ibukota kecamatan, Komando Distrik Militer di distrik Yapen Selatan, Koramil yang berada di setiap kecamatan, Kompi Senapan (KIPAN)-E Yonif 753/Arga Vira Tama di Distrik Kosiwo, dan Pos TNI AL tipe B di Serui
3.	Kawasan Strategis	
	1) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan Agropolitan Wanamba, Wondei, Waureto, dan Samborumi
	2) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya	Perkampungan tradisional nelayan yang berada di Kampung Serui Laut dan Kampung Mariadei (Distrik Yapen Selatan), Kampung Ambai (Distrik Kepulauan Ambai), dan Kampung Ansus (Distrik Yapen Barat)
	3) Pengembangan Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup	Hutan lindung dan suaka alam di Kabupaten Kepulauan Yapen

Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Kepulauan Yapen 2011-2031

2.1.2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan proyeksi tahun 2012 adalah 88.611 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 45,589 jiwa dan penduduk perempuan 43,022 jiwa dengan rasio jenis kelamin 105,97. Jika dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010 dengan jumlah penduduk 82,951 jiwa dengan rasio jenis kelamin 107,5 maka terdapat kenaikan jumlah penduduk yang cukup signifikan dalam kurun waktu dua tahun terakhir sebanyak 5.660 jiwa dengan perbandingan rasio jenis kelamin yang pergerakannya relatif konstan yaitu 105 dan 107 ; dimana terdapat 100 jiwa penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki sebanyak 105-107 jiwa.

Tabel 2.3. Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2012

NO	Distrik	2011			2012		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Yapen Timur	2.433	2.308	4.741	2.533	2.387	4.920
2	Yapen Utara	1.211	1.137	2.348	1.289	1.179	2.468
3	T.Ampimoi	1.741	1.721	3.462	1.828	1.821	3.649
4	Raimbawi	575	561	1.136	630	567	1.197
5	Pulau Kurudu	699	660	1.359	732	695	1.427
6	Angkaisera	4.248	4.076	8.324	4.385	4.211	8.596
7	Kep. Ambai	1.883	1.799	3.682	2.019	1.889	3.908
8	Yapen Selatan	21.886	19.975	41.861	21.118	19.481	40.599
9	Kosiwo	1.943	1.917	3.860	2.061	1.982	4.043
10	Yapen Barat	3.975	3.950	7.925	4.209	4.169	8.378
11	Wonawa	1.459	1.379	2.838	1.546	1.467	3.013
12	Yerui	181	158	339	186	174	360
13	Poom	1.597	1.568	3.165	1.675	1.668	3.343
14	Windesi	1.277	1.257	2.534	1.378	1.332	2.710
	J U M L A H	45.108	42.466	87.574	45.589	43.022	88.611

Sumber : Kepulauan Yapen Dalam Angka, Tahun 2013

Bila memperhatikan produktifitas penduduk berdasarkan usia maka pada tahun 2012 terdapat penduduk usia non produktif 30.816 jiwa dan usia produktif sebanyak 57.795. Dari

LAPORAN AKHIR

penduduk usia produktif 51,36% adalah penduduk laki-laki dan 48,64% adalah penduduk perempuan.

Data Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen menurut struktur usia dan jenis kelamin dengan rincian pada tabel 2.4. berikut ini :

Tabel 2.4. Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen Menurut Struktur Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2011-2012

No.	Struktur Usia	2011			2012		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	0-4	5.899	5.640	11.539	5.042	4.943	9.985
2	5-9	5.481	5.309	10.790	5.034	4.806	9.840
3	10-14	5.551	4.943	10.494	5.301	4.757	10.058
4	15-19	4.512	4.038	8.550	4.729	4.178	8.907
5	20-24	3.616	3.584	7.200	3.969	3.959	7.928
6	25-29	3.609	3.752	7.361	3.842	4.265	8.107
7	30-34	3.552	3.358	6.910	4.033	4.334	8.367
8	35-39	3.055	2.751	5.806	3.859	3.901	7.760
9	40-44	2.740	2.556	5.296	3.368	2.996	6.364
10	45-49	2.328	2.139	4.467	2.634	2.070	4.704
11	50-54	1.856	1.664	3.520	1.718	1.277	2.995
12	55-59	1.165	1.025	2.190	971	715	1.686
13	60-64	738	694	1.432	562	415	977
14	65-69	445	458	903	296	219	515
15	70-74	283	306	589	135	105	240
16	75+	278	269	547	96	82	178
	Jumlah	45.108	42.486	87.574	45.589	43.022	86.11

Sumber : Kepulauan Yapen Dalam Angka, Tahun 2013

Persebaran penduduk di Kabupaten Kepulauan Yapen berhubungan dengan pola pemukiman penduduk dan sosial budaya masing-masing masyarakat adat. Beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk di Kabupaten Kepulauan Yapen antara lain : Iklim, letak bentuk daratan/tanah, kesuburan tanah, sumber alam dan sosial budaya. Persentase penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen yang tersebar pada 14 distrik sampai dengan tahun 2012, persentase terbanyak pertama terdapat di Distrik Yapen Selatan sebesar 45,8 %, persentase terbanyak kedua terdapat di Distrik Angkaisera sebesar 9,7% dan

LAPORAN AKHIR

persentase terbanyak ketiga terdapat di Distrik Agkaisera 9,5%. Sedangkan persentase penduduk terkecil berada di Distrik Yerui yaitu sebesar 0,4%.

Tabel 2.5. Sebaran Penduduk dan Luas Wilayah Menurut Distrik Tahun 2008-2012

No	Distrik	Luas (Km2)	Persentase Penduduk				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Yapen Timur	169	2,2	8,8	5,6	5,4	5,6
2	Yapen Utara	386	3,3	2,7	2,8	2,7	2,8
3	Teluk Ampimoi	266	4,8	4,3	4,1	4,0	4,1
4	Raimbawi	180	3,3	3,3	1,4	1,3	1,4
5	Pulau Kurudu	22	-	-	1,6	1,6	1,6
6	Angkaisera	159	11,1	9,5	9,7	9,5	9,7
7	Kep. Ambai	27	4,8	4,7	4,4	4,2	4,4
8	Yapen Selatan	58	40,0	47,9	45,8	47,8	45,8
9	Kosiwo	363	4,8	4,7	4,6	4,4	4,6
10	Yapen Barat	243	4,3	4,4	9,4	9,0	9,5
11	Wonawa	124	4,4	3,4	3,4	3,2	3,4
12	Yerui	90	-	-	0,4	0,4	0,4
13	Poom	123	3,4	3,5	3,8	3,6	3,8
14	Windesi	222	3,5	2,9	3,1	2,9	3,1
	J u m l a h	2.432,5	100	100	100	100	100

Sumber : Kepulauan Yapen Dalam Angka, Tahun 2013

Sedangkan kepadatan penduduk merupakan fungsi antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Ada wilayah distrik yang padat penduduknya bukan semata-mata karena jumlah penduduknya kecil, tetapi karena luas wilayahnya yang sempit. Di sisi lain ada pula yang penduduknya padat karena memang jumlah penduduknya besar. Jumlah penduduk dengan luasan wilayah mengakibatkan variasi dalam kepadatan penduduk.

Berdasarkan kepadatan penduduk sampai dengan tahun 2012 maka Distrik Yapen Selatan 696 jiwa/Km² diikuti Distrik Angkaisera 54 jiwa/Km² dan Distrik Yapen Barat 34 jiwa/Km² sedangkan yang paling sedikit terdapat di Distrik Yerui yaitu 4 jiwa/Km². Sedangkan rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen adalah 36,43 jiwa/Km² pada tahun 2012 terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.2.1. Pendidikan

Angka pendidikan yang ditamatkan adalah angka yang menunjukkan tingkat kelulusan pada suatu jenjang pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta dengan perolehan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini dapat juga merujuk pada angka rata-rata lama sekolah pada setiap jenjang pendidikan. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. Semakin tinggi APT pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi maka semakin baik kualitas SDM di suatu daerah. Berdasarkan data yang diolah dari SKPD terkait (Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja, BPS dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga) sampai dengan tahun 2012 APT jenjang pendidikan SD/ sederajat 23,45%, jenjang pendidikan SMP/ sederajat 18,88%, jenjang pendidikan SMU/ sederajat 32,53%, jenjang pendidikan Diploma/ Sarjana Muda 3,13% dan jenjang Pendidikan Tinggi/ strata satu 5,41%. Dari data olahan tersebut juga nampak penduduk yang belum atau tidak memiliki ijazah dengan porsi 29,2%. Jika dibandingkan data olahan dalam 5 tahun terakhir maka APT untuk semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan demikian pula untuk jenjang pendidikan SD terjadi peningkatan kinerja (jumlahnya terus menurun) sementara jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi diharapkan terus naik. Sedangkan penduduk yang tidak memiliki ijazah angkanya berfluktuasi yaitu tertinggi pada tahun 2008 sebanyak 38,02 dan terendah pada tahun 2012 sebanyak 29,2

namun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 angkanya cenderung mengalami penurunan sesuai dengan trend yang diharapkan. Idealnya angka ini harus terus menurun karena Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah setiap tahun terus naik (setiap orang wajib mengikuti pendidikan dasar). Tingginya APT untuk penduduk yang tidak memiliki ijazah dipengaruhi oleh jumlah penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar SD yang masih bersekolah dan penduduk putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar.

Tabel 2.6. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan (APT)
Tahun 2008-2012 Kabupaten Kepulauan Yapen

No	Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (APT)	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Tidak/Belum Punya Ijazah	38,02	30,16	31,75	24,55	29,20
2	APT SD/Sederajat	30,36	30,91	32,54	42,94	23,45
3	APT SMP/Sederajat	11,04	11,94	12,57	16,52	18,88
4	APT SMA/Sederajat	20,16	20,75	21,85	28,44	32,53
5	APT Akademi	Div!	Div!	Div!	2,69	3,13
6	APT Perguruan Tinggi	5,82	6,24	6,92	8,86	5,41

Sumber : Diolah dari data Dukcapil, BPS, Profil Pendidikan

Jika angka APT diatas dicermati lebih lanjut maka rata-rata tahun lama sekolah untuk semua penduduk berijazah semua jenjang pendidikan berada pada jenjang pendidikan menengah pertama.

2.2.2. Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal dari sektor kesehatan, melainkan juga dipengaruhi faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, keturunan, dan faktor lainnya.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) seperti pada tabel dibawah ini untuk 5 tahun terakhir.

Tabel 2.7. Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB), Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Balita Tahun 2009-2013

Tahun	Kematian bayi usia < 1 tahun	Kelahiran Hidup	AKB	AKHB	AKI	AKABA
2009	13	1.859	6,99	993,01	484,1	8,1
2010	8	1.847	4,33	995,67	324,8	5
2011	13	1.949	6,67	993,33	307,9	15
2012	17	1.918	8,86	991,14	364,9	13
2013	45	2.381	18,90	981,10	461,8	22
Rata-rata	19,20	1.991	9,15	990,85	388,70	12,62

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen

2.2.3. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja. Pengangguran adalah penduduk yang masuk dalam angkatan

LAPORAN AKHIR

kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum bekerja. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah didapat dari pembagian jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang di kenal dengan Rasio Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Perkembangan penduduk usia 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan utama dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8. Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Tahun 2008-2012 Kabupaten Kepulauan Yapen

No	Jenis Kegiatan Utama	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Angkatan Kerja	38.216	42.544	37.358	42.560	38.664
	a. Bekerja	37.128	38.687	34.040	39.924	35.887
	b. Pengangguran	1.088	3.857	3.318	2.636	2.777
2	Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, mengurus RT, lainnya)	14.839	12.506	13.641	17.285	20.048
3	Jumlah penduduk usia kerja (1) + (2)	53.055	55.050	50.999	59.845	58.712
4	TPAK/tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	72,03	77,28	73,25	71,12	65,85
5	TPT /tingkat pengangguran terbuka(%)	2,85	9,07	8,88	6,19	7,18

Sumber : Kabupaten Kepulauan Yapen Dalam Angka, 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa TPAK dalam 5 tahun terakhir berfluktuasi mengikuti jumlah dan komposisi struktur penduduk angkatan kerja 15-64 tahun. Angka TPAK tertinggi pada tahun 2009 yaitu 77,28% pada posisi jumlah angkatan kerja 42.544 orang dan TPAK terendah pada tahun 2012 yaitu 65,85 pada posisi angkatan kerja 38.644 orang. Jika diperhatikan maka angka TPAK ini cenderung mengalami trend penurunan yang berarti terjadinya penurunan jumlah penduduk

yang bekerja pada berbagai sektor usaha dan pada akhirnya secara makro akan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan angka pengangguran terbuka (TPT) biasanya mengikuti trend penurunan angka TPAK, dalam 5 tahun terakhir TPT mengalami fluktuasi namun cenderung mengalami kenaikan. Jika memperhatikan angka TPT pada 2 tahun terakhir maka TPT tahun 2011 sebesar 6,19 telah meningkat menjadi 7,18 pada tahun 2012 atau terjadi kenaikan 1%. Terjadinya penurunan angka TPAK dan naiknya angka TPT dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit diidentifikasi penyebab dominannya tanpa melakukan kajian yang lebih luas. Tetapi secara makro angka pertumbuhan ekonomi kabupaten Kepulauan Yapen dengan pertumbuhannya lambat dapat mengindikasikan banyak sektor-sektor ekonomi potensial yang belum maksimal dikelola sebagai sumber lapangan pekerjaan. Masih tingginya angka pengangguran yang ditunjukkan dalam dua tahun terakhir yaitu diatas angka 2.000-2.700 orang dapat dikatakan sebagai suatu jumlah yang besar yang belum terserap secara optimal ke dalam berbagai sektor lapangan kerja yang ada sebagai akibat dari terbatasnya akses penduduk pada sektor-sektor tersebut. Dengan demikian upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah antara lain meningkatkan kapasitas/daya saing dari angkatan kerja yang ada sehingga mampu bekerja secara swadaya bahkan menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan ketrampilan berusaha/wirausaha mandiri baik kelompok maupun perorangan.

Banyaknya penduduk yang bekerja di Kabupaten Kepulauan Yapen yang terserap dalam berbagai sektor bidang usaha seperti pada Tabel berikut :

LAPORAN AKHIR

Tabel 2.9. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2012 Kabupaten Kepulauan Yapen

Lapangan Usaha	Tahun 2011				Tahun 2012			
	L	P	Jml	%	L	P	Jml	%
Pertanian	13.204	10.490	23.694	59,3	10.073	6.318	16.391	48,4
Industri	2.158	221	2.379	6,0	1.881	460	2.341	6,9
Jasa-jasa	8.141	5.710	13.851	34,7	9.412	5.732	15.144	44,7
Jumlah	23.503	16.421	39.924		21.366	12.510	33.876	

Sumber : Kabupaten Kepulauan Yapen Dalam Angka, 2013

Dari tabel diatas pada tahun 2012 angkatan kerja yang bekerja menurut lapangan usaha pertanian 59,3% pada tahun 2011 menurun menjadi 48,4% pada tahun 2012 atau menurun 10,9%; sedangkan pada bidang Industri pada tahun 2011 6,01 % mengalami kenaikan menjadi 6,9% pada tahun 2012 dan pada bidang Jasa-jasa pada tahun 2011 adalah 34,7 % mengalami kenaikan menjadi 44,7% pada tahun 2012 atau meningkat 10%. Dari data diatas yang persentase yang bekerja dibidang industri < dari 10% karena pertumbuhan industri di daerah ini juga tidak bertambah. Dengan demikian pekerjaan sektor pertanian dalam arti luas dan sektor jasa-jasa adalah bagian yang masih terbuka lebar untuk dikelola pada masa mendatang dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah daerah maupun swasta.

2.2.4. Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan bidang kesenian dan budaya, termasuk di bidang keolahragaan sangat erat terkait dengan kualitas hidup manusia/penduduk. Hal ini sesuai dengan dua sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii)

LAPORAN AKHIR

mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Data perkembangan seni, budaya dan olah raga dalam kurun waktu 5 tahun tidak mengalami perubahan jumlah dan angka rasio yang penting, atau dengan kata lain kuantitasnya tetap dengan kondisi pertumbuhan yang juga tidak bertambah.

Sampai dengan tahun 2012 jumlah sanggar seni/kelompok kesenian berjumlah 64 dengan rasio ketersediaan per 100.000 penduduk 0,0145 yang berarti pada setiap distrik terdapat 3-4 kelompok kesenian. Sedangkan jumlah dan rasio gedung kesenian sampai saat ini tidak tersedia, pelaksanaan pentas seni biasanya dilaksanakan pada gedung serba guna milik pemerintah atau di lapangan terbuka terutama untuk kegiatan seni yang melibatkan masyarakat adat/suku/keret seperti pelaksanaan festival adat suku. Sedangkan situs budaya yang dilestarikan berjumlah 2 unit yaitu situs bekas rumah tinggal Pahlawan Nasional Dr.Sam Ratulangie, dan tugu salib injil masuk di Yapen. Untuk mendorong tumbuh kembangnya grup-grup kesenian dan pelaku seni di Kabupaten Kepulauan Yapen maka diperlukan upaya pemerintah untuk mengadakan atau mengikuti festival kesenian secara teratur baik tingkat daerah maupun nasional bahkan sampai ke mancanegara. Pelaksanaan festival budaya setiap tahun yang memperlombakan berbagai jenis kesenian daerah diharapkan dapat meningkatkan jumlah grup-grup kesenian setiap tahunnya. Pemberian insentif/penghargaan kepada sanggar seni juga dapat memotifasi grup-grup kesenian yang telah ada untuk tetap berkreasi. Pembangunan gedung fisik sanggar seni sebagai pusat pertunjukan kesenian diperlukan dimasa depan sebagai sarana ajang kreatifitas seni budaya.

LAPORAN AKHIR

Sedangkan pertumbuhan klub olah, gedung olah raga dan lapangan olah raga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir jumlahnya relatif tidak bertambah. Tahun 2012 klub olah raga berjumlah 252 (rasio 0,00352) yang terbagi kedalam 18 Pengcab organisasi olah raga daerah, gedung olah raga 3 buah (rasio 0,295) dan lapangan olah raga berjumlah 12 buah (rasio 0,6333) yang tersebar pada 14 distrik. Untuk pelaksanaan olah raga even daerah dan nasional sudah dapat dilaksanakan di Serui dengan fasilitas 1 buah lapangan stadion yaitu Stadion Sam Ratulangi untuk penyelenggaraan pertandingan sepak bola dan perlombaan atletik (terdapat fasilitas lintasan lari sintetis bertaraf internasional yang dibangun tahun 2012 dari dana APBD dan APBN).

Tabel 2.10. Perkembangan Seni, Budaya dan Olah raga Tahun 2008-2012 Kabupaten Kepulauan Yapen

No	Capaian Pembangunan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah grup kesenian	47	50	59	61	61
2	Jumlah gedung kesenian	-	-	-	-	-
3	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	-	-	1	1
4	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	2	2	2	2	2
5	Jumlah klub olah raga	223	252	252	252	252
6	Jumlah gedung olahraga	3	3	3	3	3
7	Jumlah Lapangan olahraga	10	10	11	11	12
	Jumlah Penduduk	77.778	79.390	82.951	87.574	88.611
1	Rasio grup kesenian	0,0165	0,0159	0,0141	0,0144	0,0145
2	Rasio gedung kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rasio klub olah raga	0,00349	0,00315	0,00329	0,00348	0,00352
4	Rasio gedung olah raga	0,259	0,265	0,277	0,292	0,295
5	Rasio Lapangan Olah Raga	0,778	0,794	0,691	0,730	0,633

Sumber: - Diolah dari data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi Kabupaten Kepulauan Yapen pada aspek pelayanan umum disusun ke dalam tabel capaian indikator setiap variabel aspek pelayanan umum.

2.3.1. Fasilitas Pendidikan

Tersedianya sekolah dengan sarana ruang belajar yang baik dan memadai mutlak diperlukan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Penilaian tingkat kerusakan suatu bangunan dilakukan secara menyeluruh pada suatu bangunan fisik sekolah oleh ahli bangunan/konsultan. Penilaian secara periodik dilaksanakan oleh SKPD terkait guna mengetahui kondisi fisik suatu bangunan terutama pada bangunan sarana pendidikan yang berusia diatas 20 tahun. Berdasarkan data yang diolah dari Profil Pendidikan Kepulauan Yapen tahun 2013, diketahui bahwa kondisi sarana ruang kelas SD yang baik hanya 62,70% sedangkan yang lain pada kondisi rusak ringan ada 21,69% dan rusak berat 15,61%. Pada jenjang pendidikan SMP bangunan sekolah pada kondisi baik 67,03% sedangkan kondisi rusak ringan 20,54% dan rusak berat 12,43%. Pada jenjang pendidikan SM/MA bangunan sekolah pada kondisi baik 86,26% sedangkan kondisi rusak ringan ada 11,45% dan rusak berat 2,29%.

LAPORAN AKHIR

Tabel 2.11. Kondisi Fisik Bangunan Sekolah
Tahun 2009-2013 Kabupaten Kepulauan Yapen

No	Indikator	Tahun/ Jumlah / % Indikator					Rata-Rata
		2009	2010	2011	2012	2013	
1.	SD/MI						
1.1.	Jumlah Ruang Kelas	775	727	786	739	756	
1.2.	Baik	356	373	382	451	474	407,20
	Baik (%)	45,94	51,31	48,60	61,03	62,70	53,91
1.3.	Rusak Ringan	187	191	223	183	164	189,60
	Rusak Ringan (%)	24,13	26,27	28,37	24,76	21,69	25,05
1.4.	Rusak Berat	232	163	181	105	118	159,80
	Rusak Berat (%)	29,94	22,42	23,03	14,21	15,61	21,04
2.	SMP/MTs						
1.1.	Jumlah Ruang Kelas	165	194	167	178	185	
1.2.	Baik	93	114	126	120	124	115,40
	Baik (%)	56,36	58,76	75,45	67,42	67,03	65,00
1.3.	Rusak Ringan	30	37	23	42	38	34,00
	Rusak Ringan (%)	18,18	19,07	13,77	23,60	20,54	19,03
1.4.	Rusak Berat	42	43	18	16	23	28,40
	Rusak Berat (%)	25,45	22,16	10,78	8,99	12,43	15,96
3.	SM/MA						
1.1.	Jumlah Ruang Kelas	113	123	127	108	131	
1.2.	Baik	91	90	96	95	113	97,00
	Baik (%)	80,53	73,17	75,59	87,96	86,26	80,70
1.3.	Rusak Ringan	14	23	15	9	15	15,20
	Rusak Ringan (%)	12,39	18,70	11,81	8,33	11,45	12,54
1.4.	Rusak Berat	8	10	16	4	3	8,20
	Rusak Berat (%)	7,08	8,13	12,60	3,70	2,29	6,76

Sumber : Diolah dari Profil Pendidikan Kab.Kepulauan Yapen

Kualifikasi Guru Mengajar

Angka kualifikasi atau kelayakan guru mengajar diukur dengan membandingkan jumlah guru berijazah dengan jumlah guru pada waktu tertentu. Indikator lain yang digunakan adalah proporsi guru yang sudah tersertifikasi dan guru yang terlatihmengajar pada setiap jenjang pendididkan. Jika

LAPORAN AKHIR

memperhatikan data olahan maka sampai dengan tahun 2013 kondisi kualifikasi guru pada jenjang pendidikan SD/Mi masih rendah karena 33,4% berijazah S1 keatas dan 66,6% berijazah dibawah S1. Guru yang bersertifikat mengajar 22,5% dan yang belum bersertifikat 64,5%. Hal ini menjadi tantangan besar untuk SKPD terkait guna mempercepat peningkatan kompetensi guru untuk peningkatan mutu lulusan pada jenjang pendidikan SD/MI. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/Mts kualifikasi guru mengajar sudah jauh lebih baik dengan 84,27% guru berijazah S1 keatas, hanya saja pada jenjang pendidikan ini masih terdapat 70,13% guru yang belum bersertifikasi mengajar. Pada jenjang pendidikan SM/MA kondisi kualifikasi guru mengajar sudah jauh lebih baik dari jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/Mts ; tahun 2013 kualifikasi 94,98% guru berijazah S1 keatas dan dengan dukungan guru yang bersertifikasi sebanyak 38,46%.

Kondisi kualifikasi kelayakan guru mengajar di Kabupaten Kepulauan Yapen seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.12. Kualifikasi Ijazah S1-DIV dan dan Sertifikasi Tahun 2011-2013 Kabupaten Kepulauan Yapen

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun/Persentase					
		2011		2012		2013	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Guru SD/MI	933		935		938	
1.1.	S1 keatas	168	18,01	178	19,04	313	33,4
1.2.	Dibawah S1	765	81,99	757	80,96	625	66,6
1.3.	Bersertifikat	19	2,04	93	9,95	211	22,5
1.4.	Belum bersertifikat	911	97,64	832	88,98	605	64,5
2.	Guru SMP/MTs	364		371		375	
2.1.	S1 keatas	307	84,34	279	75,20	316	84,27
2.2.	Dibawah S1	57	15,66	92	24,80	59	15,73
2.3.	Bersertifikat	55	15,11	78	21,02	84	22,40

LAPORAN AKHIR

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun/Persentase					
		2011		2012		2013	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%
2.4.	Belum bersertifikat	281	77,20	291	78,44	263	70,13
3.	Guru SM/MA	318		302		299	
3.1.	S1 keatas	298	93,71	284	94,04	284	94,98
3.2.	Dibawah S1	20	6,29	18	5,96	15	5,02
3.3.	Bersertifikat	63	19,81	70	23,18	115	38,46
3.4.	Belum bersertifikat	243	76,42	224	74,17	171	57,19

Sumber : Diolah dari Profil Pendidikan Kab.Kepulauan Yapen

2.3.2. Kesehatan

Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Rasio pemerataan dihitung dengan membandingkan jumlah Pos Yandu dengan jumlah balita. Sampai tahun 2013 Posyandu berjumlah 126 unit yang terdiri dari 102 Posyandu Pratama dan 24 Posyandu Madya (tersebar pada 14 distrik ; 111 kampung), dengan persentase ketersediaan posyandu 113,5 %. Hal ini berarti bahwa setiap kampung telah memiliki 1 buah posyandu bahkan pada distrik/kampung dengan penduduk terpadat telah memiliki 1-2 posyandu, kondisi demikian mengindikasikan sampai dengan tahun 2013 jumlah posyandu cukup dan memadai. Rasio layanan posyandu per 100 balita sampai tahun 2013 adalah 0,845 atau setiap posyandu mampu melayani sampai dengan 84 balita, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka trennya terus meningkat sejak tahun 2010 yang hanya mampu melayani 65 balita. Dengan demikian untuk lebih memberdayakan layanan Posyandu di distrik/kampung maka pelatihan/pembinaan kader-kader posyandu dan PKK perlu terus dilaksanakan setiap tahunnya.

Tabel 2.13. Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2009-2013
Kabupaten Kepulauan Yapen

Jumlah	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Posyandu	124	128	129	130	126
Jumlah Kampung	111	111	111	111	111
Jumlah Balita	8.116	8.359	10.975	11.358	10.648
Posyandu Tersedia (%)	111,7	115,3	116,2	117,1	113,5
Rasio Layanan Posyandu per satuan balita	0,655	0,653	0,851	0,874	0,845

Sumber : Diolah dari Profil Kesehatan Kab. Kepulauan Yapen

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Rasio ketersediaan dihitung dengan membandingkan jumlah sarana kesehatan yang ada dengan jumlah penduduk pada saat tertentu. Tahun 2013 rasio layanan Puskesmas adalah 1:6.816 atau 1 Puskesmas melayani 6.816 penduduk dengan rasio ketersediaan 1,46 (13 Puskesmas). Jika dibandingkan dengan tahun 2012 dengan rasio layanan puskesmas adalah 1:7.384 atau 1 puskesmas melayani 7.384 penduduk dengan rasio ketersediaan 1,35 (12 Puskesmas) maka dapat dikatakan kinerja layanan puskesmas dari ketersediaan fasilitas fisik telah meningkat cakupannya (rasio ≥ 1 pada rasio SPM 1:10.000 penduduk). Untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan layanan puskesmas yang tersedia saat ini maka perlu melaksanakan peningkatan status puskesmas rawat jalan menjadi puskesmas rawat inap dengan terus membenahi fasilitas puskesmas yang telah ada termasuk persiapan tenaga medis perawat dan dokter. Sampai dengan tahun 2013 terdapat Puskesmas Rawat Inap 4 buah yaitu Puskesmas Perawatan Menawi, Puskesmas Perawatan Ansus, Puskesmas Perawatan Poom, Puskesmas Perawatan Tindaret sedangkan untuk menjangkau distrik-distrik yang belum ada puskesmas juga tersedia Puskesmas Keliling 23 unit.

Untuk Puskesmas Pembantu sampai dengan tahun 2013 rasio layanan adalah 1:1.550 atau 1 Pustu mampu melayani

LAPORAN AKHIR

1.550 penduduk dengan rasio ketersediaan 0,643. Angka rasio ini masih sama dengan angka tahun 2012 karena data penduduk 2013 belum dirilis BPS. Dengan memperhatikan angka-angka ini maka terlihat kinerja puskesmas pembantu dari segi jumlah dan cakupannya terus meluas, dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2009 dengan rasio pustu 0,56 telah meningkat menjadi 0,64 pada tahun 2013. Walaupun demikian kondisi ini masih dapat diperluas cakupannya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan pemekaran kampung-kampung yang terus terjadi (rasio belum terpenuhi $0,64 \leq 1$). Untuk terus memperlebar layanan kesehatan untuk menutupi rasio puskesmas pembantu yang belum memadai maka sudah dieliminasi dengan dengan fasilitas kesehatan yang serupa seperti tersedianya Polinkam (tersedia 30 unit) dan Poskeskam (tersedia 21 unit) yang tersebar pada 14 Distrik.

Tabel 2.14. Jumlah Puskesmas, Pustu Tahun 2009 - 2013
Kabupaten Kepulauan Yapen

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Puskesmas	8	8	9	12	13
Jumlah Pustu	45	47	47	57	57
Jumlah Penduduk	79.390	82.951	87.574	87.574	88.611
Rasio Puskesmas	1,00	0,96	1,03	1,37	1,47
Rasio Pustu	0,567	0,567	0,537	0,651	0,643

Sumber : Diolah dari Profil Kesehatan Kab. Kepulauan Yapen.

Rasio Rumah Sakit, Dokter dan Paramedis

Rasio ketersediaan sumber daya kesehatan dihitung dengan membandingkan data tersedia per 100.000 penduduk. Kondisi sumber daya kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen dalam 5 tahun terakhir seperti pada tabel berikut :

LAPORAN AKHIR

Tabel 2.15. Rumah Sakit, Dokter dan Tenaga Medis Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Kepulauan Yapen

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Rumah Sakit	1	1	1	1	1
2	Dokter Spesialis	2	4	4	5	4
3	Dokter Umum	20	18	19	20	19
4	Dokter Gigi	2	3	3	3	2
5	Jumlah Tenaga Medis ;	24	25	26	28	25
6	Bidan	67	67	68	68	67
7	Perawat	284	230	339	341	344
8	Tenaga Apoteker	5	5	6	6	6
9	Tenaga Farmasi	19	19	20	20	22
10	Tenaga Gizi	20	21	21	21	26
11	Tenaga Kesmas	47	51	52	52	55
12	Tenaga Sanitasi	18	22	26	26	24
13	Tenaga Teknis Medis	21	24	24	28	29
	Jumlah Penduduk	79.390	82.951	87.574	87.574	88.611
1	Rasio Rumah Sakit	1,26	1,21	1,14	1,14	1,13
2	Rasio dokter spesialis	2,52	4,82	4,57	5,71	4,51
3	Rasio dokter umum	25,19	21,70	21,70	22,84	21,44
4	Rasio dokter gigi	2,52	3,62	3,43	3,43	2,26
5	Rasio Tenaga Medis ;	30,23	30,12	29,67	31,59	28,21
6	Bidan	84,39	80,77	77,65	77,65	75,61
7	Perawat	357,73	277,27	387,10	389,38	388,21
8	Tenaga Apoteker	6,30	6,03	6,85	6,85	6,77
9	Tenaga Farmasi	23,93	22,91	22,84	22,84	24,83
10	Tenaga Gizi	25,19	25,32	23,98	23,98	29,34
11	Tenaga Kesmas	59,20	61,48	59,38	59,38	62,07
12	Tenaga Sanitasi	22,67	26,52	29,69	29,34	27,08
13	Tenaga Teknis Medis	26,45	28,93	27,41	31,60	32,73

Sumber : Diolah dari Profil Kesehatan

Rasio Rumah Sakit

Rasio ketersediaan Rumah Sakit dihitung dengan membandingkan jumlah ketersediaan rumah sakit per 100.000 penduduk. Sampai tahun 2013 rasio layanan Rumah Sakit 1:88.611 atau 1 Rumah Sakit melayani 88.611 penduduk dengan rasio ketersediaan 1,13. Pada kondisi per 100.000 jumlah

LAPORAN AKHIR

penduduk diatas dengan rasio >1 dikatakan ketersediaan rumah sakit tercukupi (SPM 1:100.000).

Walaupun dari segi ketersediaan rumah sakit di daerah terpenuhi namun dari segi mutu pelayanan masih dirasakan belum memadai mengingat kondisi rumah sakit lama yang ada saat ini banyak ruangan mengalami kerusakan dan sanitasinya sangat buruk, jumlah ruangan tersedia tidak memadai terutama pada saat menghadapi kejadian luar biasa penyakit mengakibatkan banyak penggunaan ruangan tidak sesuai dengan fungsinya. Bertolak dari kondisi mendasar tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen berupaya membangun 1 unit rumah sakit baru yang lebih representatif dalam 4 Tahun Anggaran berturut-turut sejak tahun 2010 berlokasi di Kampung Wainakawini dengan fisik pekerjaan saat ini 90% (masih ada unit yang belum terbangun sesuai master plan seperti unit IPAL, pembenahan jaringan air ledeng, listrikserta pengadaan perlengkapan ruangan yang belum sepenuhnya lengkap). Namun karena kebutuhan pelayanan masyarakat yang mendesak maka sejak tahun 2014 Rumah Sakit Wainakawini telah dioperasikan sebagai Rumah Sakit Rawat Jalan sambil terus melanjutkan pekerjaan yang belum selesai.

Rasio Tenaga Dokter/Medis

Dalam lima tahun terakhir ini pertumbuhan tenaga dokter di Serui relatif konstan atau bahkan mengalami penurunan. Sampai dengan tahun 2013 terdapat 4 orang dokter spesialis dengan beban layanan 1:22.152 penduduk, 9 orang dokter umum dengan beban layanan 1:4.663 dan 2 orang dokter gigi dengan beban layanan 1:44.305 dengan rasio ketersediaan tenaga medis 28,21. Jika memperhatikan rasio

ketersediaan maka dalam 5 tahun terakhir juga relatif konstan bahkan mengalami penurunan, pada hal angka rasio ini idealnya akan terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2013 rasio dokter spesialis 4,51 lebih rendah dari tahun 2012 dengan rasio 5,64. Dokter umum pada tahun 2013 dengan rasio 21,44 lebih rendah dari tahun 2012 dengan rasio 22,57 dan dokter gigi pada tahun 2013 dengan rasio 2,26 juga mengalami penurunan dibanding tahun 2012 dengan rasio 3,39. Kondisi penurunan ini dimaklumi karena tenaga dokter yang ada masih ada yang status PTT dengan kontrak kerja 6 bulan sampai 1 tahun kedepan, juga ada dokter yang melanjutkan studi ke jenjang S2, pindah tugas ke daerah lain ataupun pulang kampung. Pada kondisi rujukan SPM layanan kesehatan untuk ketersediaan tenaga dokter 1:2.500 penduduk maka sampai dengan tahun 2013 dengan komposisi penduduk yang sekarang dibutuhkan ketersediaan tenaga dokter minimal 35 tenaga dokter per satuan penduduk.

2.3.3. Lingkungan Hidup

Persentase Penanganan Sampah

Sebagaimana pertumbuhan populasi yang terus meningkat, maka hal yang sama terjadi pada produksi sampah. Di tahun 2013 mengalami peningkatan 9,70% dibanding tahun 2009. Dalam Kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2009 kinerja di bidang persampahan mengalami peningkatan yang ditandai dengan peningkatan persentase penanganan sampah sebesar 59,02% di tahun 2013 hingga mencapai 93,25%. Bahkan pada tahun 2011 mencapai 97,22% meskipun tahun 2012 sempat hingga hanya mencapai 66,67%, hal ini disebabkan kerusakan beberapa armada dan kontainer namun dengan dukungan pemerintah, kinerja pengelolaan persampahan dapat dioptimalkan

melalui penambahan armada dan perbaikan peralatan pendukung disamping pembenahan manajemen pengelolaan persampahan.

Tabel 2.16. Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2009 – 2013 Kabupaten Kepulauan Yapen

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah volume produksi sampah	34.128	44.064	34.660	33.696	37.440
2.	Jumlah sampah yang ditangani	11.680	19.710	33.696	22.464	34.912
3.	Persentase	34,22	44,73	97,22	66,67	93,25

Sumber : Kantor Kebersihan ,Pertamanan dan Pemadam Kebakaran

Penduduk Berakses Air Minum

Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Yang dimaksud akses air bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal.

Luas Permukiman yang Tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Persentase luas permukiman yang tertata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17. Persentase Luas Permukiman yang Tertata Tahun 2008 -2012 Kabupaten Kepulauan Yapen

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	luas area permukiman tertata (m ²)	223.17	223.17	223.17	223.17	224.18
2.	luas area permukiman keseluruhan (m ²)	351.14	351.14	351.14	351.14	351.14
3.	Persentase Luas Permukiman yang Tertata (%)	63.56	63.56	63.56	63.56	63.84

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 2014

Dari tabel nampak jelas bahwa sejak 2009 hingga 2012 persentase luas pemukiman yang tertata memperlihatkan angka yang konstan, baik pada luas area permukiman yang tertata maupun luas areal permukiman secara keseluruhan. Adapun kenaikan hanya pada tahun 2013 namun tidak terlalu signifikan yakni hanya 0,28%, artinya 99,72% luas permukiman masih yang belum tertata. Kondisi ini bisa dimaklumi mengingat Master Plan Perumahan memang belum dijalankan secara optimal.

2.3.4. Perhubungan

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2009, angka jumlah penumpang bus cenderung terus meningkat hingga tahun 2013 terutama di tahun 2011 dan 2012. Lonjakan yang paling tinggi adalah di tahun 2012 yakni mencapai 679,10%, hal ini dipengaruhi dengan penambahan jumlah bus di tahun 2011 dan tentunya tidak terlepas dari peningkatan daya dukung infrastruktur jalan dengan adanya pembangunan dan peningkatan jalan yang cukup signifikan di tahun tersebut. Tingginya tingkat layanan angkutan bus ini di sisi lain menurunkan kapasitas angkut armada yang ditandai dengan menurunnya angka jumlah penumpang bus di tahun 2013

meskipun tidak terlalu berarti. Kondisi ini serta merta memberikan suatu gambaran kebutuhan akan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana angkutan darat agar tetap mampu mengakomodir mobilitas barang maupun jasa dalam kabupaten.

Persentase kenaikan jumlah penumpang angkutan laut dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2009 memperlihatkan grafik yang turun naik namun cenderung mengalami peningkatan terutama hingga tahun 2012. Angka kenaikan tertinggi adalah di tahun 2011 yakni mencapai 14.963 penumpang atau sekitar 13,60% dari tahun sebelumnya sebesar 110.024 penumpang. Ini cukup logis mengingat kecenderungan masyarakat untuk menggunakan angkutan laut dalam dan antar daerah tetap bertahan seiring ketersediaan layanan angkutan yang cukup memadai. Selain kapal penumpang PELNI seperti KM Doro Londa, Sinabung, dan Nggaulu yang melayani pelayaran Nasional melalui pelabuhan Serui di Distrik Yapen Selatan, juga terdapat kurang lebih 3(tiga) kapal perintis yang melayani masyarakat untuk pelayaran-pelayaran lintas kabupaten seperti KM. Papua Baru, KM. Papua Empat, KM. Papua Lima, sedangkan dalam kabupaten ada 4(empat) yakni KM. Yapwairon, KM. Sabuk Nusantara 29, KM. Masirei dan KM. Mandala 9 yang melayani penumpang melalui dermaga-dermaga perintis seperti Ansus (Distrik Yapen Barat), Wooi (Distrik Wonawa), Randawaya (Distrik Teluk Ampimoi) Kurudu (Distrik Miobo), Kaipuri (Distrik Yapen Timur) dan Poom (Distrik Poom), selain itu kurang lebih ada 4 (empat) kapal kayu yang melayani penumpang Seui-Waropen seperti KM Dioskuri, KM. Telaga Kampoku 03, KM. Lestari Permai dan Obistar 02. Tahun 2013 jumlah penumpang agak sedikit menurun sekitar 4,71% dari 126.587 penumpang di tahun 2012 menjadi 120,620 penumpang di tahun 2013. Penurunan ini

LAPORAN AKHIR

cukup realistis dikarenakan 2 kapal penumpang PELNI tidak lagi beroperasi dalam beberapa bulan terakhir, meskipun PELNI mengoperasikan 1 buah kapal pengganti tetapi lintasan trayeknya tidak sama sehingga masyarakat perlu penyesuaian. Selain itu kondisi ini tidak terlepas dari pergerakan ekonomi terutama sektor usaha swasta dengan 2 kabupaten lain yakni Mamberamo Raya dan Waropen sehingga kecenderungan masyarakat menggunakan pilihan pesawat udara sebagai alternatif layanan angkutan yang paling efisien dari segi waktu.

Tabel 2.18. Jumlah Arus Penumpang Umum Tahun 2009-2013 Kabupaten Kepulauan Yapen

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah penumpang Bus (Orang)	1.110	2.357	11.221	87.423	87.415
2.	Jumlah penumpang Angkutan Pedesaan(Orang)	690	190	3.002	18.335	18.241
3.	Jumlah penumpang Kapal laut (Orang)	101.373	110.024	124.987	126.587	120.620
4.	Jumlah penumpang Pesawat udara (Orang)	13.542	21.059	16.362	24.172	18.536
5.	<i>Jumlah Penumpang</i>	<i>116.715</i>	<i>133.630</i>	<i>155.572</i>	<i>256.517</i>	<i>244.812</i>

Sumber : Dinas Perhubungan 2014

Tabel 2.19. Jumlah Penumpang Angkutan Umum Menurut Distrik Tahun 2013 Kabupaten Kepulauan Yapen

No	Distrik	Jumlah Penumpang				Total Jumlah Penumpang
		Bus	Angkutan Pedesaan	Kapal Laut	Pesawat Udara	
1	Yapen Selatan	-	-	118.989	18.536	137.525
2	Angkaisera	60.161	10.152	-	-	70.313
3	Kepulauan Ambai	-	-	-	-	-
4	Ampimoi	-	870	498	-	1.368
5	Yapen Timur	-	-	-	-	-
6	Raimbawi	-	-	-	-	-
7	Pantura	815	2.932	-	-	3.774

LAPORAN AKHIR

No	Distrik	Jumlah Penumpang				Total Jumlah Penumpang
		Bus	Angkutan Pedesaan	Kapal Laut	Pesawat Udara	
8	Windesi	-	-	-	-	-
9	Poom	-	-	194	-	194
10	Wonawa	-	-	117	-	117
11	Yapen Barat	-	-	801	-	801
12	Kosiwo	26.439	4.265	-	-	30.704
13	Miobo/Kurudu	-	-	42	-	42
14	Yerui	-	-	-	-	-
	Jumlah	87.415	18.241	120.620	18.538	244.812

Sumber : Dinas Perhubungan 2014

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Sejak tahun 2009, jumlah pelabuhan laut mengalami penambahan hampir setiap tahun hingga mencapai 7 (tujuh) buah pelabuhan laut di tahun 2013. Jumlah tersebut termasuk dermaga-dermaga untuk kapal perintis yang tersebar di kurang lebih 5 (lima) distrik. Dengan demikian membuka daerah-daerah terisolir di Kepulauan Yapen. Keberadaan kapal-kapal perintis yang sudah menjangkau ke daerah-daerah terpencil ini sangat membantu peningkatan perekonomian rakyat setempat baik untuk pemasaran hasil pertanian, perikanan, peternakan maupun pemenuhan kebutuhan akan jasa dan barang yang lain. Kondisi ini tentunya serta merta memberikan pengaruh positif pada perputaran roda perekonomian di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Hingga saat ini, Jumlah pelabuhan udara yang ada di Kepulauan Yapen ada 2 (dua) buah yaitu Bandara Sujarwo di Kota Serui (Distrik Yapen Selatan) dan Bandara Kamanap di Distrik Kosiwo. Namun hanya Bandara Sujarwo yang beroperasi untuk melayani kebutuhan angkutan udara bagi masyarakat hingga saat dokumen ini disusun. Adapun Bandara Kamanap

yang jarak tempuhnya \pm 36 Km dari Kota Serui masih terus dibenahi dalam rangka upaya pengoperasian dalam Tahun 2014. Jarak tempuh yang cukup jauh tersebut dengan kondisi fisik yang ada saat ini sesungguhnya belum layak untuk mendukung aktifitas pencapaian sebuah bandara yang seharusnya bebas hambatan, mengingat alasan pemilihan transportasi via udara sebagai alternatif urutan pertama karena efisiensi waktu. Karenanya, segala upaya sudah ditempuh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten demi kelayakan pengoperasian bandara ini baik pembenahan pada lokasi bandara sendiri, pembangunan jalan maupun berbagai infrastruktur pendukung lainnya termasuk aksesibilitas jaringan utilitas. Meskipun pengoperasian dalam tahun 2014 ini hanya mampu melayani pesawat jenis twin otter seperti yang selam ini beroperasi di Bandara Sujarwo, namun dalam waktu yang sama kegiatan pembenahan terus berjalan untuk mendukung pengoperasian di Tahun 2015 yang direncanakan mampu melayani pendaratan bagi pesawat jenis ATR dengan kapasitas muat penumpang \pm 40 orang. Dengan begitu pelayanan di bidang transportasi udara di tahun mendatang bisa lebih efisien.

Kebijakan pemerintah dalam hal ini dinas perhubungan sejak tahun 2010 tidak nampak dalam hal penambahan jumlah prasarana transportasi darat. Hal ini ditunjukkan dengan angka jumlah terminal bus di tahun 2009 yang berjumlah 2 (dua) buah hanya bertambah 1 (satu) buah di tahun 2010 dan kondisi ini tidak berubah hingga tahun 2013 yakni sejumlah 3(tiga) buah, masing adalah Terminal Menawi, Ariepe dan Kamanap. Namun demikian untuk tetap dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kinerja pelayanan di bidang transportasi darat diarahkan kepada perluasan jaringan pelayanan dengan

LAPORAN AKHIR

penambahan armada berupa bus angkutan umum. Kedepannya kebijakan mengenai pelayanan bidang transportasi darat tidak menutup kemungkinan untuk penambahan terminal bus mengingat pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat yang tentunya menuntut penambahan jumlah armada angkutan umum.

Tabel 2.20. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus Tahun 2009 s/d 2013 Kabupaten Kepulauan Yapen

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Pelabuhan Laut	4	5	6	6	7
2	Jumlah Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1
3	Jumlah Terminal Bus	2	3	3	3	3
	Jumlah	7	9	10	10	11

Sumber : Dinas Perhubungan , 2014

Tabel 2.21. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus Tahun 2008 s/d 2012 Kabupaten Kepulauan Yapen

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Pelabuhan Laut	3	4	5	6	6
2	Jumlah Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1
3	Jumlah Terminal Bus	2	2	3	3	3
	Jumlah	6	7	9	10	10

Sumber : Dinas Perhubungan , 2014

Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik

Kinerja jaringan jalan sebagai hasil dari manajemen pengelolaan didasarkan kepada beberapa indikator makro, salah satu diantaranya adalah kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi. Kinerja jaringan Jalan Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2009 -2013 Kabupaten Kepulauan Yapen

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Kondisi Baik	101,000	80,260	120,762	147,182	210,687
2.	Kondisi Sedang	125,756	212,626	196,165	190,713	186,923
3.	Kondisi Rusak Ringan	158,657	143,129	132,100	122,032	121,587
4.	Kondisi Rusak Berat	110,444	65,842	54,830	45,930	31,660
5.	Jalan secara keseluruhan	495,857	501,857	503,857	505,857	550,857

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 2014

Sejak 2009 terjadi penambahan panjang ruas jalan sebesar 55 Km atau sebesar 11,09%. Kinerja tertinggi nampak pada tahun 2013 yakni penambahan panjang sebesar 45 km atau sebesar 8,90%. Penambahan tersebut adalah ruas jalan Sumberbaba-Randawaya di sebelah selatan sepanjang 12 Km, ruas jalan Woda Waindu di sebelah Timur sepanjang 5 Km. Selain pembangunan jalan baru juga ada kegiatan peningkatan jalan, hal ini ditandai dengan terjadinya penurunan angka ruas jalan kondisi rusak berat dan meningkatnya angka panjang jalan kondisi baik. Sejak tahun 2009 penurunan kualitas jalan paling signifikan hanya pada tahun 2010, selanjutnya angka ini terus meningkat hingga tahun 2013 dan merupakan tahun dengan kinerja mencapai 63,51 Km atau peningkatan sebesar 43,15% dari tahun 2012. Peningkatan tersebut secara otomatis menurunkan angka ruas jalan kondisi rusak berat dimana mencapai 14,27 Km, sedangkan 85,88% sisanya masuk dalam kategori sedang dan rusak ringan. Sedangkan khusus untuk ruas jalan status jalan nasional sepanjang 51.107 Km sejak tahun 2009 tidak mengalami perubahan sampai dokumen ini disusun, yang terdiri dari 7 ruas jalan sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan nasional.

2.3.5. Rawan Bencana

Bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami (suatu peristiwa fisik, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir) dan aktivitas manusia. Kerap kali peristiwa bencana alam menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian. Kerugian yang dihasilkan sangat variatif tergantung pada kemampuan untuk mencegah atau menghindari bencana dan daya tahan individu.

Bentuk-bentuk bencana yang sering terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen pada umumnya adalah banjir, dan angin puting beliung, serta gempa bumi. Pada musim penghujan ada beberapa wilayah di kabupaten Kepulauan Yapen yang tergolong rawan banjir. Hal ini disebabkan karena beberapa daerah di aliri dengan sungai-sungai besar dan kecil, sehingga kebanjiran sering terjadi pada beberapa kampung yang bermukim sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama di wilayah perkotaan Distrik Yapen Selatan. Wilayah-wilayah yang memiliki potensi rawan bencana banjir antara lain adalah sungai Mantembu, Mariadei, Kalidingin, Woru (Yapen Selatan); Sungai Sanayoka, Borai, Mananayan (Angkaisera); sungai Worui, Panduami (Kosiwo), Sungai Wabuayar (Ampimoi), Sungai Webi (Yapen Barat). Sementara bencana gempa bumi juga sering terjadi karena Kabupaten Kepulauan Yapen berada pada zona/jalur gempa. Selain hal tersebut di atas bencana yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah adalah bencana yang bersifat konflik sosial.

Fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Yapen mengacu pada pedoman yang ada pada pola penanggulangan Bencana Nasional dalam rangka mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana terutama di daerah perkotaan. Adapun strategi umum yang ditetapkan pemerintah

terkait dengan penanggulangan bencana meliputi tahap pencegahan, tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan tahap rekonstruksi.

2.4. ASPEK PEREKONOMIAN

Perekonomian Kabupaten Kepulauan Yapen digerakkan oleh kegiatan-kegiatan di sektor pertanian, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa-jasa.

2.4.1. Potensi Tanaman Perkebunan

Di sebagian besar kampung; seperti Ansus, Dawai, Woda, dan Asai, coklat telah menjadi primadona. Coklat atau kakao memiliki potensi besar untuk digiatkan disamping kopi dan kelapa. Secara akumulatif, kebun kakao telah menjadi komoditas yang paling banyak diusahakan di Kepulauan Yapen.

2.4.2. Potensi Perikanan dan Kelautan

Kepulauan Yapen terletak di sebelah Utara Pulau Papua dan merupakan Kabupaten Kepulauan Yapen. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan GIS diketahui bahwa luas wilayah perairan kabupaten ini sampai dengan batas 4 mil, sesuai dengan batas wilayah pengelolaan wilayah perairan kabupaten dalam UU No 32 Tahun 2004, sekitar 4.718,7 km². Sedang menurut data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2005 disebutkan bahwa luas wilayah perairan laut daerah ini sekitar 35.000 km² dengan potensi perikanan tangkap sekitar 350.000 ton per tahun.

Perairan laut kabupaten ini merupakan salah satu daerah penangkapan ikan yang potensial. Menurut informasi para nelayan, banyak sekali terdapat ikan pelagis, ikan demersal dan

ikan karang di wilayah perairan Pulau Yapen. Namun karena alat tangkap dan perahu yang digunakan oleh para nelayan daerah ini masih terbatas, maka pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan di daerah ini masih relatif rendah.

Potensi sumberdaya ikan di perairan laut Kabupaten Kepulauan Yapen dapat diestimasi secara kasar dengan pendekatan rasio luas wilayah kabupaten ini dibandingkan dengan luas Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 7. Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 995/Kpts/IK.210/9/99 tahun 1999 tentang Potensi Sumberdaya Ikan dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB), wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Yapen termasuk kedalam WPP 7. WPP 7 menurut Komisi Nasional Pengkajian Stok memiliki total potensi perikanan laut sebesar 632.720 ton per tahun. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan GIS diketahui bahwa luas perairan WPP 7 sekitar 1.032.882 km². Bila diasumsikan bahwa: 1) sumberdaya ikan menyebar merata diseluruh perairan yang ada di WPP 7; dan 2) diasumsikan luas wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Yapen 3,39% dari luas perairan WPP 7. Angka 3,39% diperoleh dari pembagian luas wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Yapen menurut Data Dinas Perikanan dan Kelautan seluas 35.000 km² dengan luas WPP 7 sekitar 1.032.882 km². Maka diperkirakan potensi sumberdaya ikan laut di kabupaten ini sebesar 21.440,35 ton per tahun.

LAPORAN AKHIR

Tabel 2.23. Estimasi Potensi SD Ikan di Perairan Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Pendekatan Rasio Luas Perairan Kabupaten Yapen dibanding Luas Perairan WPP 7

Kelompok SD Ikan	Potensi SDI WPP 7 (ton/tahun)*	Estimasi Potensi SDI Perairan Kab Yapen (ton/tahun)**(3,39% x Potensi WPP 7)
Ikan Pelagis Besar	175.260	5.938,86
Ikan Pelagis Kecil	384.750	13.037,64
Ikan Demersal	54.860	1.858,99
Ikan Karang, udang, lobster dan cumi	17.850	604,87
Jumlah	632.720	21.440,35

Sumber : Masterplan Agropolitan, 2008

Perairan laut Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan hasil pengamatan langsung dan wawancara dengan nelayan setempat, memiliki beberapa jenis sumberdaya ikan bernilai ekonomis penting yang cukup beragam, seperti: ikan cakalang (*Katsuwonus pelamis*), albacore (*Thunnus alalunga*) dan tongkol (*Euthynnus affinis*) untuk kelompok ikan pelagis besar; ikan layang (*Decapterus spp.*), kembung (*Rastrelliger spp.*), teri (*Stolephorus spp.*), dan selar (*Caranx spp.*) untuk kelompok ikan pelagis kecil; dan ikan kakap merah (*Lutjanus spp.*), bobara (*Carangoides spp.*), biji nangka (*Upeneus spp.*), baronang (*Siganus spp.*) dan kerapu (*Epinephelus spp.*) untuk kelompok ikan demersal. Disamping itu, juga terdapat kelompok komoditas perikanan lainnya yang juga bernilai ekonomis tinggi, seperti: cumi-cumi (*Cephalopoda sp.*), teripang (*Holothuridae*), crustaceae, lobster dan berbagai jenis ikan karang.

Sebagian besar desa di Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan desa pantai, demikian juga mata pencaharian sebagian penduduknya dalam dibidang perikanan. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa sebagian besar nelayan juga merangkap sebagai petani. Jadi mata pencaharian sebagai

nelayan umumnya ada yang merupakan sambilan utama atau sambilan tambahan.

Dari Hasil Focus Group Discussion yang dilakukan pada 11 desa, terlihat bahwa di 8 desa terdapat aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat. Desa pantai yang teridentifikasi memiliki aktivitas penangkapan ikan diantaranya Wimoni (Ansus II), Ansus I, Ampimoi, Sarawandori, Menawi, Roipi, Ambai I dan Ambai II.

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya. Dalam melakukan penangkapan ikan digunakan teknologi tertentu yang berfungsi untuk memudahkan kegiatan penangkapan. Teknologi penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan di Kabupaten Kepulauan Yapen secara umum terbagi dalam 4 kelompok, yaitu jaring (terdiri dari jaring insang, jaring lingkaran dan jaring udang), pancing (terdiri dari pancing dasar, pancing tonda dan rawai tetap), bagan apung dan lain-lain (terdiri dari panah, bubu dan jala lempar). Teknologi penangkapan yang digunakan masih tergolong tradisional, sehingga produktivitasnya juga masih relatif rendah. Alat tangkap yang paling dominan digunakan nelayan daerah ini terdiri dari pancing tonda, jaring insang dan pancing dasar.

Perahu atau kapal yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan Kabupaten Kepulauan Yapen sebagian besar perahu tanpa motor, dimana pada tahun 2005 jumlahnya sebanyak 4.725 unit atau 90,48% dari total perahu/kapal di daerah ini. Jumlah perahu motor dan kapal

LAPORAN AKHIR

motor 5-10 GT masing-masing 491 unit (9,40%) dan 6 unit (0,12%). Ukuran perahu atau kapal yang digunakan untuk menangkap ikan relatif kecil karena umumnya berukuran dibawah 5 GT. Hal ini tentunya juga mengindikasikan bahwa daerah penangkapan ikan (fishing ground) nelayan daerah ini masih terkonsentrasi di sekitar perairan pantai atau dibawah 12 mil laut. Dari hasil wawancara dengan nelayan, diketahui bahwa sebagian besar nelayan melakukan operasi penangkapan hanya satu hari per trip (one day fishing). Daerah penangkapan hanya berjarak 2-5 km dari pantai. Terdapat dua pola waktu penangkapan. Pertama, nelayan berangkat melakukan operasi penangkapan pada pukul 06.00 dan kembali ke fishing base pukul 15.00. Penangkapan pada siang hari umumnya ditujukan untuk menangkap ikan demersal dan ikan karang. Kedua, nelayan berangkat pukul 17.00 dan kembali pukul 04.00. Penangkapan pada malam hari ditujukan untuk menangkap ikan pelagis. Meskipun demikian, di beberapa tempat seperti di Cina Tua, ada juga nelayan yang melakukan operasi penangkapan selama 2 sampai 3 hari per tripnya.

Musim puncak penangkapan ikan, menurut hasil wawancara dengan nelayan, terjadi pada bulan Januari sampai April. Pada bulan-bulan tersebut hasil tangkapan nelayan lebih banyak dibanding bulan-bulan lainnya. Selain itu ada bulan dimana nelayan sulit untuk melakukan operasi penangkapan karena angin yang cukup besar. Musim angin tersebut biasanya terjadi pada bulan Agustus dan Desember.

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2005 berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Yapen berjumlah 5.635,00 ton. Jumlah produksi tersebut turun dibandingkan dengan produksi tahun 2004 yang mencapai

11.270,00 ton. Jika membandingkan tingkat produksi pada tahun 2005 dengan nilai estimasi potensi sumberdaya ikan di perairan laut Kabupaten Kepulauan Yapen sebesar 21.440,35 ton per tahun terlihat bahwa pemanfaatannya baru mencapai 26,28%. Sedang pemanfaatan tahun 2004 mencapai 52,56%. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan di perairan laut Kabupaten Kepulauan Yapen oleh nelayan setempat masih relatif rendah.

Perkembangan jumlah nelayan di Kabupaten Kepulauan Yapen selama tahun 2004 – 2005 mengalami penurunan sebesar 6,08%, dimana jumlah nelayan tahun 2004 sebanyak 4477 orang dan berkurang menjadi 4205 orang pada tahun 2005. Pada sisi lain, jumlah produksi perikanan pada periode yang sama juga mengalami penurunan sebesar 50%, dimana produksi perikanan tangkap tahun 2004 sebesar 11.270,00 ton dan tahun 2005 berkurang menjadi 5.635 ton. Dari tersebut terlihat bahwa penurunan jumlah produksi jauh lebih besar dibandingkan dengan penurunan jumlah nelayan. Hal ini berarti tingkat produktivitas nelayan daerah ini mengalami penurunan selama periode 2004-2005. Selanjutnya hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan daerah ini.

Rendahnya produktivitas para nelayan di Kabupaten Kepulauan Yapen disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, armada penangkapan yang digunakan umumnya masih relatif sederhana dimana perahu atau kapal umumnya berukuran kecil dan alat tangkapnya sebagian besar masih menggunakan pancing. Hal ini mempengaruhi daya jangkauan daerah operasi penangkapan, lama waktu operasi penangkapan dan produktivitas alat tangkap. Kedua, mata pencaharian sebagai

LAPORAN AKHIR

nelayan di daerah ini bukan merupakan mata pencaharian utama, tetapi merupakan mata pencaharian sampingan utama dan sampingan tambahan. Sebagian besar nelayan di daerah ini juga melakukan usaha lain khususnya sebagai petani. Hal ini tentunya mempengaruhi penggunaan waktu untuk melakukan operasi penangkapan.

Prasarana perikanan tangkap yang tersedia untuk menunjang usaha penangkapan masih belum lengkap. Prasarana pusat pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan hanya tersedia di beberapa tempat saja, padahal pusat pemukiman nelayan sangat banyak jumlahnya. Prasarana bengkel, docking perahu atau kapal, stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPDN) dan gudang penyimpanan dingin untuk ikan (cold storage) masih belum tersedia. Umumnya perahu atau kapal nelayan mendarat di pantai dekat dengan tempat nelayan nelayan, meskipun ada di beberapa tempat nelayan berlabuh di dermaga umum tempat perahu atau kapal barang dan penumpang.

Pemasaran hasil tangkapan nelayan sebagian besar dijual ke pasar lokal. Hasil tangkapan nelayan dari berbagai distrik umumnya dibawa ke pasar ikan di Serui. Ada yang membawa sendiri ikan ke pasar, ada juga yang menjual pada para pedagang di daerahnya masing-masing. Sebagian besar hasil tangkapan nelayan dikonsumsi oleh penduduk setempat, namun jika hasil tangkapan sedang banyak, ada beberapa pedagang yang menjual hasil tangkapan ke pasar regional, seperti ke Nabire, Waropen, Jayapura dan beberapa kota lainnya di Papua dan Papua Barat.

Hasil pengukuran oseanografi, kualitas air dan ekosistem perairan laut yang terlindung seperti teluk, selat dan perairan karang (gosong) menunjukkan indikasi kesesuaian perairan tersebut untuk pengembangan budidaya laut di Kabupaten

LAPORAN AKHIR

Kepulauan Yapen Selatan. Terdapat sekurang-kurangnya 21 lokasi perairan laut terlindung berupa teluk, selat dan gosong yang berpotensi menjadi areal pengembangan budidaya laut dengan klasifikasi tingkat kesesuaian sangat sesuai, sesuai dan sesuai bersyarat.

Tabel 2.24. Lokasi dan Luas Perairan Laut di Kabupaten Kepulauan Yapen yang Diperkirakan Memiliki Potensi untuk Pengembangan Budidaya Laut

Distrik	Lokasi	Kode	Karakteristik perairan	Luas (Ha)	Kesesuaian	Faktor pembatas
Yapen Timur	Teluk Randawaya	1	Teluk	574	Sesuai	Akses darat, salinitas, kekeruhan, sedimentasi
Angkaiser	Teluk Wawuti	2	Teluk	8	Sesuai	-
	Teluk Kainori	3	Teluk	65	Sesuai	-
	Pulau Ambai dan pulau kecil sekitarnya	4	Selat, gosong	414	Sangat sesuai	-
	Kabuena (utara Pulau Saweru)	5	Selat	83	Sesuai	Arus
Kosiwo	Teluk Sarawandori	6	Teluk	38	Sesuai	-
Yapen Barat	Teluk Kyoirawin	7	Teluk	222	Sesuai bersyarat	Akses darat, salinitas, kekeruhan
	Teluk Papuma	8	Teluk	400	Sesuai bersyarat	Akses darat, salinitas, kekeruhan
	Pulau Ansus (Pasir Putih)	9	Selat, gosong	197	Sangat sesuai	Akses darat
	Pulau Manumpang dan pulau kecil di sekitarnya	10	Selat, gosong	71	Sesuai	Akses darat
	Kepulauan Kuran (Pulau Nuori)	11	Selat, gosong	396	Sesuai	Akses darat
	Teluk Warabori	12	Teluk	389	Sesuai	Akses darat
	Teluk Wobi	13	Teluk	88	Sesuai bersyarat	Akses darat, salinitas, kekeruhan
	Teluk ?	14	Teluk	86	Sesuai	Akses darat, salinitas, kekeruhan
	Teluk Tudori (Pulau Kariori)	15	Teluk	283	Sesuai	Akses darat, salinitas, kekeruhan
	Teluk Aibonden	16	Teluk	46	Sesuai bersyarat	Akses darat, salinitas, gelombang
	Teluk Woi	17	Teluk	262	Sesuai bersyarat	Akses darat, salinitas, kekeruhan, sirkulasi

LAPORAN AKHIR

Distrik	Lokasi	Kode	Karakteristik perairan	Luas (Ha)	Kesesuaian	Faktor pembatas
	Pulau Ponokabi	18	Selat, gosong	127	Sangat sesuai	Akses darat dan laut
	Pulau Num sebelah utara dan selatan	19	Teluk, gosong	897	Sesuai	Akses darat dan laut
Poom	Teluk Poom	20	Teluk, gosong	53	Sesuai	Akses darat, lokasi pelabuhan umum
	Teluk Munggui	21	Teluk	370	Sesuai bersyarat	Akses darat, salinitas
Jumlah				5.069		

Sumber : *Masterplan Agropolitan, 2008*

Luas areal potensial tersebut di atas diperkirakan mencapai 5.069 ha yang tersebar di perairan pantai barat dan timur serta utara dan selatan Pulau Yapen. Klasifikasi ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor oseanografis dan kualitas air antara lain salinitas, kekeruhan, sedimentasi dan arus selain faktor kondisi aksesibilitas.

Secara garis besar perairan potensial untuk pengembangan budidaya laut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perairan yang berdekatan dengan pulau besar (mainland) yaitu Pulau Yapen, dan perairan yang relatif jauh dari mainland. Perairan yang berdekatan dengan mainland umumnya berupa teluk, sedangkan yang jauh dari mainland berupa perairan pulau-pulau kecil beserta gosong (kawasan terumbu karang yang terlindung). Karakteristik perairan yang berdekatan dengan mainland adalah besarnya pengaruh daratan (terrestrial) mainland tersebut, dan sebaliknya perairan yang jauh dari mainland yang relatif lebih stabil. Di teluk, yang banyak dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Yapen, bermuarara beberapa sungai yang menyebabkan kualitas air, terutama salinitas, kekeruhan dan kecerahan perairan menjadi tidak stabil.

Lokasi yang memiliki perairan laut potensial terbesar untuk pengembangan budidaya laut adalah perairan teluk dan gosong di

sekitar pulau-pulau kecil sebelah utara dan selatan Pulau Num (897 ha), Teluk Randawaya 574 (ha), kemudian perairan gosong di Pulau Ambai dan pulau-pulau kecil di sekitarnya (414 ha), dan Teluk Papuma (400 ha). Teluk dan perairan di sekitar pulau-pulau kecil di Pulau Num memiliki kualitas air yang cocok untuk pengembangan budidaya laut karena relatif kurang dipengaruhi oleh terestrial (daratan) dan pengaruh positif dari lautan Pasifik. Sayangnya, tingkat aksesibilitas ke perairan potensial di sekitar Pulau Num tersebut relatif rendah, baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Jumlah atau populasi penduduk dan tingkat kemampuan SDM di kawasan tersebut juga relatif rendah. Oleh karena itu prasyarat pengembangan perairan tersebut adalah ditingkatkannya aksesibilitas dan pengembangan sumberdaya manusia secara kualitatif dan kuantitatif.

Berbeda dengan perairan teluk dan gosong di sekitar Pulau Num, Teluk Randawaya relatif sangat dipengaruhi oleh terestrial mengingat begitu banyak sungai yang bermuara di teluk ini, antara lain Sungai Vinggemeni, Sungai Waitair, Sungai Warmetan, Sungai Repepei, dan Sungai Karoep. Pada saat hujan perairan di teluk ini terutama yang berdekatan dengan muara dan pantai menjadi keruh dan salinitas menurun hingga 27 ppt, terutama di bagian utara teluk ini. Kualitas air di sekitar perairan ini menjadi tidak stabil terutama pada saat hujan. Beberapa kawasan pantai Teluk Randwaya memiliki pesisir dengan batimetri yang sangat landai, sehingga pada saat surut air susut hingga menjorok jauh ke laut 25-200 m. Fenomena oseanografi, kualitas air dan ekosistem yang hampir mirip dengan Teluk Randawaya terjadi di Teluk Papuma, sehingga strategi yang sama untuk pengembangan budidaya laut bisa diterapkan di kedua teluk tersebut.

Pulau Ambai dan pulau-pulau kecil di sekitarnya memiliki perairan gosong dan selat yang bisa digunakan untuk pengembangan budidaya laut. Kualitas air di perairan ini relatif stabil karena kurang dipengaruhi oleh terestrial, dibandingkan dengan perairan teluk, seperti Teluk Randawaya atau Teluk Papuma. Lokasi pulau ini relatif terpisah dari daratan Pulau Yapen dibandingkan dengan beberapa teluk yang menempel ke Pulau Yapen.

Kawasan perairan potensial tersebut tidak seluruhnya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan budidaya laut. Terdapat beberapa faktor yang musti dipertimbangkan dalam pemanfaatan kawasan potensial tersebut, yaitu: 1) tingkat kesesuaian perairan, 2) kawasan atau zona penyangga (buffer zone), dan 3) utilitas perairan untuk kepentingan umum dan kepentingan budidaya laut. Perairan yang memiliki tingkat kesesuaian sangat sesuai memiliki tingkat pemanfaatan yang tinggi, sebaliknya perairan dengan klasifikasi sesuai bersyarat. Tingkat kesesuaian lokasi kajian didasarkan kepada analisis oseanografi, kualitas air, ekosistem, aksesibilitas dan sosial budaya masyarakat.

Zona penyangga adalah kawasan perairan yang menjadi penyangga apabila terjadi aktivitas pemanfaatan di kawasan tersebut. Dampak dari kegiatan pemanfaatan tersebut, antara lain dalam bentuk buangan (limbah), seharusnya bisa dinetralisir oleh zona penyangga ini sehingga tidak mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Pemanfaatan perairan dengan mempertimbangkan faktor zona penyangga ini dimaksudkan untuk menciptakan kegiatan budidaya laut yang sesuai dengan daya dukung lingkungan, sehingga peluang jaminan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan usaha budidaya laut relatif lebih tinggi.

Utilitas perairan adalah kawasan perairan yang diperuntukan bagi kepentingan umum yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan perairan untuk budidaya laut, maupun bagi kepentingan langsung budidaya laut itu sendiri. Utilitas umum mencakup kawasan perairan laut untuk pelayaran dalam rangka transportasi atau mobilitas sarana atau prasarana produksi dan pengangkutan atau distribusi hasil budidaya laut. Utilitas budidaya laut mencakup jalan inspeksi, rumah jaga atau dermaga pada sistem KJA atau KJT, para-para jemur di laut pada sistem longline atau rakit dalam budidaya rumput laut, dan sebagainya.

Dengan mempertimbangkan klasifikasi tingkat kesesuaian perairan untuk pengembangan budidaya laut tersebut di atas maka terdapat setidaknya terdapat 3.239,4 ha areal perairan di Kabupaten Kepulauan Yapen yang direkomendasikan yang bisa digunakan untuk pengembangan budidaya laut. Lokasi dan luas perairan untuk pengembangan budidaya laut di kawasan Waureto, Wanamba, dan Wondei. Luas areal perairan yang direkomendasikan tersebut sekitar 63,9% dari luas potensial yang terdapat di kabupaten ini. Berdasarkan pertimbangan zona penyangga (buffer zone), daya dukung (carrying capacity) lingkungan, dan pemanfaatan perairan laut untuk utilitas umum dan budidaya laut (jalur pelayaran internal, fasilitas budidaya dan sebagainya), maka terdapat setidaknya 647,9 ha luas efektif perairan bagi pengembangan usaha budidaya laut atau sekitar 12,8% dari luas potensial yang ada di kabupaten ini.

LAPORAN AKHIR

Tabel 2.25. Luas Areal Perairan Laut yang Direkomendasikan dan Luas Efektif bagi Pengembangan Budidaya Laut di Kabupaten Kepulauan Yapen

Distrik	Lokasi	Potensial (ha)	Tingkat Keseuaian	Rekomen dasi (ha)	Buffer Zone (ha)	Utilitas (ha)	Efektif (ha)
Yapen Timur	Teluk Randawaya	574	Sesuai	373,1	242,5	56,0	74,6
Angkaisera	Teluk Wawuti	8	Sesuai	5,2	3,4	0,8	1,0
	Teluk Kainori	65	Sesuai	42,3	27,5	6,3	8,5
	Pulau Ambai dan pulau-pulau kecil sekitarnya	414	Sangat sesuai	372,6	242,2	55,9	74,5
	Kabuena (utara Pulau Saweru)	83	Sesuai	54,0	35,1	8,1	10,8
Kosiwo	Teluk Sarawandori	38	Sesuai	24,7	16,1	3,7	4,9
Yapen Barat	Teluk Kyoirawin	222	Sesuai bersyarat	111,0	72,2	16,7	22,2
	Teluk Papuma	400	Sesuai bersyarat	200,0	130,0	30,0	40,0
	Pulau Ansus (Pasir Putih),	197	Sangat sesuai	177,3	115,2	26,6	35,5
	Pulau Manupampi dan pulau-pulau kecil di sekitarnya	71	Sesuai	46,2	30,0	6,9	9,2
	Kepulauan Kuran (Pulau Nuori)	396	Sesuai	257,4	167,3	38,6	51,5
	Teluk Warabori	389	Sesuai	252,9	164,4	37,9	50,6
	Teluk Wobi	88	Sesuai bersyarat	44,0	28,6	6,6	8,8
	Teluk ?	86	Sesuai	55,9	36,3	8,4	11,2
	Teluk Tudori (Pulau Kariori)	283	Sesuai	184,0	119,6	27,6	36,8
	Teluk Aibondeni	46	Sesuai bersyarat	23,0	15,0	3,5	4,6
	Teluk Woi	262	Sesuai bersyarat	131,0	85,2	19,7	26,2
	Pulau Ponokabi	127	Sangat sesuai	82,6	53,7	12,4	16,5
	Pulau Num sebelah utara dan selatan	897	Sesuai	583,1	379,0	87,5	116,6
Poom	Teluk Poom	53	Sesuai	34,5	22,4	5,2	6,9
	Teluk Munggui	370	Sesuai bersyarat	185,0	120,3	27,8	37,0
Jumlah		5.069		3.239,4	2.105,6	485,9	647,9
Persentase		100%		63,9%			12,8%

Sumber : Masterplan Agropolitan, 2008

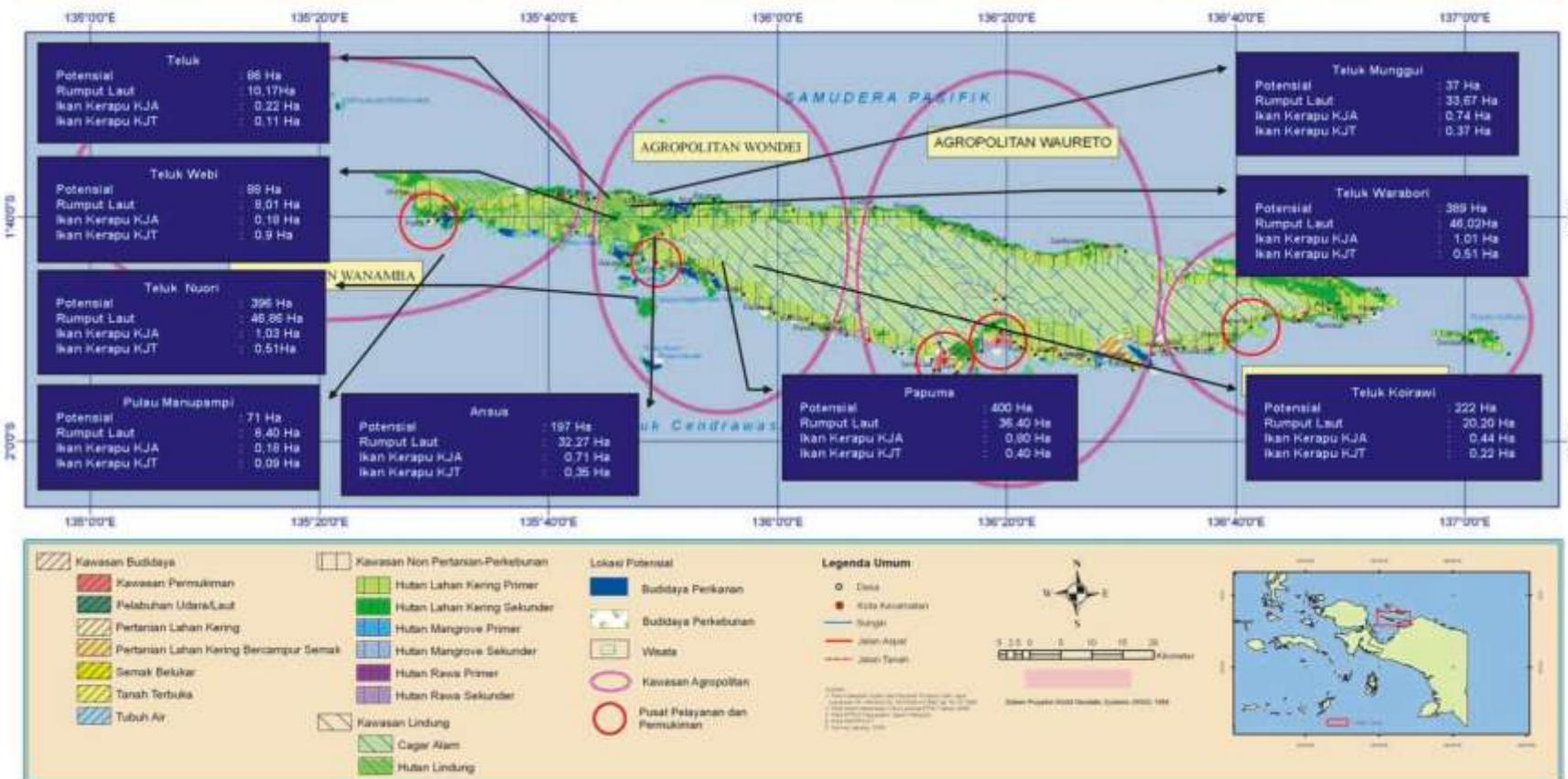
LAPORAN AKHIR

PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN
PROVINSI PAPUA



PENYUSUNAN MASTER PLAN
PENGEMBANGAN EKONOMI
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

PETA Lokasi Dan Luas Perairan Pengembangan Budidaya Laut Kawasan Wondei



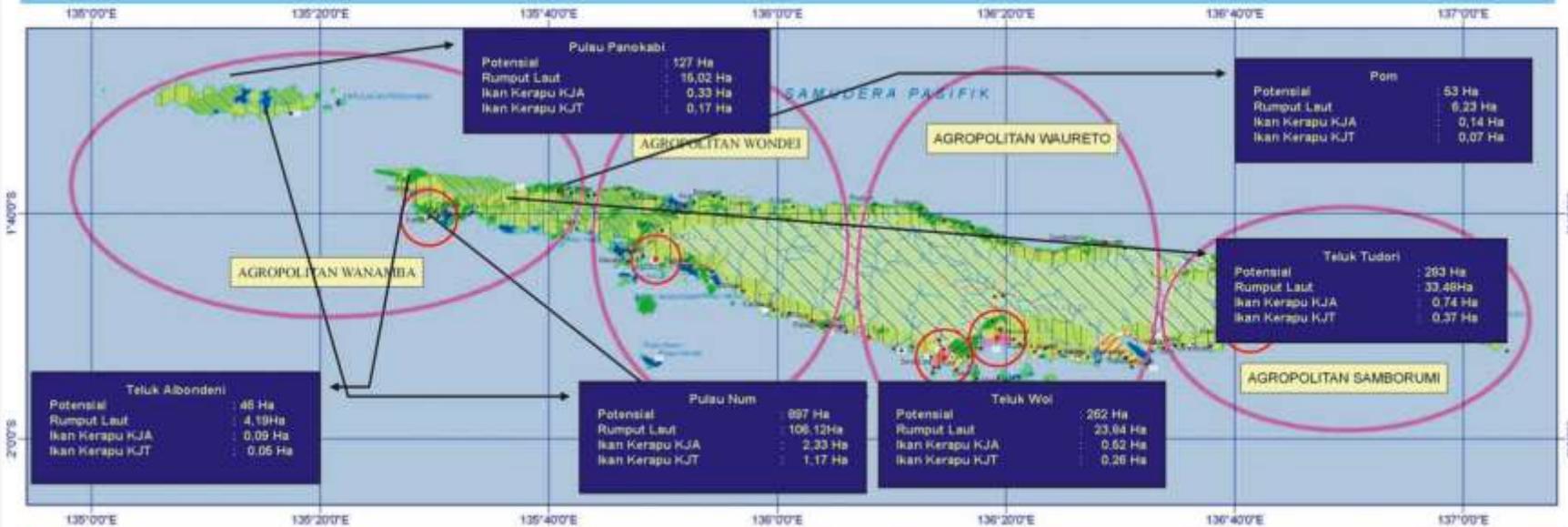
LAPORAN AKHIR

PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN
PROVINSI PAPUA



PENYUSUNAN MASTER PLAN
PENGEMBANGAN EKONOMI
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

PETA
Lokasi Dan Luas Perairan Pengembangan Budidaya Laut Kawasan Wambana



Sumber: Master Plan Agropolitan Kabupaten Kepulauan Yapen, Tahun 2008

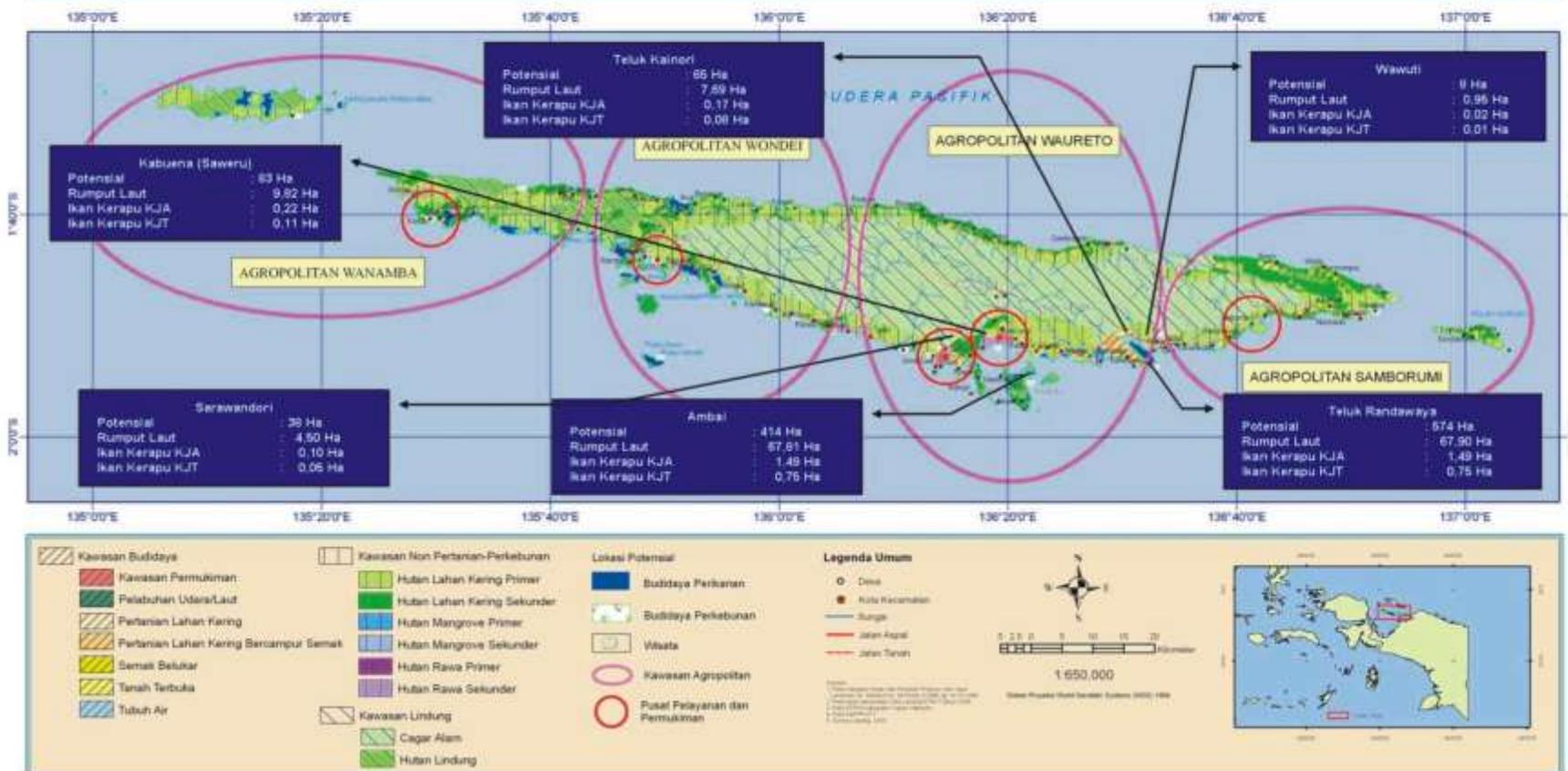
LAPORAN AKHIR

PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN
PROVINSI PAPUA



PENYUSUNAN MASTER PLAN
PENGEMBANGAN EKONOMI
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

PETA Lokasi Dan Luas Perairan Pengembangan Budidaya Laut Kawasan Waureto



LAPORAN AKHIR

PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN
PROVINSI PAPUA



PENYUSUNAN MASTER PLAN
PENGEMBANGAN EKONOMI
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

PETA LOKASI AREAL POTENSI TERSEDIA UNTUK BUDIDAYA LAUT



LEGENDA

- Garis Pantai
- Areal Tersedia untuk Budidaya Laut

Legenda Umum

- Desa
- Kota Kecamatan
- Sungai
- Jalan Aspal
- - - Jalan Tanah

Scale: 0 4 8 16 32 Kilometer

Inset Map: Shows the location of Yapen Island within the Indonesian archipelago.

Yapen Kepulauan (Kabupaten Kepulauan Yapen) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Kabupaten ini terletak di Kepulauan Yapen, bagian utara dari pulau New Guinea. Ibu kotanya adalah Wani. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki luas wilayah 1.100 kilometer persegi dan berpenduduk 100.000 jiwa.

Sumber: Master Plan Agropolitan Kabupaten Kepulauan Yapen, Tahun 2008

Luas efektif perairan adalah badan air yang secara efektif digunakan untuk produksi komoditas perikanan budidaya laut. Sebagai contoh luas efektif KJA adalah luas kantong jaring pemeliharaan ikan yang digunakan dalam sistem tersebut. Produksi, kebutuhan benih atau bibit dan sarana produksi lainnya serta tenaga kerja bisa ditentukan berdasarkan kepada luas efektif perairan tersebut. Luas efektif perairan laut bagi pengembangan budidaya laut terbesar terdapat di perairan teluk dan pulau-pulau kecil sebelah utara dan selatan Pulau Num (116,6 ha), Teluk Randawaya (74,6 ha), kemudian perairan gosong di Pulau Ambai dan pulau-pulau kecil di sekitarnya (74,5 ha), dan Teluk Papuma (40 ha).

2.4.3. Potensi Pariwisata

Walaupun masih sebatas wacana, pariwisata juga bisa menjadi potensi yang menjanjikan di beberapa wilayah. Ekowisata dapat dikembangkan di Barawai dan Yobi dengan pesona alam dan burung Cenderawasihnya, Ansus dan Ampimoi dengan rumah-rumah tradisional dan hutan bakaunya, Pulau Miosindi dengan terumbu karang, ikan hias dan pasir putihnya, serta wisata pancing di Selat Sasorai dengan basis aktivitas di Kaipuri.

Beberapa objek yang perlu dijaga, dipelihara dan dikembangkan potensinya adalah sebagai berikut:

1. Peninggalan rumah kediaman atau situs bekas tempat tinggal Dr. Sam Ratulangi di Pusat Kota Serui;
2. Monumen Salib, Proto GKI masuknya Injil di Serui pada tahun 1962 di Pusat Kota Serui;
3. Monumen/ Tugu Perjuangan masyarakat Yapen di Pusat Kota Serui;

4. Hutan Konservasi Yapen Tengah (kampung Ambaidiru) yang dapat dijumpai berbagai jenis flora dan fauna yang langka dan bervariasi;
5. Habitat Burung Cenderawasih yang dapat ditemukan di Kampung Barawai dan Kampung Poom sepanjang Hutan Konservasi Yapen Tengah;
6. Telaga Air Tawar dan Teluk Sarawandori dengan 3 warna airnya yang berada di Kampung Sarawandori;
7. Habitat Penyu Belimbing di Pantai Ingersau Yapen Timur;
8. Pantai dan Air Mendidih Sungai Aro di Kampung Aromarea;
9. Pantai Rekreasi Banawa dan Mariadei;
10. Pantai Lori yang merupakan pantai terpanjang di Pulau Yapen, berada di Yapen bagian timur;
11. Air Terjun Kampung Mantembu setinggi tujuh meter dari permukaan tanah;
12. Sumur Ajaib di Pulau Aibai Distrik Poom;
13. Terumbu karang ikan hias dan taman laut Kepulauan Ambai;
14. Terumbu karang ikan hias dan taman laut Pulau Kuran;
15. Terumbu karang ikan hias dan taman laut Pulau Miosindi;
16. Terumbu karang ikan hias dan taman laut Pulau Aibai;
17. Terumbu karang ikan hias dan taman laut Kepulauan Miosnum dan Mandena;
18. Perkampungan tradisional rumah laut di Kampung Serui Laut, Ambai dan Ansus;
19. Ukiran muka perahu dan berbagai jenis aksesoris lomba dayung tradisional dari Kampung Ansus, Ambai, Randawaya, dan Turu;
20. Pembuatan kabila dan jalinan manik-manik lebar dari Kampung Ambai;

21. Pembuatan Forna (alat cetak makanan sagu) yang merupakan keramik terbuat dari tanah liat di Serui Laut.

2.4.4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan masyarakat karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah selalu memperhatikan dampaknya pada perluasan kesempatan kerja mengingat besarnya angkatan kerja yang siap masuk ke pasar kerja. Permasalahan ketenagakerjaan seperti sulitnya mencari pekerjaan, pengabaian hak-hak pekerja serta eksploitasi buruh yang berlebihan dapat memicu terjadinya pertentangan-pertentangan yang sering berujung pada kerusuhan masa. Hal ini menandakan pentingnya penanganan ketenagakerjaan yang lebih komprehensif karena menyangkut kelangsungan hidup masyarakat.

Tabel 2.28. Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kepulauan Yapen

Tahun	Angkatan Kerja	Pengangguran terbuka	% Pengangguran	% Pertumbuhan
2007	56141	2167	3.86	
2008	54158	2058	3.8	-5.03
2009	52175	1949	3.8	-5.03
2010	50192	1840	3.8	-5.03

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Yapen

Pada tahun 2007 di Kabupaten Kepulauan Yapen tingkat pengangguran terbuka mencapai 2.167 orang atau 3,86 % dari angkatan kerja 56.141 orang. Pada tahun 2008 tingkat pengangguran terbuka mencapai 2.058 orang atau 3.8 dari angkatan kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja belum terserap secara optimal oleh sector-sektor produksi,

LAPORAN AKHIR

sebagai akibat dari kurangnya lapangan pekerjaan dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang rendah. Sebagai konsekuensi, rendahnya kualitas SDM dan pelayanan pemerintah yang belum optimal, maka struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Yapen masih didominasi oleh sector pertanian.



PENDEKATAN DAN TAHAPAN PENYUSUNAN PWT KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

3.1. PENDEKATAN PERENCANAAN WILAYAH

3.1.1. Perkembangan pendekatan perencanaan

Pendekatan perencanaan wilayah secara umum dapat dibedakan menjadi dua, jenis yakni perencanaan pembangunan ekonomi, dan perencanaan fisik. Kedua jenis pendekatan ini dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut.

a. Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Jenis perencanaan ini bertujuan untuk mencapai suatu tingkat perkembangan ekonomi tertentu suatu wilayah. Pada dasarnya perencanaan ini berkaitan erat dengan struktur serta pertumbuhan dari ekonomi tingkat nasional.

Perhatian utama pendekatan perencanaan ini pada penambahan kapasitas produksi, dan perubahan neraca antar sektor. Oleh karenanya perencanaan ini bersifat makro, dan menghasilkan rencana komprehensi yang mencakup segala sektor

(misalnya REPELITA). Pendekatan perencanaan ini juga lebih menekankan pada penyusunan rencana tertulis yang berguna sebagai *blueprint for the future* atau rencana induk masa mendatang. Pada umumnya rencana blueprint telah menentukan berbagai tujuan dan sasaran tertentu yang perlu dicapai dalam periode perencanaan tertentu (Uma tahunan misalnya).

Manfaat pendekatan perencanaan pembangunan ekonomi sejak tahun 1960 dianggap tidak memuaskan, bahkan orang tidak percaya terhadap manfaat pendekatan ini, dengan alasan sebagai berikut.

- 1) Tujuan dan sasaran yang ditentukan dalam rencana jarang tercapai, dan perencanaan-annya sangat kecil pengaruhnya terhadap laju ekonomi yang seolah-olah berkembang sengan sendirinya,
- 2) Rencana blueprint terlalu kaku tidak memiliki kelonggaran untuk penyesuaian rencana perkembangan baru.
- 3) Komunikasi antara para perencana, penguasa, dan pejabat kurang terjalin erat.
- 4) Timbulnya kesadaran bahwa pembangunan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi saja, dan pertumbuhan itu justru menghalangi pemerataan.

Ketidak-puasan terhadap kelemahan pendekatan ini, menyebabkan terjadinya perluasan bidang maupun pendekatan dari perencanaan tersebut sejak tahun 1970-an, antara lain sebagai berikut.

- 1) Jangkauan perencanaan pembangunan wilayah lebih diperluas. Disamping jangkauan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi nasional, perencanaan juga memperhatikan tujuan politik, kebutuhan sosial, serta pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, metode perencanaan

pun mengalami perubahan:

- Timbulnya analisis untung-rugi suatu rencana tidak lagi ditentukan oleh faktor keuangan saja, tetapi juga dilihat dari aspek sosial dan lingkungan.
 - Faktor ekonomi dan non ekonomi tidak hanya diperhatikan secara terpisah, tetapi didekati secara terpadu.
 - Liputan faktor non ekonomi mengharuskan keterlibatan pakar-pakar ilmu lain, seperti sosiologi, geografi, dan sebagainya; dengan metode masing-masing.
 - Timbulnya cabang-cabang perencanaan pembangunan sebagai spesialisasi tersendiri, misalnya perencanaan sosial dan perencanaan lingkungan.
 - Perencanaan pembangunan mulai memperhatikan perkembangan wilayah di samping perkembangan tingkat nasional.
- 2) Perencanaan pembangunan hendaknya mengurangi ketidakmerataan kemakmuran antar kelompok masyarakat maupun antar daerah. Dengan demikian perencanaan seharusnya digunakan sebagai alat mencapai pemerataan (*planning as egalitarian tool*). Tugas yang baru ini mencakup juga adopsi suatu metode yang dapat membandingkan dan menilai pengaruh-pengaruh program dan proyek pada golongan masyarakat berpendapatan rendah dan daerah tertinggal.
- 3) Dalam pendekatan baru perencanaan tidak hanya mempersiapkan dan menulis rencana, melainkan ikut mengdola dan membimbing pelaksanaan serta menyoroti perkembangan selama rencana dilaksanakan. Jika terjadi perkembangan, baik secara nasional (*intern*) maupun internasional (*extern*), yang akan mempengaruhi laju rencana, maka segera mendapat respon untuk diambil tindakan secara

tepat, Dengan demikian perencanaan dijadikan sebagai proses berkesinambungan, di-mana kesesuaian terapan pada pengembangan ekonomi dan sosial dapat diuji secara berkala. Artinya, perencanaan bergeser dari rencana induk (*blueprint*) ke rencana yang flexible atau mudah disesuaikan.

Pergeseran sifat perencanaan tersebut menyebabkan pula perubahan pokok dalam bidang metode berikut.

- 1) Perencanaan pembangunan tidak lagi hanya memperhatikan tingkat makro, namun juga merencanakan tingkat wilayah, sektor, malah program dan proyek. Khusus perencanaan tingkat proyek dilengkapi dengan teknik penaksiran manfaat yang rinci.
- 2) Perubahan perencanaan lebih lanjut bersifat petunjuk pelaksanaan demi tercapainya tujuan dan sasaran, maka diadopsi teknik penganggaran belanja untuk mengendalikan perencanaan penyediaan biaya.
- 3) Teknik monitoring menjadi penting untuk mengetahui kemajuan dan masalah selama pelaksanaan, sehingga jika diperlukan perencanaan selanjutnya disesuaikan.
- 4) Periode perencanaan tidak begitu mudak lagi, sehingga rencana berlanjutan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan nyata.

b. Perencanaan Fisik Wilayah

Bahasan perkembangan perencanaan fisik pada umumnya mengemukakan uraian hakekat manusia dalam kaitannya dengan lingkungan fisik. Pendapat klasik selalu mengasosiasikan pengertian perencanaan fisik adalah perencanaan kota atau lingkungan permukiman. Pendapat tersebut dewasa ini disadari sebagai pendapat pengertian perencanaan dalam arti sempit. Hal

ini mengingatkan bahwa perencanaan sebenarnya menyangkut berbagai aspek kehidupan yang luas, meliputi segi sosial budaya, ekonomi, dan politik. Dalam hal perencanaan fisik merupakan bagian dari usaha untuk menjawab perubahan-perubahan pada masyarakat yang aspeknya luas tersebut.

Perencanaan fisik merupakan kegiatan perencanaan yang mencakup penge-lolaan penggunaan lahan dan tata ruang. Kegiatan-kegiatan itu mencakup penyusunan rancangan rinci (misalnya lingkungan kota sampai dengan penentuan umum penggunaan ruang suatu wilayah. Jenis perencanaan ini paling populer dan berkembang di negara-negara maju. Pada awalnya perencanaan fisik memusatkan perhatian pada penetapan penggunaan lahan untuk berbagai fungsi, pertanian, perindustrian, permukiman, transportasi perdagangan, rekreasi dan lainnya. Tujuan utama untuk menda-patkan kecocokan lahan dan lokasi dengan fungsi yang paling menguntungkan masyarakat. Dengan demikian sasaran metodenya menyusun rencana induk (*blueprint*) yang menentukan fungsi mana yang diterapkan di suatu lokasi lahan tertentu rencana induk tersebut didasarkan atas survei kenyataan penggunaan lahan di lapangan, untuk dibandingkan dengan penggunaan yang semestinya menurut anggapan perencana. Jika kedua aspek tersebut tidak sesuai, maka disusun rencana perubahan. Perencanaan fisik biasanya dilakukan oleh pakar teknik arsitek atau teknik sipil.

Perencanaan fisik pada tahun 1990-an juga mengalami perubahan dan perkembangan, seperti halnya perencanaan pembangunan. Alasannya ketidakpuasan dalam perencanaan tersebut, dianggap terlalu sederhana dan terbatas. Perkembangan perencanaan fisik sejak tahun 1960-an di negara maju, hampir searah dengan dengan perkembangan perencanaan pembangunan

ekonomi di negara sedang berkembang, terutama pada aspek-aspek berikut.

- 1) Timbuhnya perhatian terhadap aspek sosial ekonomi, sosial dan lingkungan, tidak hanya pada tingkat lokal dan wilayah, tetapi pada tingkat sektoral. Pendekatan penanganan aspek tersebut menjadi lebih terpadu, sehingga disebut perencanaan terpadu. Dari sisi metodologis, perkembangan ini tercermin dalam penggunaan pendekatan sistem, di mana perencanaan dipandang sebagai suatu proses yang terus menerus, saling berkaitan antar sistem kegiatan dengan menekankan pengawasan atas perkembangan suatu wilayah.
- 2) Perluasan jangkauan tersebut menyebabkan keterbatasan berbagai disiplin keahlian lain, misalnya ekonomi, sosiologi dan terutama geografi. Ahli-ahli yang bersangkutan juga memasukkan masing-masing metodologinya sebagai akibat lain adalah pergeseran perhatian dari pembuatan rencana induk ke perencanaan sebagai proses.

Perkembangan yang sejajar yang telah terjadi pada perencanaan pembangunan maupun perencanaan fisik, menyebabkan adanya banyak kesamaan. Namun demikian di negara-negara maju tidak ada masalah persaingan antara kedua jenis perencanaan, karena jenis perencanaan pembangunan tidak banyak ditemukan di sana. Di negara-negara sedang berkembang, jenis perencanaan fisik justru muncul lebih awal, sehingga terjadi persaingan. Peranan perencanaan fisik di negara sedang berkembang pada dasarnya sangat kecil dibandingkan dengan peranan perencanaan pembangunan (kecuali di Indonesia). Perencanaan fisik biasanya menjadi suatu bagian dari kementerian tertentu (misalnya PU, Transmigrasi), yang peranannya terpusat pada perencanaan penggunaan lahan secara rinci,

permukiman, drainase, pusat perdagangan, dan sebagainya. Akibatnya pendekatan metode lama, yaitu pembuatan rencana induk masih umum diterapkan, dan kesannya perencanaan fisik adalah perencanaan kota. Pelaksananya pun berasal dari bidang arsitektur dan teknik sipil. Persaingan kedua perencanaan dapat terjadi pada tingkat proyek. Misalnya proyek pemukiman transmigrasi, bilamana rencana dari kedua bidang atau instansi (BPN dan PU) berurusan dengan tata guna lahan, Pada tingkat yang lebih rendah perlu dibuat kebijaksanaan mengenai pembagian tugas dan tanggungjawab. Seharusnya kedua instansi itu diberi peranan masing-masing dalam rangka perencanaan pengembangan wilayah terpadu.

3.1.2. Persyaratan Pendekatan

Dalam kaitannya dengan pendekatan perencanaan pengembangan wilayah, berbagai persyaratan tertentu sangat diperlukan untuk penyesuaian masalah dan tujuan perencanaan. Tiga pendekatan perencanaan berdasar keterkaitannya dengan persyaratan dan sifat komprehensifitasnya, adalah pendekatan perencanaan rasional menyeluruh; pendekatan perencanaan terpilah; dan pendekatan perencanaan terpilah berdasar pertimbangan menyeluruh. Ketiga jenis pendekatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pendekatan Perencanaan Rasional Menyeluruh

Pendekatan perencanaan rasional menyeluruh atau *Rational Comprehensive Approach* secara konseptual dan analitis mencakup pertimbangan perencanaan yang luas. Didalam pertimbangan tersebut tercakup berbagai unsur atau subsistem yang membentuk suatu organisme atau system secara

menyeluruh. Pertimbangan ini termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan seluruh rangkaian tindakan pelaksanaan dan berbagai pengaruhnya terhadap usaha pengembangan. Produk perencanaan rasional menyeluruh mencakup suatu totalitas dari seluruh aspek tujuan pembangunan. Jadi permasalahan yang dibahas tidak dilihat secara terpisah-pisah melainkan dalam suatu cakupan kesatuan. Pendekatan perencanaan rasional menyeluruh ini juga menempatkan permasalahan tersebut sendiri sebagai suatu kesatuan secara internal, juga dalam hubungannya dengan hal-hal eksternal, yaitu unsur-unsur dari organisme atau sistem yang berada di luar atau di sekitarnya. Walaupun suatu perencanaan rasional menyeluruh tidak bernaksud merealisasikan semua unsur atau subsistem suatu organisme atau sistem tersebut, tetapi line up wawasan perencanaannya sudah merinci keseluruhan aspek dalam suatu kaitan yang terpadu. Karakteristik suatu pendekatan perencanaan rasional menyeluruh memerlukan beberapa persyaratan berikut (Branch, 1983).

- 1) Dilandasi oleh suatu kebijaksanaan umum yang merumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai suatu kesatuan yang utuh.
- 2) Didasari oleh seperangkat spesifikasi tujuan lengkap, menyeluruh, dan terpadu.
- 3) Peramalan yang tepat serta ditunjang oleh sistem informasi (masukan data) yang lengkap, andal dan rinci.
- 4) Peramalan yang diarahkan pada tujuan-tujuan jangka panjang.

Produk perencanaan rasional menyeluruh ini dikenal antara lain sebagai Rencana Induk (*Blueprint* atau *Masterplan*); Rencana Umum (*General Plan*); atau Rencana Pembangunan (*Development*

Plan).

Di beberapa negara maju telah muncul berbagai kritik terhadap keefektifan dari produk perencanaan rasional menyeluruh ini. Di Inggris misalnya pada dekade 1970-an beberapa pakar telah menyoroti keefektifitas *London Masterplan* buatan *Sir Patrick Abercrombie et al.* disamping juga terhadap beberapa rencana induk kota lainnya. Secara umum kritik tersebut didasarkan kepada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh keandalan produk perencanaan rasional menyeluruh sebagai berikut.

- 1) Produk perencanaan menyeluruh dirasakan kurang memberikan informasi dan arahan yang relevan bagi para pembuat keputusan mengenai permasalahan yang harus segera diselesaikan dari sekian permasalahan jangka panjang yang dirumuskan.
- 2) Usaha penyelesaian masalah yang mencakup berbagai unsur atau subsistem dari organisme atau sistem secara menyeluruh dinilai sebagai hal yang sangat sukar di-realisasikan, mengingat faktor finansial dan sifat dinamika perkembangan sistem masyarakat. Dengan demikian ada anggapan bahwa sasaran dan tujuan rencana menyeluruh ini sangat ambisius.
- 3) Karena anggapan serta analisis perencanaan rasional menyeluruh ini menekankan kepada azas totalitas, berarti perlu ditunjang oleh system informasi sebagai masukan data yang lengkap dan rinci, dengan keandalantinggi. Untuk tujuan ini diperlukan penelaahan yang memerlukan dana dan waktu cukup besar. Resiko yang dihadapi adalah waktu penyelesaian rencana dan keandalan mutu data yang melandasi analisis sering tidak sesuai dengan harapan.
- 4) Salah satu syarat tercapainya suatu pelaksanaan

pembangunan berdasarkan rencana menyeluruh adalah sistem koordinasi kelembangan yang mapan. Hal inilah yang pada kenyataannya justru menjadi permasalahan besar.

b. Pendekatan Perencanaan Terpilah

Keberadaan anggapan kurang efektifnya produk perencanaan rasional menyeluruh tersebut, maka telah diajukan suatu bentuk pendekatan perencanaan yang dikenal sebagai Pendekatan Perencanaan Terpilah (*Disjointed Incremental Planning Approach*). Pada hakekatnya pendekatan ini mengutamakan unsur atau subsistem tertentu sebagai yang diprioritaskan tanpa perlu melihatnya dalam wawasan yang meluas. Pendekatan ini dianggap memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menerapkan strategi pengambilan keputusan dengan kapasitas kognitif yang terbatas dan lebih rasional. Suatu perencanaan pendekatan terpilah tidak perlu ditunjang oleh sistem informasi yang lengkap, menyeluruh serta akurat mengenai keadaan keseluruhan, cukup data yang terperinci tentang unsur atau subsistem tertentu yang diprioritaskan tersebut. Ini dianggap sebagai suatu penghematan dana dan waktu untuk penelaahan, analisis dan proses teknis penyusunan rencana. Sasaran dan tujuan yang digariskan di dalam rencana bersifat langsung pada kebutuhan pengembangan suatu unsur atau subsistem tertentu saja. Karakteristik suatu pendekatan perencanaan terpilah memerlukan beberapa persyaratan berikut.

- 1) Rencana terpilah tidak perlu ditunjang oleh penelaahan serta evaluasi alternatif rencana serta menyeluruh.
- 2) Hanya mempertimbangkan bagian-bagian dari kebijaksanaan umum (kalau sudah ada) yang berkaitan langsung dengan

unsur atau subsistem yang diprioritaskan.

- 3) Dengan terbatasnya lingkup perencanaan yaitu pada unsur atau subsistem tertentu saja maka ada anggapan bahwa pelaksanaan dan pelaksanaannya lebih mudah dan realistis.

Permasalahan yang dihadapi oleh produk perencanaan terpilah ini:

- 1) karena kurang berwawasan menyeluruh serta kurang berwawasan sistem, maka sering terjadi dampak atau masalah ikutan yang tidak terduga sebelumnya;
- 2) hanya merupakan usaha penyelesaian jangka pendek yang kurang mengkaitkan dengan sasaran dan tujuan jangka panjang;
- 3) suatu produk perencanaan terpilah hanya merupakan upaya perencanaan untuk menydesaikan masalah secara 'tambal sulam' yang bersifat penyelesaian semen-tara sehingga harus dilakukan secara terus menerus. Kenyataan ini telah dinilai sebagai hal yang tidak efisien.

c. Perencanaan Terpilah berdasar Pertimbangan Menyeluruh

Pendekatan Perencanaan Terpilah berdasar Pertimbangan Menyeluruh ini melihat potensi yang terkandung di kedua pendekatan perencanaan terdahulu. Pada hakekatnya pendekatan ini mengkombinasikan pendekatan rasional menyeluruh dan pendekatan terpilah masing-masing dalam kadar hngkup tertentu yaitu menyederhanakan tinjauan menyeluruh dalam lingkup wawasan sekilas (*scan*) dan memper-dalam tinjauan atas unsur atau subsystem yang strategis dalam kedudukan sistem terhadap permasalahan menyeluruh. Oleh karena itulah maka pendekatan perencana-naan ini disebut sebagai Pendekatan Perencanaan Terpilah berdasarkan Pertimbangan Menyeluruh (*Mixed Scanning*

Planning Approach atau disebut juga sebagai *Mixed Approach*) yakni Pendekatan Ketiga.

Karakteristik suatu pendekatan perencanaan tersebut memerlukan beberapa persyaratan berikut.

- 1) Perencanaan mengacu kepada garis kebijaksanaan umum yang ditentukan pada tingkat tinggi.
- 2) Perencanaan dilatarbelakangi oleh suatu wawasan menyeluruh serta memfokuskan pendalaman penelahaan pada unsur-unsur atau subsistem-subsistem yang diutamakan.
- 3) Ramalan mendalam tentang unsur-unsur atau subsistem-subsistem yang dipriori-taskan dilandasi oleh ramalan sekilas tentang lingkup menyeluruh serta didasarkan kepada wawasan sistem.
- 4) Perumusan rencana dengan pendekatan ini dinilai sebagai usaha penghematan waktu dan dana dalam lingkup penelahaan, analisis dan proses teknis penyusunan rencana karena adanya penyederhanaan dalam penelahaan dan analisis makro.
- 5) Untuk menunjang hasil ramalan dan analisis sekilas maka proses pemantauan, pengumpulan pendapat, komunikasi serta konsultasi dengan masyarakat yang berkepentingan serta dengan pengelola (pemerintah) telah dilakukan secara menerus sejak penyusunan perumusan sasaran dan tujuan rencana pembangunan.

Masalah yang sering dirisaukan tentang produk pendekatan perencanaan ini adalah adanya kemungkinan terjadinya kemelesetan dari ramalan-ramalan, khususnya yang menyangkut tujuan-tujuan jangka panjang karena hanya ditunjang oleh sistem informasi yang didasarkan kepada hasil penelahaan sekilas.

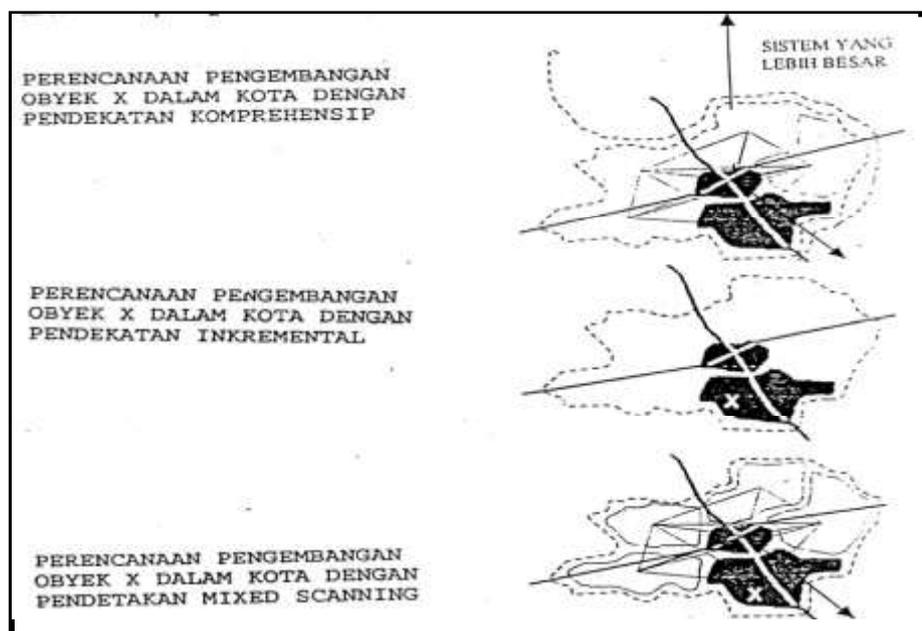
3.1.3. Produk Perencanaan Berdasar Pendekatan

Beberapa contoh produk perencanaan yang berdasarkan ketiga pendekatan diatas

- 1) Produk perencanaan yang berlandaskan pendekatan komprehensif seperti Master-plan, National Planning, Development Plan. Namun bukan berarti bahwa rencana-rencana yang berskala kecil tidak ada yang berlandaskan pendekatan komprehensif. Rencana berskala kecil juga ada yang dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan menyeluruh seperti perencanaan jaringan listrik masuk desa dilandasi oleh berbagai pertimbangan sektoral lainnya yang berwawasan menyeluruh.
- 2) Produk perencanaan yang berlandaskan pendekatan inkremental seperti suatu rencana khusus, rancangan bangunan dan sekitarnya yang terbatas, rencana struktur khusus.
- 3) Produk perencanaan yang dilandasi oleh pendekatan incremental yang berkerangka pikir menyeluruh seperti Rencana Struktur Kota (Structure Plan) yang dikembangkan di Inggris sejak tahun 1968, Action Plan (Perencanaan Tindakan), Development Plan yaitu rencana lingkup makro yang dilandasi oleh pendekatan strategis.

Sebenarnya ketiga pendekatan perencanaan serta produknya tidak ada yang dikatakan sebagai lebih berhasil dari yang lainnya. Masing-masing dapat dikembangkan sesuai dengan lingkup kebutuhannya baik secara substantive maupun secara teritorial. Misalnya suatu national planning atau regional planning mungkin sangat kuat pertimbangan kekomprehensipannya, tetapi sebaliknya pada suatu rancangan detail mungkin pertimbangan inkrementalnya sangat kuat. Masing-masing mempunyai ke-

kurangan dan keistimewaannya sesuai dengan lingkup penggunaan dan keperluan-nya Sebagai suatu contoh dalam hal perencanaan kota ketiga pendekatan perencanaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut ini:



Gambar 3.1.

Beberapa Rencana Wilayah berdasar Perbedaan Pendekatan

3.2. TEORI PERENCANAAN DAN PERKEMBANGANNYA

3.2.1. Teori Perencanaan

Teori secara terminologis bermakna sebagai anggapan-anggapan yang dike-mukakan sebagai suatu penjelasan berdasar alasan yang dilandasi seperangkat fakta. Selain itu dapat berarti sebagai suatu cara untuk memahami tentang sesuatu hal mela-lui suatu kerangka berfikir, yang dapat menginterpretasi fakta dan pengalaman (Webster, 1959). Perencanaan dapat diartikan dari berbagai sudut pandang, bergantung pada segi obyeknya. Namun demikian hakekat perencanaan mengandung empat aspek utama

(Gillie, 1971):

- 1) tujuan yang lebih baik pada masa mendatang;
- 2) keberadaan dan ketersediaan sumberdaya (alam manusia, modal, informasi);
- 3) keberadaan kendala atau keterbatasan;
- 4) dan efisiensi dan efektifitas.

Hubungan antara teori dan perencanaan dapat ditunjukkan dari teori dalam perencanaan dan teori perencanaan. Teori perencanaan berarti suatu anggapan untuk dapat menginterpretasi fakta dan pengalaman menjadi konsep dan rencana; sedangkan teori dalam perencanaan mengandung makna sebagai cara untuk menginterpretasi sehingga dapat menyusun tujuan-tujuan pada masa mendatang dengan cara memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada, serta memperhatikan keterbatasan dan atau kendala yang ada, agar dapat dicapai suatu hasil secara optimal.

3.2.2. Perkembangan Teori Perencanaan

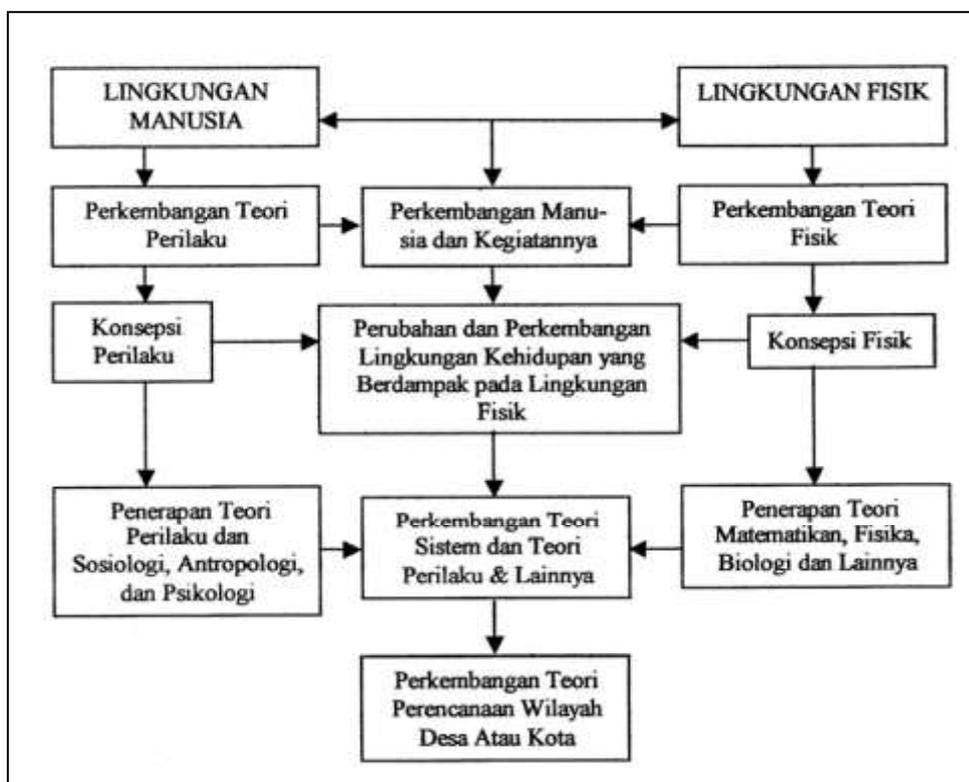
Ide perencanaan sudah dikenal sejak masa Yunani, yakni sejak muncukinya kota-kota berpola pada masa itu, seperti kota-kota di lembah Euphrat dan Acropolis. Namun perencanaan modern baru dikenal sejak akhir abad 19, sejak masa revolusi industri. Di Eropa Barat. Pada awal perkembangan tidaklah didasarkan pada teori, namun justru teori perencanaan berkembang sebagai kelanjutan dari pengalaman tentang usaha manusia dalam mengatasi tantangan kondisi lingkungan kehidupannya. Adanya degradasi aspek sosial budaya manusia, sosial ekonomi dan biofisik yang menyangkut kebiduan, akibat terjadinya industrialisasi secara besar-besaran di Inggris pada akhir abad 19 maka timbul konsep-konsep dari para reformis.

Karl Marx sebagai reformis politik menyoroti bahwa

degradasi kehidupan itu disebabkan oleh adanya kelompok kapitalis, yang berkeinginan meningkatkan keuntungan dengan cara memanfaatkan tenaga manusia murah (kelompok proletar). Di sisi lain Geddes sebagai seorang *environmental reformist* mengemukakan 'trinitas' dalam kehidupan yakni Folk-Place-Work. Langkah tersebut dijabarkan ke dalam konsep yang lebih konkrit oleh Howard (1898) yang dikenal sebagai seorang reformis kemasyarakatan pada ide Garden City sebagai kota masa mendatang. Keseluruhan itu pada dasarnya merupakan upaya untuk mengembalikan manusia kepada lingkungan yang manusiawi. Landasan konseptual tersebut secara nyata diwujudkan kedalam bentuk wilayah kota-kota baru yang dikembangkan antara tahun 1902 hingga 1920.

Dasar konsep di atas menjadi pangkal tolak teori perencanaan yang dikembangkan untuk memperbaiki penyimpangan dalam kegiatan perencanaan pada awal abad 20-an. Sementara itu sejak tahun 1930-an telah dikembangkan pula teori dalam perencanaan berdasarkan ilmu geografi manusia dan geografi ekonomi, seperti timbulnya *Central Place Theory* dari *Walter Christaller* dan lainnya. Teori perencanaan maupun teori-teori dalam perencanaan mulai menonjol sebagai suatu cabang ilmu yang mandiri pada sekitar tahun 1950-an (*McLoughlin*, 1971). Sejak saat itu teori perencanaan tumbuh sebagai suatu bentuk cabang ilmu pengetahuan yang aktif dan mandiri (Faludi, 1973). Pada rangkaian perkembangan tersebut dapat diamati bahwa generasi teori perencanaan bermula dari adanya tuntutan kebutuhan tentang penataan lingkungan manusia dan lingkungan fisik. Penataan lingkungan manusia berkembang pada terbentuknya berbagai teori-teori perilaku (*behavioral theories*) serta konsep-konsep perilaku (*behavioral concepts*). Teori-teori

tersebut menjadi alat untuk melandasi pemikiran yang berkaitan dengan perubahan di dalam system masyarakat dan sistem lingkungan fisik, Oleh karenanya, berkembanglah teori sistem, yakni teori perilaku dan teori fisik sebagai teori yang berkaitan di dalam upaya mencari pemecahan masalah. Perkembangan ini ditunjang oleh berbagai teori lain seperti matematika, fisika, dan biologi. Generasi teori perencanaan secara diagramatis dapat ditunjukkan pada Gambar 3.2. berikut.



Gambar 3.2.
Perkembangan Teori Perencanaan Wilayah

3.2.3. Arab Pemikiran Teori Perencanaan

Gerak perkembangan arah pemikiran teori perencanaan maupun teoridalam perencanaan, menurut Wingo (1989) dapat dibagi menjadi dua aliran, pertama aliran describers, yang sangat

terikat oleh hal-hal yang ada, dan sangat memperhatikan pengalaman yang lalu (*past-present philosophy*), dan kedua sebagai para prescribers yang berwawasan sangat idealistik, melihat jauh ke depan dengan mencoba menemukan konsep-konsep baru bahkan yang belum pernah dimunculkan sebelumnya (*present-future philosophy*). Golongan pertama termasuk para geographers dan golongan kedua adalah para planners.

Degradasi yang terjadi di berbagai bidang kehidupan sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh adanya revolusi industri tersebut, telah menimbulkan berbagai upaya pemikiran. Kesemuanya terarah pada keinginan untuk memperbaiki keadaan. Kedua aliran ini sama-sama menuju kepada keinginan untuk mengembangkan teori perencanaan dan teori dalam perencanaan, tetapi yang pertama bertitik tolak dari konsep klasik organisasi tata ruang dan evolusi Ungkungan permukiman dan kota, sedangkan yang kedua bertitik tolak dari berbagai pemikiran sebagai reformis yang bereaksi terhadap suatu keadaan yang memburuk dan pemikiran Utopia (Thomas More 1516; Jonathan Swift, 1726; Lowdon Wingo, 1969). Para reformis bertindak secara reaksioner berdasarkan tahapan evolusi, sedangkan utopis bertindak secara revolusioner berdasarkan tahapan radikal.

Teori-teori perencanaan yang dikembangkan oleh pemikir deskriptif ini, misalnya tentang evolusi kota dan permukiman, yang kemudian memberikan suatu hasil pengamatan tentang fenomena dan perkembangan kota-kota sebagai perwatakan kota.

Kelompok pemikir ini di lain pihak juga menelaah tentang tata kehidupan sehingga menghasilkan fenomena tentang pola tata ruang. Secara lebih jauh bertolak dari gejala-gejala geografis kemudian juga dikembangkan teori letak pusat atau central place

theory dari Christaller dan teori sturuktur kota dari Ulmann, Burgess dan Mac Kenzie. Aliran preskriptif juga telah berkembang menjadi dua aliran, yaitu aliran utopis yang menuju suatu pemikiran holistik, sedangkan di arah lain terdapat kelompok yang lebih moderat dengan hingkup pemikiran yang bersifat incremental. Produk dari dua kelompok utopis ini seperti konsepsi kota baru dan yang lebih kontemporer seberti Broad Acre City, dan yang lebih realistik seperti Chandigarh atau Dyna Polis, sedangkan yang berpemikiran incremental telah memperkenalkan kon-sepsi peremajaan kota (urban redevelopment dan renewal (Blower etal., 1974).

Perkembangan teori perencanaan itu sendiri terus berkembang yang didasar-kan kepada pengalaman penerapan teori-teori di dalam pemcanaan. Dalam hal ini baik kalangan yang berlandaskan pada dasar deskripsi maupun prekripsi mengemb- bangkan teori-teorinya sesuai dengan keadaan wawasannya. Oleh karena itu dirasa-kan sampai sekarang adanya perbedaan pendapat mengenai perncanaan dan produk perencanaan wilayah dan kota.

3.2.4.Motivasi Teori Perencanaan

Sejalan dengan perkembangan motivasi perencanaan, maka wawasan dari teori perencanaan juga telah mengalami perubahan sesuai dengan motivasi tersebut. Kalau keita menganut pembagian masa sejarah perkembangan peradaban sebagai masa purba, masa Yunani, masa abad pertengahan, masa peralihan (*renaissance*), masa revolusi industri (Mumford, 1956), maka terlihat bahwa dasar pendekatan dan motivasi perencanaan dapat dibedakan sebagaiberikut:

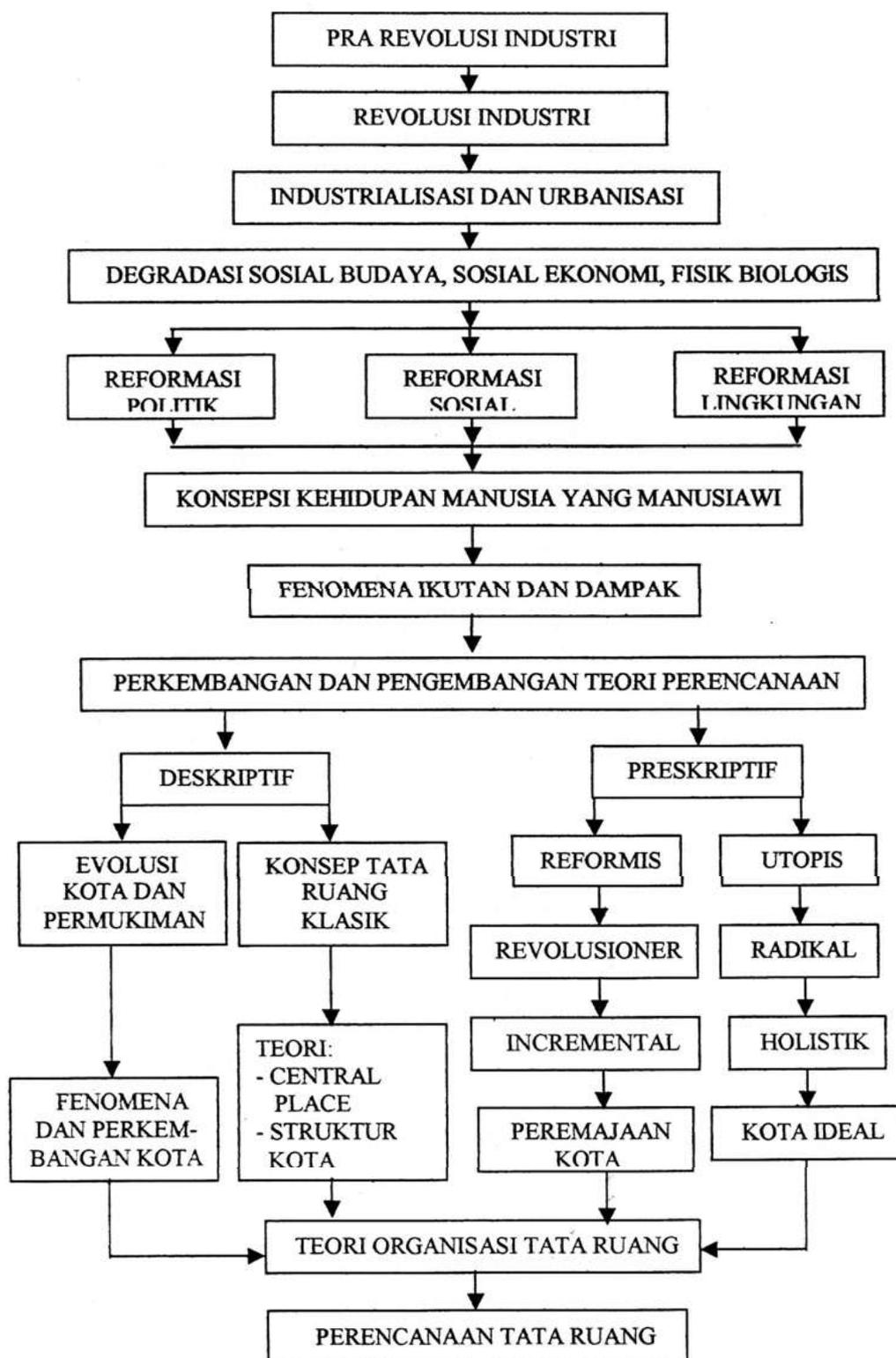
- 1) Antara masa purba sampai masa perlihan lebih ditekankan

kepada pertimbangan fisik, sehingga produk perencanaan dapat dikatakan berupa produk arsitektonis.

- 2) Pada masa revolusi industri motivasi dan pendekatan produk fisik yang didasarkan kepada pertimbangan efisiensi ekonomis.
- 3) Pada awal masa pasca industri maka pendekatan produk perencanaan adalah kepada pertimbangan sosial, ekonomi dan fisik
- 4) Pada masa pasca industri produk perencanaan didasarkan kepada suatu motivasi dan pendekatan multi lingkup.

Keadaan yang terakhir ini menyebabkan perkembangan tuntutan kebutuhan di mana teori-teori perencanaan perlu dilandasi oleh esensi di dalam menghadapi keadaan yang serba multikompleks.

Teori perencanaan pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan secara rasional, sistematis dan dapat di ulang (*repeatable*). Bentuk teori perencanaan meliputi teori kualitatif, kuantitatif dan konseptual. Landasannya meliputi landasan kausal atau fenomenologis, analogi matematis, dan desain. Substansi mencakup pola tata nilai (*behaviour*); demografi dan ekonomi, serta tata ruang. Produk dari teori ini diarahkan kepada suatu produk yang bersifat bukan keruangan (*a spatial*); dan keruangan (*spatial*) atau suatu kombinasi bukan keruangan dan keruangan.



Gambar 3.3.
Perkembangan Teori Perencanaan Wilayah

Aspek itulah yang kemudian menimbulkan suatu pemikiran baru bahwa pendekatan perencanaan tidak dapat efektif apabila sekedar melalui pendekatan multi disiplin. Setiap disiplin keilmuan memecahkan permasalahan kompleks tersebut sesuai dengan bidang keahliannya saja. Pendekatan inter disiplin yakni beberapa bidang disiplin bersama-sama memecahkan masalah multi kompleks tersebut untuk memperoleh kesepakatan didalam pengambilan keputusan dan tindakan yang ditentukan. Dengan adanya perbedaan pendapat dan wawasan masih sering menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karenanya, Alonso (1968) telah mengintrodusir suatu konsep meta disiplin, yang pada hakekatnya merupakan suatu cabang disiplin yang mampu meramu berbagai aspek multikompleks itu, sebagai suatu cara pengambilan keputusan pada tingkat tinggihan disiplin lain akan mengembangkan bagian-bagiannya secara rinci.

3.3. PROSEDUR DAN SISTEM PERENCANAAN WILAYAH

3.3.1. Pengertian Sistem Perencanaan Wilayah

Perencanaan dan Perancangan Wilayah dan Kota, pada hakekatnya akan menyangkut suatu lingkup pemikiran yang menyangkut berbagai faset kehidupan. Keterkaitan ini akan membentuk suatu kerangka pemikiran dari suatu susunan unsur-unsur yang kompleks. Di dalam hal ini akan terkait tiga unsur pokok, yaitu :

- 1) Unsur Pelaku (*Acting elements*)
- 2) Unsur-unsur kegiatan (*functional elements*)
- 3) Unsur-unsur penghubung (*communicating elements*)

Jadi bagi perencana wilayah (regional and city planner) pengertian dan tanggap atas azas keterkaitan ini akan merupakan hal yang sangat penting. Sebagai suatu gambaran kita dapat

melihat bahwa suatu lingkungan pemukiman apakah itu di wilayah pedesaan, terlebih lagi di wilayah perkotaan akan mengandung ke tiga unsur pokok itu yang diwujudkan dalam bentuk berbagai kegiatan seperti perumahan, tempat kerja, pusat pelayanan, tempat hiburan dan lain-lain. Ditambah lagi dengan sejumlah penduduk yang tersebar dalam berbagai lokasi yang berkepentingan dengan unsur-unsur kegiatan tersebut.. Antara unsur kegiatan dan unsur penduduk ini dihubungkan oleh unsur-unsur penghubung seperti jaringan jalan dan sarana perangkutannya.

Keterkaitan berbagai unsur yang kompleks tersebut akan merupakan suatu susunan kerangka yang disebut 'sistem'. Suatu sistem, seperti dikemukakan dalam teori-teori Operation Research (lihat Churshman Acoff dan Arnoff, 1957) dan Cybernetics (Wiener. 1948 dan Ashby, 1956) dikatakan sebagai : 'A complex whole; a set of connected things or parts; an organized body of material or imaterial things; a group of objects'related or interacting so as to form a unity". Suatu kerangka kompleks yang membentuk suatu perangkat dimana terdapat keterkaitan antara berbagai unsur dan Jbenda atau suatu bentuk terorganisasi dari beberapa Jbenda nyafca maupun kegiatan; atau suatu kelompok objek yang berkaitan atau bergantung satu sama lain sehingga membentuk suatu kesatuan'. Jadi pada hakekatnya suatu sistem adalah suatu kumpulan atiau organisasi dari benda-benda atau kegiatan yang satu sama- lain smempunyai sifat keterkaitan dan ketergantungan sehingga membentuk suatu benda atau organisasi yang besar.

Suatu benda atau organisasi yang dibentuk oleh suatu sistem akan berada dalam suatu keseimbangan yang mantap. Secara material suatu sistem terbentuk dari kumpulan benda-

benda atau organisasi-organisasi yang lebih kecil yang di dalam kedudukannya pada sistem besar tersebut sebagai 'sub-sistem'. Setiap sub-sistem mungkin saja di dalamnya juga terbentuk dari sub-sub sistem yang lebih kecil lagi. Tetapi tetap sesuai dengan kaidah dasar suatu sistem, maka setiap sub-sistem, atau pun sub-sub sistem akan mempunyai sifat keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain.

Jadi suatu sub sistem ataupun bagian daripadanya (sub sub sistem) yang tidak lagi menganut tata aturan yang berlaku di dalam sistem secara keseluruhan maka akan menjadi unsur tersendiri dan bukan lagi menjadi bagian dari sistem (luar sistem atau beyond the system)

Demikian pula suatu wilayah merupakan suatu dengan kota-kota, desa-desa serta berbagai unsur kegiatan dan perhubungan yang ada di dalamnya sebagai sub-sistemnya. Akan kita tinjau kemudian bahwa apabila kota atau desa dalam system wilayah tersebut dilihat tersendiri, maka juga merupakan sistem dimana berbagai kegiatan kota atau desanya merupakan sub sistem dari suatu sistem. Sebagai suatu contoh berikut ini dapat dilihat suatu kota ditinjau sebagai sub sistem dari Sistem Wilayahnya dan kota itu sendiri sebagai sistem dengan berbagai sub sistemnya.

3.3.2. Unsur Pengendali Sistem Perencanaan

Sistem organisasi dimaksudkan untuk menata organisasi organisasi tersebut agar dapat berjalan secara terkendali dan stabil. Untuk ini maka bagi ITB juga dikenal berbagai peraturan dan ketentuan baik yang berlingkup Nasional seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, atau Keputusan Presiden, yang berlingkup Institut (ITB) seperti peraturan tentang pelaksanaan

Kegiatan Akademik, Peraturan dan Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan (Kokurikuler) atau Peraturan dan Ketentuan yang berlingkup khusus (lokal) di Jurusan yang di berbagai jurusan tidak sama tergantung keadaan dan situasi masing-masing.

Di dalam usaha pengendalian dan kestabilan organisasi baik dalam lingkungan sistem ITB, sub-sistem fakultas maupun sub-sistem jurusan sertasub-sistem-sub-sistem lainnya maka semua sub-sistem ataupun sub-sub-sistem yang ada harus tunduk dan menyesuaikan diri dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam sistem ITB tersebut. Adanya organisasi pengatur dan yang diatur merupakan suatu prinsip organisasi yang umum.

Jadi, setiap sub-sistem ataupun sub-sub-sistem harus menempatkan dirinya dalam kaitan organisatoris terhadap sistem yang berlaku. Apabila suatu atau beberapa sub-sistem atau sub-sistem ditempatkan atau menempatkan dirinya di dalarn sistem yang sudah tidak mungkin lagi untuk menyesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dari system- sistem maka kemudian sub-sistem dan sub-sub-sistem tersebut menjasi sesuatu materi atau organisasi yang berada di luar system atau beyond the sistem.

3.3.3. Proses Perencanaan Sebagai Sistem

Seperti telah dikatakan di atas bahwa di dalalui suatu sistem akan terdapat keterkaitan dan kesalingtergantungan antar sub-sistem. Kejadian ini akan menunjang kekompakan suatu sistem. Oleh karena itu di dalam sistem ITB juga akan terdapat keterkaitan ini yang terjadi misalnya antara fakultas yang satu dengan yang lainnya, antara jurusan yang satu dengan lainnya,

antara jurusan dan himpunan mahasiswa dan lain-lain. Hubungan keterkaitan dan ketergantungan ini tetap berdasarkan kaidah dan keteraturan yang berlaku dari sistem ITB. Dalam hubungan ini maka sistem ITB ataupun sistem yang lebih luas dari ITB dapat menyatakan ketidakberlakuan suatu pola keterkaitan apabila keterkaitan yang terjadi itu dapat menimbulkan gangguan terhadap pengendalian dan kestabilan sistem secara keseluruhan.

Proses Perencanaan sebagai suatu sistem menyangkut kelembagaan pemerintahan (pusat maupun daerah) yang mempunyai kekuatan dan kewenangan di dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kelembagaan swasta dan masyarakat yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut (Herington, 1989).

Dengan demikian maka suatu produk perencanaan dan pengendalian pembangunan pada dasarnya merupakan suatu hasil dari suatu proses yang menyangkut berbagai unsur tersebut. Di dalam proses perencanaan akan terjadi suatu keterkaitan yang kompleks antara peranan perencana yang bekerja untuk pemerintah dengan berbagai unsur yang mempunyai kepentingan dengan pembangunan (misalnya pembangun atau developers) yang sering memiliki keputusan sendiri atau berusaha untuk mempengaruhi pengambilan keputusan - untuk kepentingannya yang sering pula akan bertentangan dengan keputusan yang siambii berdasarkan kebijaksanaan umum yang telah ditentukan.

Proses perencanaan bukan sekedar suatu rangkaian rasional bagaimana suatu keputusan ditentukan tetapi juga bagaimana keputusan perencanaan dihasilkan. Jadi di dalam proses perencanaan ini termasuk suatu kaitan sistem dari

Masyarakat sebagai subyek dan obyek perencanaan pembangunan; Sistem Kelembagaan dan Politik sebagai pengambil keputusan, pelaksana dan pengelola pembangunan; Sektor swasta sebagai penyandang dana dan pembangun; dan unsur fisik sebagai hasil pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3.4. PROSES PERENCANAAN WILAYAH

3.4.1. Arti dan Perkembangan Proses Perencanaan

Proses, dalam perencanaan merupakan sesuatu yang berkesinambungan atau *planning is a continuous process*. Webber (1963) bahkan menyatakan bahwa perencanaan tidak mempunyai awal dan akhir yang definitif. Proses perencanaan akan berlangsung terus menuju ke upaya penyelesaian masalah selanjutnya, sesuai dengan perkembangan permasalahan baru. Proses perencanaan akan selalu tanggap dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat, maupun berbagai sumberdaya yang menunjangnya (Robinson 1968). Dengan demikian suatu proses perencanaan merupakan suatu rangkaian kegiatan berfikir yang berkesinambungan dan rasional, untuk memecahkan suatu permasalahan secara sistematis dan berencana. Proses perencanaan dapat berkembang sesuai dengan kendala dan limitasi yang ada, sehingga rangkaian kegiatan itu dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. (McIlroi, 1970).

Suatu perencanaan merupakan rangkaian proses telah disadari dan dikembangkan. Geddes (seorang pakar biologi) yang pertama kali menyadari pentingnya perencanaan didalam menata permukiman manusia. Pada awalnya diperkenalkan proses perencanaan sebagai suatu rangkaian sederhana yang berupa

penelaahan-ana-Usis atau survey-analysis-plan, yang sering pula dikatakan sebagai classical planning process (Tywhitt, 1956). Rangkaian ini meliputi survei data dan informasi untuk pengolahan dan interpretasi data dan informasi agar menghasilkan landasan-landasan pertimbangan pemecahan, dan pemecahan masalah, serta rencana, yang merupakan sintesa dan hasil analisis tersebut.

Perkembangan yang terjadi dalam kaitannya dengan dinamika masyarakat, dan perubahan berbagai sumberdaya yang menunjang perkembangan masyarakat tersebut, ternyata menimbulkan kesadaran bahwa proses perencanaan tersebut tidaklah sesederhana itu. Produk perencanaan tidaklah merupakan hasil akhir (final plan is not an ultimat product). Dengan kesadaran ini maka rangkaian proses klasik yang sederhana tersebut di atas rupanya sudah tidak berlaku lagi dalam keadaan masyarakat yang dinamis dan perkembangan sumberdaya yang menunjang demikian pesat. Suatu rangkaian yang bersifat daur ulang, kemudian merupakan dasar proses perencanaan saat ini.

Pengertian itulah yang kemudian menjadi landasan dasar pengembangan proses perencanaan selanjutnya. Proses perencanaan pada hakekatnya berdasar kepada rangkaian tertutup ini, kemudian berkembang sesuai dengan lingkup perencanaan, yang dengan sendirinya pula sesuai dengan materi masukan (input), sumber daya dan teknologi yang dipakai di dalam pengembangan proses untuk mencapai tujuan tertentu. Proses tersebut selanjutnya juga tidak hanya menyangkut satu macam kegiatan saja di dalam rangkaian kegiatan perencanaan, tetapi juga akan berkembang mencakup berbagai rangkaian proses, seperti proses teknik penyusunan rencana; proses

legalisasi rencana; proses pengembangan lanjut dari rencana menjadi rencana yang lebih rinci; proses evaluasi alternatifnya; proses pemrograman implementasi; dan proses evaluasi program dan proyek hasil pelaksanaan. Keseluruhan rangkaian proses ini tidak berdiri sendiri, melainkan juga merupakan rangkaian yang berkaitan satu sama lain, sehingga membentuk suatu proses bertahap.

3.4.2. Tahap-tahap Proses dalam Perencanaan Wilayah

Dalam kenyataannya suatu proses perencanaan akan melalui suatu rangkaian yang bertahap. Setiap tahapan akan merupakan suatu proses tertentu pula. Dalam proses perencanaan secara umum dikenal dua jenis proses, konvensional dan inkonvensional, serta proses bertahap.

1) Proses Konvensional dan Inkonvensional

Suatu proses perencanaan dapat ditempuh secara konvensional yaitu suatu rangkaian proses perencanaan yang ideal, yang mana berbagai komponen dan langkah penyusunan rencana dapat dipenuhi secara lengkap dan cermat. Proses perencanaan konvensional biasanya hanya dapat dilakukan dengan dukungan masukan (data dan informasi) yang lengkap serta berbagai preperat, prosedur dan aparat teknis yang lengkap pula. Pada kenyataannya sering sekali dihadapi keadaan di mana sangat sulit untuk dimungkinkan menempuh suatu proses perencanaan yang konvensional. mengingat adanya keterbatasan data, informasi dan berbagai kekurangan ketrampilan aparat serta preperat dan prosedur yang tersedia. Dalam hal ini sangat sering diperlukan suatu proses yang menempuh suatu 'jalan pintas'. Proses perencanaan demikian sering disebut sebagai suatu proses perencanaan inkonvensional. Jadi dalam proses inkonvensional

ini beberapa kegiatan/tahapan dilakukan dengan cara lebih tetapi dengan tetap dilaksanakan secara sistematis.

Evaluasi secara umum suatu proses perencanaan konvensional akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut.:

Langkah 1. Perumusan dan Pendefinisian Masalah Tahap Awal Meliputi:

- a. penelaahan lapangan berdasarkan ruang lingkup yang ditentukan;
- b. penentuan keadaan dan keterbatasan di lapangan;
- c. analisis data;
- d. perbandingan keadaan nyata, proyeksi-proyeksi berdasarkan kendala dan keterbatasan yang ada;
- e. penelitian permasalahan yang dirumuskan dengan mendasarkan kepada hasil analisis;
- f. penyesuaian hasil perumusan masalah dengan fakta yang ada.

Langkah 2. Perumusan dan Penentuan Sistem Perencanaan yang akan Dikembangkan Meliputi:

- a. pertimbangan esensi perencanaan;
- b. pertimbangan sasaran dan tujuan pembangunan;
- c. aparat perencanaan yang ada;
- d. perkiraan sumber daya yang diperlukan bagi proses perencanaan;
- e. persiapan proses teknis perencanaan.

Langkah 3. Pengumpulan Data dan Analisis Perencanaan Mencakup:

- a. peninjauan kembali perumusan masalah yang menjadi landasan perencanaan;
- b. penstrukturan masalah perencanaan;
- c. identifikasi kendala perencanaan;

- d. penentuan kendala pengaruh;
- e. peninjauan studi dan masalah yang berkaitan dengan perencanaan;
- f. operasi pengumpulan data;
- g. analisis data;
- h. penafsiran dan proyeksi; sintesa pennisalahan;
- i. pengembangan pendekatan pemecahan masalah;
- j. kompilasi data dan sistematika hasil analisis.

Langkah 4. Pengembangan Dasar Pertimbangan Perencanaan mencakup:

- a. identifikasi kendala dan Umitas;
- b. identifikasi kemungkinan;
- c. pertimbangan rentang kemungkinan untuk mencapai sasaran dan tujuan rencana;
- d. penyaringan rumusan sasaran dan tujuan.

Langkah 5. Perumusan Norma-norma, Standar Perencanaan:

- a. diskripsi sasaran dan tujuan yang telah disaring;
- b. Penjabaran sasaran dan tujuan ke dalam norma-norma dan standard;
- c. pertimbangan program dan penjelasan perancangan.

Langkah 6. Pengembangan Altematif Rencana:

- a. penentuan dan seleksi prosedur perncanaan;
- b. pengembangan alternatif rencana.

Langkah 7. Uji Coba Alternatif Rencana:

- a. pengumpulan pendapat/input baru;
- b. perbandingan alternatif rencana dengan mempertimbangkan pendapat/input baru;
- c. studi kelayakan alternatif.

Langkah 8. Evaluasi Rencana:

- a. evaluasi terhadap alternatif yang telah distudi keputusan;
- b. rekomendasi alternatif rencana terpilih.

Langkah 9. Penentuan Keputusan:

- a. deskripsi tentang kriteria pengambilan keputusan;
- b. forum pengambilan keputusan;
- c. pemutusan rencana yang akan dipakai.

3.5. TAHAPAN PENYUSUNAN PWT

Pembangunan wilayah terpadu merupakan kebijakan untuk mendorong pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah melalui pendekatan kewilayahan. Kebijakan ini dibutuhkan agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam pemanfaatan sumber daya dan sumber dana pembangunan di daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitan itu, pembangunan wilayah terpadu merupakan upaya nyata agar pemerintah daerah mampu memadukan, menyeraskan dan mengkoordinasikan berbagai input pembangunan baik berupa program sektoral, program pembangunan daerah maupun program-program khusus dengan upaya dan kebijakan pembangunan yang telah disusun pemerintah daerah berdasarkan potensi dan kebutuhan nyata di daerah.

Dengan demikian, kebijakan PWT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menterjemahkan, mengisi

dan mengaplikasikan prinsip-prinsip pemanfaatan ruang secara langsung, nyata dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan dampak positif yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat secara luas, melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Prinsip PWT melalui program kewilayahan meliputi:

1. Merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan daerah;
2. Keterpaduan program, kegiatan, waktu pelaksanaan, lokasi, dan pendanaan pembangunan wilayah antara Pemerintah dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah, berdasarkan kewenangannya;
3. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; dan
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah, serta sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

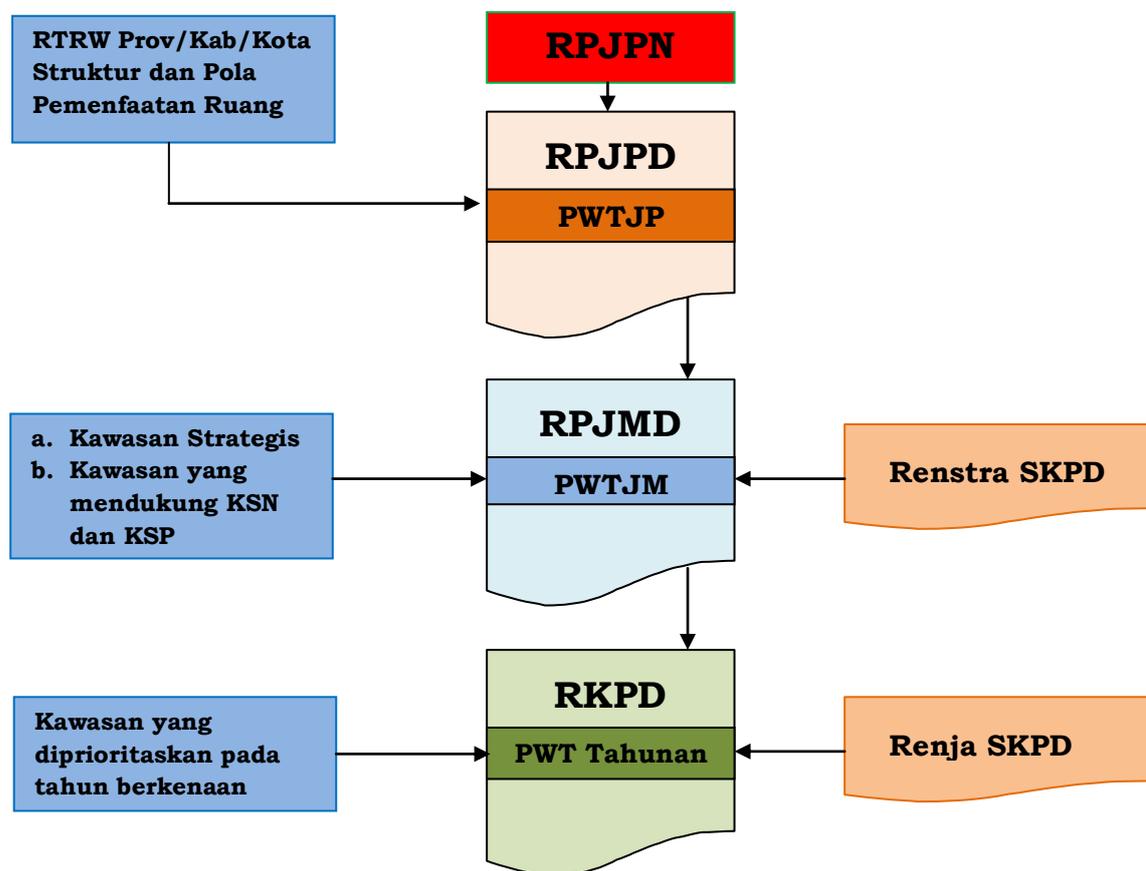
PWT melalui program kewilayahan dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

1. Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
2. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah;
3. Efisien yaitu merupakan pencapaian keluaran tertentu

- dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal;
4. Efektif yaitu merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
 5. Partisipatif yaitu merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah, baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, maupun material, dimana dengan cara ini diharapkan masyarakat mau dan mampu melaksanakan rencana, serta memelihara dan menindaklanjuti hasil-hasil pembangunan; dan
 6. Berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensekaskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Untuk lebih jelasnya, kedudukan pembangunan wilayah terpadu dalam perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar 3.4.

Penyusunan PWT dilaksanakan oleh tim penyusun RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD Kabupaten Kepulauan Yapen yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, meliputi penyusunan agenda kerja, orientasi mengenai PWT, serta penyiapan data dan informasi perencanaan PWT.



Gambar 3.4.

Kedudukan Pembangunan Wilayah Terpadu dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

3.5.1. Penyusunan PWTJP

PWTJP merupakan bagian dari arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu pada RPJPN dan berpedoman pada RTRW provinsi bagi provinsi. Sedangkan bagi kabupaten/kota penyusunan PWTJP mengacu pada RPJPN, memperhatikan RPJP provinsi, dan berpedoman pada RTRW kabupaten/kota.

Arah kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan

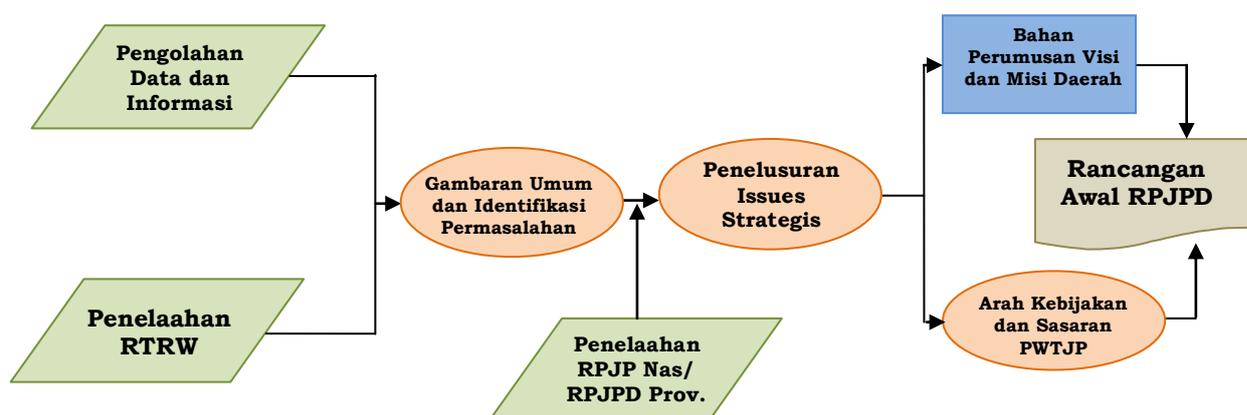
pembangunan wilayah terpadu jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok PWTJP secara bertahap yang tertuang dalam RPJPD.

Sasaran pokok merupakan hal yang penting guna menggambarkan kondisi yang ingin dicapai daerah sesuai dengan visi dan misi pada akhir periode rencana (20 (dua puluh) tahun ke depan), yang ditetapkan secara terukur (kuantitatif).

Penyusunan PWTJP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi permasalahan dan gambaran umum kawasan, dilakukan melalui pengolahan data dan informasi kawasan serta penelaahan RTRW.
- b. Perumusan isu strategis kawasan, dilakukan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan kawasan dan penelaahan arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPN/RPJPD Provinsi.
- c. Perumusan arah kebijakan dan sasaran PWTJP, dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pembangunan wilayah/kawasan dalam RPJPN bagi provinsi dan RPJPD provinsi bagi kabupaten/kota serta mempedomani tujuan, kebijakan, dan strategi pemanfaatan ruang dalam RTRW.

Secara skematis Tahapan dan Tata Cara Penyusunan PWTJP dapat dilihat pada gambar 3.5.

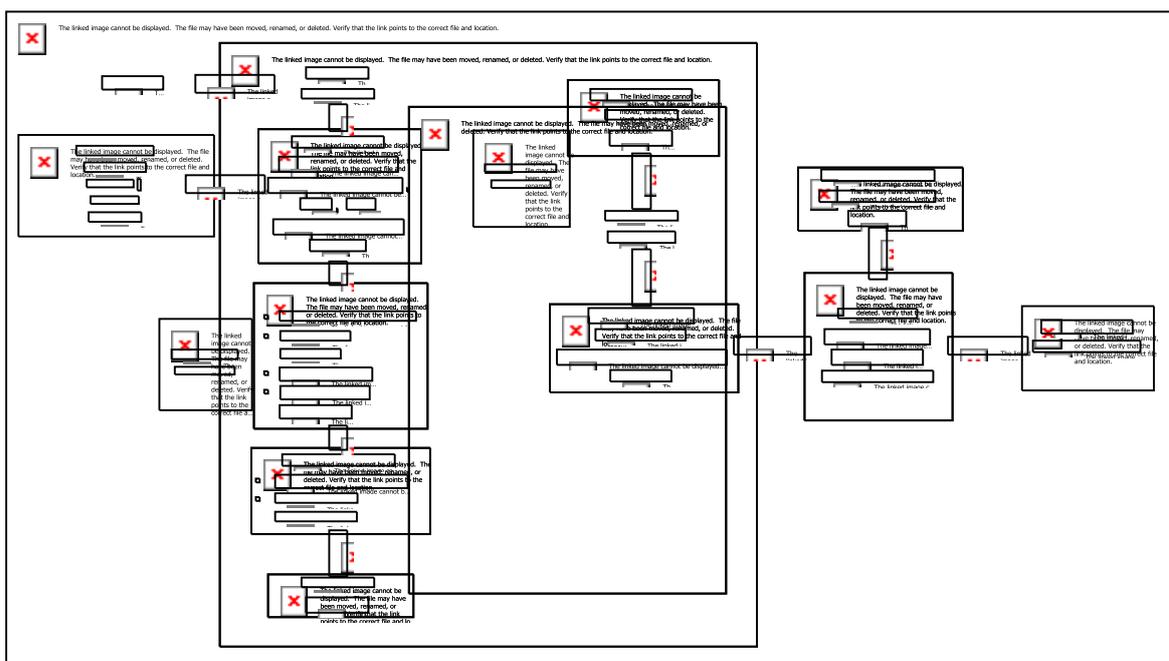


Gambar 3.5.
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan PWTJP

3.5.2. Penyusunan PWTJM

PWTJM merupakan penjabaran arah kebijakan dan sasaran pokok PWTJP selama 5 (lima) tahun dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). PWTJM diprioritaskan pada program-program pembangunan di kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota dan/atau kawasan yang mendukung kawasan strategis nasional/provinsi ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta daya dukung lingkungan hidup.

Secara skematis tahapan dan tata cara penyusunan PWTJM dapat dilihat pada gambar 3.6.



Gambar 3.6.
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan PWTJM

Penyusunan PWTJM dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi kawasan PWT;
- b. Analisis kawasan PWT;
- c. Pembobotan kawasan PWT;
- d. Penentuan prioritas kawasan PWT; dan
- e. Perumusan program dan kerangka pendanaan indikatif PWT.



ANALISIS PEMBANGUNAN KAWASAN TERPADU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

4.1. IDENTIFIKASI KAWASAN PWT

Identifikasi kawasan PWT dilakukan untuk memperoleh keterkaitan kawasan terhadap visi, misi, dan program gubernur/bupati/walikota terpilih, serta selaras dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua.

Adapun cakupan kawasan yang akan diidentifikasi dan sesuai dengan kewenangan daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, diprioritaskan pada:

1. Kawasan strategis Provinsi Papua dan Kabupaten Kepulauan Yapen dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
2. Kawasan strategis Provinsi Papua dan Kabupaten Kepulauan Yapen dari sudut kepentingan sosial budaya.
3. Kawasan strategis Provinsi Papua dan Kabupaten Kepulauan Yapen dari sudut kepentingan pendayagunaan lingkungan hidup.

Langkah-langkah dalam identifikasi kawasan PWT di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebagai berikut; melakukan penelaahan terhadap struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan penelaahan ini menghasilkan jumlah dan fungsi kawasan strategis dan/atau kawasan yang mendukung kawasan strategis provinsi/nasional, serta sektor unggulan dan/atau aspek prioritas pada masing-masing kawasan. Kawasan strategis Kabupaten merupakan kawasan yang diprioritaskan penataan ruangnya, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten maupun wilayah sekitarnya, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan, teknologi tinggi, hankam dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis provinsi lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Penetapan kawasan strategis kabupaten harus memperhatikan kawasan strategis nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang berada di wilayah kabupaten; dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional maupun provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang jelas.

4.1.1. Kawasan Strategis Nasional

Lebih lanjut strategi pengembangan KSN terkait dalam rangka pengembangan perekonomian nasional di dalamnya adalah:

1. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi

- sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan
2. Sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 4. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 5. Mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
 6. Mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
 7. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

Kawasan Strategis Nasional merupakan wilayah penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan yang ada di Kabupaten kepulauan Yapen. Kawasan strategis nasional yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Biak yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

4.1.2. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu daya dukung lingkungan hidup. Adapun kriteria sebagai berikut :

1. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang

- harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
3. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian skala besar;
 4. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 5. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 6. Rawan bencana alam; atau
 7. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kawasan Strategis Provinsi merupakan wilayah penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan yang ada di Kabupaten kepulauan Yapen. Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah kawasan rawan multi bencana yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

4.1.3. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan wilayah penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis kabupaten berfungsi:

1. Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota;
2. Sebagai alokasi ruang untuk berbagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan;
3. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak terakomodasi di dalam rencana struktur dan rencana pola ruang;
4. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten; dan
5. Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan berdasarkan:

1. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Nilai strategi dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
3. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategian nilai ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan;
4. Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten; dan
5. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan dengan kriteria:

1. Memperhatikan factor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
2. Memperhatikan kawasan strategi nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupate;
3. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
4. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:
 - a. Potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - b. Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 - c. Potensi ekspor;
 - d. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - e. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - f. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
 - g. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
 - h. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan

kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.

5. Merupakan kawasan budidaya maupun kawasan lindung yang memiliki nilai strategis sosial budaya di wilayah kabupaten, antara lain kawasan yang merupakan:
 - a. Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - b. Prioritas peningkatan kualitas sosial budaya;
 - c. Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - d. Tempat perlindungan peninggalan budaya;
 - e. Tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
6. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain kawasan yang memiliki:
 - a. Peruntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategi, pengembangan antariksa;
 - b. Sumber daya alam strategis;
 - c. Fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;
 - d. Fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
 - e. Fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
7. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain merupakan:

- a. Tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - b. Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - c. Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - d. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - e. Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - f. Kawasan rawan bencana alam; atau
 - g. Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
8. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan spasial wilayah kabupaten; dan
 9. Untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
 10. Mengikuti ketentuan pemetaan kawasan strategis.

Dengan demikian maka kawasan strategis kabupaten ditetapkan sesuai penjabaran, sebagai berikut:

Kawasan strategis di Kabupaten Kepulauan Yapen dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas:

1. Kawasan Cepat Tumbuh Perkotaan Miosnum di Kepulauan Yerui, Distrik Wonawa.

2. Kawasan Pulau Miobo, di Distrik Rainbawi.
3. Kawasan Kepulauan Ambai, di Distrik Kepulauan Ambai.

Kawasan agropolitan di Kabupaten Kepulauan Yapen terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan agropolitan dan kegiatan minapolitan. Distrik-distrik yang diarahkan untuk kegiatan agropolitan adalah seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen, kecuali Distrik Kepulauan Ambai. Sedangkan distrik-distrik yang diarahkan untuk kegiatan minapolitan seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen, kecuali Distrik Raimbawi (Pulau Miobo). Kawasan ini ditetapkan dengan pertimbangan kawasan tersebut memiliki potensi yang cukup besar di bidang pertanian serta dapat mempengaruhi perkembangan kawasan dan kegiatan lainnya baik di dalam kawasan maupun dalam konteks wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pengembangan kawasan agropolitan tidak terlepas dari struktur dan pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen serta skenario pengembangan wilayah secara umum.

Selanjutnya, upaya-upaya pengelolaan yang dapat dilakukan pada kawasan agropolitan adalah:

1. Pengembangan kegiatan agropolitan meliputi kawasan yang cukup luas dan memiliki sistem pelayanan berjenjang, sehingga dalam kawasan yang termasuk dalam pengembangan agropolitan juga dikembangkan sistem keterkaitan antara pusat maupun sub pusat serta wilayah pendukungnya. Pengembangan struktur maupun sistem pelayanan kegiatan agropolitan dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten.

2. Pengembangan dan penataan ruang kawasan pusat agropolitan beserta kegiatannya dalam rangka menunjang kegiatan agropolitan yang dikembangkan.
3. Pengembangan kawasan agropolitan setidaknya menyangkut pengembangan kegiatan pertanian secara luas, pengembangan agroindustri, agrobisnis dan membuka peluang pengembangan agrowisata.
4. Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang Kawasan agropolitan, diantaranya menyangkut tentang produksi, pemasaran, akses dan pengairan, serta lainnya yang terkait.
5. Pengembangan kawasan agropolitan juga memperhatikan kegiatan dan kawasan lainnya sebagai satu kesatuan dalam pengembangan wilayah kabupaten.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah berupa perkampungan tradisional nelayan yang berada di Kampung Serui Laut dan Kampung Mariadei (Distrik Yapen Selatan), Kampung Ambai (Distrik Kepulauan Ambai), dan Kampung Ansus (Distrik Yapen Barat). Rencana pengembangan pada kawasan ini adalah dengan melakukan pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu perhatian. Selain itu, juga dilakukan atraksi-atraksi budaya yang merupakan kebiasaan dari masyarakat setempat.

Berdasarkan RTBL Kampung Ansus, penataan bangunan dan lingkungan di Ansus dan Wimoni menggunakan pendekatan berupa penataan dengan konsep waterfront. Waterfront diambil

dari istilah bahasa asing yang berarti daerah yang berhadapan dan berbatasan langsung dengan perairan baik sungai, danau, pantai, maupun perairan lainnya. Secara umum pengertian dari waterfront adalah suatu lahan dan merupakan bagian dari kota yang secara fisik maupun visual berbatasan dengan perairan (mencakup segala macam perairan) serta memiliki sifat perkembangan yang dinamis dengan image tersendiri berupa karakter air. Berbicara tentang pengembangan kawasan waterfront, biasanya terkait dengan proses revitalisasi, peremajaan atau revisited kawasan. Karena pada dasarnya upaya menciptakan waterfront tersebut mencakup kegiatan-kegiatan penataan kawasan, yang merupakan wujud dari proses revitalisasi dan peremajaan.

Pendekatan penataan dengan konsep waterfront ingin diterapkan di wilayah perencanaan mengingat beberapa karakter yang dimiliki oleh wilayah perencanaan, di antaranya yaitu:

1. Berlokasi dan berada di tepi suatu wilayah perairan yang besar (laut, danau, sungai, dan sebagainya). Wilayah Ansus dan Wimoni berada di tepi wilayah perairan laut.
2. Memiliki fungsi-fungsi utama sebagai tempat rekreasi, permukiman, industri, atau pelabuhan. Wilayah tepi perairan di Ansus dan Wimoni merupakan pusat dari berbagai aktivitas masyarakat, termasuk permukiman, perdagangan, dan kegiatan transportasi di dermaga.
3. Dominan dengan pemandangan dan orientasi ke arah perairan. Sebagai kawasan yang berada di tepi perairan laut, orientasi perkembangan permukiman dan berbagai fasilitas di Ansus dan Wimoni berorientasi ke arah perairan. Ansus dan Wimoni juga memiliki

pemandangan perairan yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

4. Penurunan kualitas lingkungan di kawasan tepi perairan. Kawasan permukiman di wilayah perairan di Ansus dan Wimoni menunjukkan gejala penurunan kualitas lingkungan. Beberapa ekosistem penting di tepi perairan, seperti ekosistem mangrove, juga terancam oleh kerusakan. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya penataan lingkungan untuk mengembalikan fungsi dan kualitas lingkungan yang telah menurun tersebut.

Dengan melihat kondisi dan karakteristik wilayah yang ada di Ansus dan Wimoni, jenis waterfront yang akan dikembangkan adalah jenis residential waterfront, dimana fungsi utamanya adalah sebagai fasilitas perumahan. Residential waterfront yang akan dikembangkan di Ansus dan Wimoni akan diarahkan lebih kepada perkampungan nelayan. Arah ini terkait dengan mata pencaharian utama masyarakat Ansus dan Wimoni, yaitu sebagai nelayan. Dengan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan permukiman nelayan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman menjadi sehat, nyaman, dan layak huni, sehingga meningkatkan daya tarik kawasan permukiman nelayan tersebut, sehingga dapat ikut mendukung fungsi wisata bahari yang akan dikembangkan.

Konsep waterfront yang akan dikembangkan di wilayah Ansus dan Wimoni nantinya akan membentuk tatanan bangunan dan lingkungan di sekitar kawasan Teluk di Ansus dan Wimoni yang secara umum akan berorientasi ke garis pantai dan jalur sirkulasi. Meskipun penataan bangunan dan lingkungan di Ansus dan Wimoni lebih difokuskan pada pembenahan permukiman

LAPORAN AKHIR

nelayan, akan tetapi berbagai fungsi pendukung kehidupan masyarakat, seperti perdagangan, perkantoran, pendidikan, dsb, tetap akan mendapat porsi pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Ansus dan Wimoni di masa yang akan datang. Berbagai pusat-pusat aktivitas nantinya akan tersebar di sekitar kawasan Teluk di Ansus dan Wimoni. Pusat-pusat aktivitas ini nantinya akan terkoneksi satu sama lain dengan jalur sirkulasi yang akan direncanakan.

Adapun hasil analisis untuk kawasan strategis mapun kawasan pendukung di Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut dapat di sajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Nama, Fungsi, dan Sektor Unggulan Kawasan

No	Nama Kawasan	Fungsi Kawasan	Sektor Unggulan/ AspekPrioritas
1.	Kawasan Strategis Agropolitan dan Minapolitan Kepulauan Yapen	Kawasan ini ditetapkan dengan pertimbangan kawasan tersebut memiliki potensi yang cukup besar di bidang pertanian serta dapat mempengaruhi perkembangan kawasan dan kegiatan lainnya baik di dalam kawasan maupun dalam konteks wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. Distrik yang termasuk dalam kawasan strategis ini untuk kawasan agropolitan adalah seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen, kecuali Distrik Kepulauan Ambai, Sedangkan untuk kawasan minapolitan adalah seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen, kecuali Distrik Raimbawi (Pulau Miobo).	Sektor unggulan pengembangan kawasan sebagai kawasan pertanian, perikanan, ekowisata, budaya dan didorong untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Selain itu pengembangan kegiatan pertanian secara luas, pengembangan agroindustri, agrobisnis dan membuka peluang pengembangan agrowisata. Kabupaten Kepulauan Yapen terutama bidang pertanian secara umum.
2.	Kawasan Strategis Perkampungan Nelayan Tradisional	Fungsi kawasan ini adalah sebagai pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-	Sektor unggulan pada kawasan ini adalah perikanan dengan mengandalkan perikanan laut, adanya kampung budaya dan atraksi budaya, situs purbakala sehingga perlu dilakukan

LAPORAN AKHIR

No	Nama Kawasan	Fungsi Kawasan	Sektor Unggulan/ Aspek Prioritas
		ketentuan yang perlu perhatian. Selain itu, juga dilakukan atraksi-atraksi budaya yang merupakan kebiasaandari masyarakat setempat. Kawasan yang termasuk adalah Kampung SeruiLaut dan Kampung Mariadei (Distrik Yapen Selatan), serta Kampung Ambai (Distrik Kepulauan Ambai).	pelestarian keasliannya.
3.	Kawasan Pendukung <i>Water front</i> Kampung Ansus	Memiliki fungsi utama kawasan sebagai tempat rekreasi, permukiman, industri, atau pelabuhan. Wilayah tepi perairan di Ansus dan Wimoni merupakan pusat dari berbagai aktivitas masyarakat, termasuk permukiman, perdagangan, dan kegiatan transportasi didermaga, yang dominan dengan pemandangan dan orientasi ke arah perairan. Kawasan yang masuk dalam kawasan strategis ini adalah Kampung Ansus dan Wimoni Distrik Yapen Barat yang berada di wilayah tepi perairan.	Sektor unggulan pada kawasan ini merupakan kawasan permukiman, sector perdagangan dan industry yang menopang perekonomian di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

Menguraikan visi, misi, dan program bupati Kabupaten Kepulauan Yapen untuk memperoleh gambaran secara umum dari misi dan program bupati yang terkait dengan pembangunan kewilayahan atau kawasan.

Tabel 4.2. Uraian Visi, Misi, dan Program Bupati Kepulauan Yapen

No	Misi	No	Program Bupati
1.	Memantapkan tata pemerintahan yang baik	1.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
		2.	Program Peningkatan Pelayanan Informasi
		3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		4.	Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan
		5.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
2.	Meningkatkan tata kehidupan	1.	Program Pengembangan Perumahan

LAPORAN AKHIR

No	Misi	No	Program Bupati
	masyarakat yang aman, tertib, dan taat hukum	2.	Program Perencanaan Tata Ruang
		3.	Program Pemanfaatan Ruang
		4.	Program Lingkungan Sehat Perumahan
		5.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
		6.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
		7.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
		8.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		9.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
		3.	Meningkatkan kualitas SDM
2.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan		
3.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		
4.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi		
4.	Meningkatkan pengelolaan SDA secara berkelanjutan	1.	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumberdaya Air Lainnya
		2.	Program Pengendalian Banjir
		3.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
		4.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		5.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
		6.	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup
		7.	Program Peningkatan pengendalian polusi
		8.	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
		9.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		10.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
5.	Menyediakan infrastruktur yang memadai dan merata dengan memperhatikan kerawanan bencana	1.	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
		2.	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
		3.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
		4.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

LAPORAN AKHIR

No	Misi	No	Program Bupati
		5.	Program Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
		6.	Program Pengendalian Kebakaran Hutan
		7.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
6.	Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1.	Program Penciptaan Iklim usaha Kecil Menengah yang Kondusif
		2.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
		3.	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
		4.	Program Pengembangan Nilia Budaya
		5.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
		6.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
		7.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
		8.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
		9.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan tingkat distrik

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

LAPORAN AKHIR

No	Kawasan Strategis/ Kawasan Pendukung	Uraian Kawasan	Keterkaitan dengan Misi						Keterkaitan dengan Program						Besarnya Keterkaitan
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
		<p>Ansus dan Wimoni Distrik Yapen Barat yang berada di wilayah tepi perairan.</p> <p>Sektor unggulan pada kawasan ini merupakan kawasan permukiman, sector perdagangan dan industry yang menopang perekonomian di Kabupaten Kepulauan Yapen.</p>													

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

Tabel 4.4. Hasil Persetujuan Kawasan yang akan Dianalisis

No	Nama Kawasan	UraianKawasan	Keterangan
1.	Kawasan Strategis Agropolitan dan Minapolitan Kepulauan Yapen	<p>Kawasan ini ditetapkan dengan pertimbangan kawasan tersebut memiliki potensi yang cukup besar di bidang pertanian serta dapat mempengaruhi perkembangan kawasan dan kegiatan lainnya baik di dalam kawasan maupun dalam konteks wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. Distrik yang termasuk dalam kawasan strategis ini untuk kawasan agropolitan adalah seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen, kecuali Distrik Kepulauan Ambai. Sedangkan untuk kawasan minapolitan adalah seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen, kecuali Distrik Raimbawi (Pulau Miobo).</p> <p>Sektor unggulan pengembangan kawasan sebagai kawasan pertanian, perikanan, ekowisata, budaya dan didorong untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah. Selain itu pengembangan kegiatan pertanian secara luas, pengembangan agroindustri, agrobisnis dan membuka peluang pengembangan agrowisata. Kabupaten Kepulauan Yapen terutama bidang pertanian secara umum.</p>	<p>Untuk melaksanakan penataan kawasan strategis agropolitan dan minapolitan ini diperlukan sinergitas keenam misi Kabupaten Kepulauan Yapen dengan melaksakan beberapa program pokok yang telah tertuang dalam perencanaan-perencanaan sebelumnya. Misi utama yang sangat diperlukan dalam pengembangan kawasan strategis agropolitan dan minapolitan ini adalah peningkatan taraf hidup masyarakat, pengoptimalisasi SDA dan penguatan SDMnya.</p>
2.	Kawasan Strategis Perkampungan Nelayan Tradisional	<p>Fungsi kawasan ini adalah sebagai pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan. Selain itu, juga dilakukan atraksi-atraksi budaya yang merupakan kebiasaan dari masyarakat setempat. Kawasan yang termasuk adalah Kampung Serui Laut dan Kampung Mariadei (Distrik Yapen Selatan), serta Kampung Ambai (Distrik Kepulauan Ambai).</p> <p>Sektor unggulan pada kawasan ini adalah perikanan dengan mengandalkan perikanan laut, adanya kampung budaya dan atraksi budaya, situs purbakala sehingga perlu dilakukan</p>	<p>Pelaksanaan kawasan strategis perkampungan nelayan tradisional hanya menerapkan lima misi dari bupati dan beberapa program yang diterapkan untuk dapat mencapai dari tujuan pembangunan perkampungan nelayan tradisional. Pengembangan sector unggulan pada kawasan ini lebih difokuskan pada perikanan tangkap dan keasrian perkampungan yang dipadu dengan system pariwisata.</p>

LAPORAN AKHIR

		pelestarian keasliannya.	
3.	Kawasan Pendukung Waterfront Kampung Ansus	<p>Memiliki fungsi utama kawasan sebagai tempat rekreasi, permukiman, industri, atau pelabuhan. Wilayah tepi perairan di Ansus dan Wimoni merupakan pusat dari berbagai aktivitas masyarakat, termasuk permukiman, perdagangan, dan kegiatan transportasi di dermaga, yang dominan dengan pemandangan dan orientasi ke arah perairan. Kawasan yang masuk dalam kawasan strategis ini adalah Kampung Ansus dan Wimoni Distrik Yapen Barat yang berada di wilayah tepi perairan.</p> <p>Sektor unggulan pada kawasan ini merupakan kawasan permukiman, sektor perdagangan dan industri yang menopang perekonomian di Kabupaten Kepulauan Yapen.</p>	<p>Konsep waterfront yang akan dikembangkan di wilayah Ansus dan Wimoni nantinya akan membentuk tatanan bangunan dan lingkungan di sekitar kawasan Teluk di Ansus dan Wimoni yang secara umum akan berorientasi ke garis pantai dan jalur sirkulasi. Pada penataan kawasan ini misi yang digunakan hanya lima misi, sedangkan program yang diadopsi nantinya digunakan sebagai realisasi pelaksanaan pembangunan kawasan.</p>

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

4.2. ANALISIS KAWASAN PWT

Analisis kawasan PWT dilakukan untuk mengetahui kondisi kawasan secara umum yang antara lain mencakup potensi dan permasalahan pada masing-masing kawasan yang telah disetujui oleh bupati. Hasil analisis ini akan digunakan untuk merumuskan strategi dan kebijakan serta program indikatif PWT pada kawasan.

Analisis pada masing-masing kawasan dilakukan melalui tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

Analisis gambaran umum, memberikan pemahaman awal bagi tim tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan kawasan yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan kawasan dalam pencapaian target sesuai program bupati Kabupaten Kepulauan Yapen.

LAPORAN AKHIR

Gambaran umum kondisi kawasan memberikan basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi berdasarkan karakteristik kawasan.

Mengingat perbedaan karakteristik dari masing-masing kawasan, maka dalam menganalisis gambaran umum kondisi kawasan, harus disesuaikan dengan fungsi kawasan, struktur kewenangan tingkatan pemerintahan antara provinsi dan kabupaten/kota. Adapun analisis gambaran umum kawasan sekurang-kurangnya meliputi materi sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.5. Gambaran Umum Kawasan PWT

No.	Kelompok Analisis	Deskripsi Analisis	Keterangan
1.	Karakteristik Fisik Kawasan (diterapkan pada semua kawasan strategis maupun kawasan pendukung yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan)	<ul style="list-style-type: none">- Batas fungsional kawasan.- Tipologi kawasan, antara lain meliputi: pedalaman, terpencil, pesisir, pegunungan, dan kepulauan.- Topografi, antara lain terdiri dari kemiringan lahan, dan ketinggian lahan.- Geologi, antara lain terdiri dari struktur dan karakteristik batuan.- Hidrologi, antara lain terdiri dari daerah aliran sungai, sungai, danau, dan rawa.- Penggunaan lahan eksisting pada kawasan, antara lain terdiri dari kawasan budidaya, dan kawasan lindung.	Sumber data a.l.: RTRW, Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam Angka, Potensi Desa, Rancangan awal RPJMD, dll.
2.	Karakteristik Demografi Kawasan (diterapkan pada semua kawasan strategis maupun kawasan pendukung yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan)	<ul style="list-style-type: none">- Deskripsi tentang jumlah, distribusi, dan perkembangan penduduk di kawasan termasuk usia angkatan kerja.- Deskripsi tentang distribusi tingkat pendidikan, mata pencaharian, agama dan etnis penduduk di kawasan.	
3.	Potensi Pengembangan Kawasan (diterapkan pada kawasan strategis maupun kawasan pendukung yang berkaitan dengan aspek ekonomi)	<ul style="list-style-type: none">- Deskripsi tentang potensi unggulan yang akan dikembangkan pada kawasan, antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata,	

LAPORAN AKHIR

No.	Kelompok Analisis	Deskripsi Analisis	Keterangan
		pertambangan, perdagangan dan jasa, dan lain- lain.	
4.	Kawasan Rawan Bencana(diterapkan pada kawasan strategis maupun kawasan pendukung yang berkaitan dengan aspek lingkungan)	- Bagian dari kawasan yang berpotensi rawan bencana alam seperti banjir, longsor, abrasi, tsunami, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik, dan lain-lain.	
5.	Karakteristik Budaya(diterapkan pada semua kawasan strategis maupun kawasan pendukung yang berkaitan dengan aspek sosial budaya)	- Deskripsi tentang perlindungan warisan budaya, obyek budaya, adat istiadat, dan tradisi kebudayaan.	

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

LAPORAN AKHIR

Tabel 4.6. Hasil Analisis Gambaran Umum Kawasan Strategis Agropolitan dan Minapolitan Kepulauan Yapen

No.	Kelompok Analisis	Capaian Target Analisis (5 tahun kedepan)	Program Bupati	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai(=) Melampaui (>)
1.	Secara topografi, sebagian wilayah kawasan ini berbukit namun ada sebagian kecil wilayah dengan kondisi datar dan landai dengan tingkat kemiringan lahan sangat bervariasi mulai dari yang datar, bergelombang hingga pada berbukit.	Pemanfaatan lahan secara maksimal dengan memanfaatkan potensi dari karakter lahan, seperti; topografi, kemiringan, ketersediaan air, struktur tanah, dan kontur lahan. Sehingga dalam pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan sebagai kawasan strategis di Kabupaten Kepulauan Yapen ke depan dapat terbantu dan tertata	<ul style="list-style-type: none"> - Program Perencanaan Tata Ruang - Program Pemanfaatan Ruang - Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumberdaya Air Lainnya - Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam - Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 	Interpretasi kawasan sudah sesuai
2.	Sebagian besar wilayah distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen masuk dalam kawasan agropolitan dan minapolitan ini, sehingga lebih dari 80% penduduk juga berada dalam kawasan strategis ini.	Karena kegiatan agropolitan dan minapolitan meliputi kawasan yang cukup luas dan memiliki sistem pelayanan berjenjang, sehingga dalam kawasan yang termasuk dalam pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Program - Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup - Program Pembangunan Infrastruktur 	Interpretasi kawasan belum tercapai

LAPORAN AKHIR

No.	Kelompok Analisis	Capaian Target Analisis (5 tahun kedepan)	Program Bupati	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		agropolitan dan minapolitan juga dikembangkan sistem keterkaitan antara pusat maupun sub pusat serta wilayah pendukungnya. Pengembangan struktur maupun sistem pelayanan kegiatan agropolitan dan minapolitan dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten.	Perdesaaan	
3.	Komoditas potensial dalam kawasan ini adalah pertanian, perikanan, ekowisata, budaya dan didorong untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah. Pengembangan kegiatan pertanian secara luas, pengembangan agroindustri, agrobisnis dan membuka peluang pengembangan agrowisata.	Beberapa komoditas potensial pertanian dan perikanan di harapkan mampu menjadi sebuah industry sebagai agroindustry yang berkembang di kawasan tersebut sehingga mampu mejadi penopang kebutuhan di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk beberapa komoditas pertanian maupun perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> - Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) - Program Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan 	Interpretasi kawasan sudah sesuai

LAPORAN AKHIR

No.	Kelompok Analisis	Capaian Target Analisis (5 tahun kedepan)	Program Bupati	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
4.	Bagian dari kawasan yang berpotensi rawan bencana alam seperti banjir, longsor, abrasi, tsunami, gempa tektonik dan vulkanik, dan lain-lain.	Mitigasi bencana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam perencanaan kawasan. Kedepan dalam pengembangan kawasan strategis diperlukan pendekatan mitigasi bencana baik bencana gempa bumi, tanah longsor, maupun tsunami.	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa - Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi 	Interpretasi kawasan belum tercapai
5.	Aspek budaya pada kawasan strategis agropolitan dan minapolitan ini didukung dengan adanya berbagai macam budaya lokal masyarakat, berupa tarian, rumah adat dan lain sebagainya.	Selain sebagai kawasan strategis agropolitan dan minapolitan di Kabupaten Kepulauan Yapen, pengembangan diarahkan pada pengembangan ekowisata yang berbasis pada budaya lokal masyarakat berupa tarian, rumah adat dan budaya-budaya lain yang tidak ada di wilayah lain.	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Program Pembinaan dan Pemberdayaan tingkat distrik - Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah 	Interpretasi kawasan sudah sesuai

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

Tabel 4.7. Hasil Analisis Gambaran Umum Kawasan Strategis Perkampungan Nelayan Tradisional

LAPORAN AKHIR

No.	Kelompok Analisis	Capaian Target Analisis (5 tahun kedepan)	Program Bupati	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
1.	Secara topografi, wilayah kawasan ini berada di pesisir pantai, dengan kondisi topografi yang cukup rata/datar.	Perkampungan nelayan di kawasan pesisir pantai dalam penataan kedepan agar sesuai dengan kaidah tataruang untuk pembangunan bangunan permanen perlu dijaga dan disesuaikan dengan jarak sepadan pantai, sedangkan untuk wilayah yang masuk sepadan pantai bisa dibangun dengan bangunan tidak permanen.	- Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Interpretasi kawasan sudah sesuai
2.	Kawasan strategis kampung nelayan terdiri dari Kampung SeruiLaut dan Kampung Mariadei (Distrik Yapen Selatan), serta Kampung Ambai (Distrik Kepulauan Ambai). Secara ekonomi kawasan ini cukup berkembang dengan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, aspek budaya masih cukup terjaga dengan baik terutama adat dan tradisi yang selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan permasalahan lingkungan yang dilakukan oleh	Secara umum capaian target yang diharapkan adalah pada peningkatan ekonomi dengan terbentuknya system jaringan ekonomi dan kelembagaan kelompok nelayan. Terlepas dari ekonomi, penyelesaian masalah lingkungan adalah melakukan pengelolaan dan pengolahan sampah serta perencanaan system	- Program Pengembangan Perumahan - Program Perencanaan Tata Ruang - Program Lingkungan Sehat Perumahan - Program Peningkatan pengendalian polusi	Interpretasi kawasan belum tercapai

LAPORAN AKHIR

No.	Kelompok Analisis	Capaian Target Analisis (5 tahun kedepan)	Program Bupati	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
	nelayan di kawasan ini terkait dengan kebersihan dan limbah yang dihasilkan.	jaringan limbah jangan sampai menimbulkan pencemaran dikawasan strategis perkampung nelayan.		
3.	Melihat aspek komoditas potensial dalam kawasan ini adalah perikanan tangkap yang menjadi sumber utama masyarakat pesisir pantai. Selain itu pengembangan pariwisata dikawasan ini menjadi salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Dengan pemandangan dan panorama pantai yang cukup menawan dan indah bias dijadikan sebagai salah satu produk yang mempunyai nilai jual dan ekonomis tinggi.	Capaian target pada kawasan ini dengan komoditas utama perikanan tangkap ke depan dapat menjadi penopang sumber penghasilan ikan baik untuk konsumsi lokal maupun pada sector pemasaran keluar wilayah. Dari sector pariwisata capaian target kedepan bias manjadi salah satu destinasi unggulan wisata bahari di Kabupaten Kepulauan Yapen.	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan - Program Pembinaan dan Pemberdayaan tingkat distrik 	Interpretasi kawasan belum tercapai
4.	Bagian kawasan strategis perkampungan nelayan di Kabupaten Kepulauan Yapen berpotensi rawan bencana alam abrasi, tsunami, serta gempa tektonik.	Pencapaian target dalam meminimalisir terjadinya bencana alam perlu dilakukan pencegahan berupa pelatihan mitigasi bencana dan pemasangan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengendalian Banjir - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 	Interpretasi kawasan belum tercapai

LAPORAN AKHIR

No.	Kelompok Analisis	Capaian Target Analisis (5 tahun kedepan)	Program Bupati	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		pemantau terjadinya tsunami. Selain itu kedepan dalam pengembangan kawasan strategis ini diperlukan penataan kawasan yang berbasis pada mitigasi bencana baik tsunami, longsor, gempa bumi dan bencana-bencana lain.		
5.	Aspek budaya pada kawasan strategis perkampungan nelayan tradisional ini telah didukung dengan adanya berbagai macam budaya dan adat istiadat masyarakat Kampung SeruiLaut dan Kampung Mariadei (Distrik Yapen Selatan), serta Kampung Ambai (Distrik Kepulauan Ambai) Kabupaten Kepulauan Yapen.	Pencapaian target kedepan di kawasan strategis perkampungan nelayan Kampung SeruiLaut dan Kampung Mariadei (Distrik Yapen Selatan), serta Kampung Ambai (Distrik Kepulauan Ambai) Kabupaten Kepulauan Yapen diarahkan pada pengembangan wisata bahari berbasis pada budaya lokal masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan - Program Pengembangan Nilai Budaya - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 	Interpretasi kawasan sudah sesuai

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

Tabel 4.8. Hasil Analisis Gambaran Umum Kawasan Pendukung *Waterfront* Kampung Ansus Kepulauan Yapen

LAPORAN AKHIR

No.	Kelompok Analisis	Capaian Target Analisis (5 tahun kedepan)	Program Bupati	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
1.	Secara topografi, wilayah kawasan pendukung waterfront ini dibentuk dengan tatanan bangunan dan lingkungan di sekitar kawasan Teluk di Ansus dan Wimoni yang secara umum akan berorientasi ke garis pantai dan jalur sirkulasi, dengan kondisi topografi yang datar pada garis pantai dan agak sedikit berbukit.	Capaian target kawasan pendukung ini tidak hanya sebagai permukiman nelayan, akan tetapi berbagai fungsi pendukung kehidupan masyarakat, seperti perdagangan, perkantoran, pendidikan, industri, pusat rekreasi dan wisata serta pelabuhan, tetap akan mendapat porsi pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Ansus dan Wimoni di masa yang akan datang. Berbagai pusat-pusat aktivitas nantinya akan tersebar di sekitar kawasan Teluk di Ansus dan Wimoni. Pusat-pusat aktivitas ini nantinya akan terkoneksi satu sama lain dengan jalur sirkulasi yang akan direncanakan.	<ul style="list-style-type: none"> - Program Perencanaan Tata Ruang - Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumberdaya Air Lainnya 	Interpretasi kawasan sudah sesuai

LAPORAN AKHIR

No.	Kelompok Analisis	Capaian Target Analisis (5 tahun kedepan)	Program Bupati	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
2.	<p>Analisis kawasan waterfront kampung Ansus dan Wimoni sudah cukup berkembang dengan, matapencaharian sebagian penduduk disektor formal, pekerja industry, serta sebagai nelayan. Sehingga secara aspek ekonomi dan social pada kawasan ini pergerakan barang dan jasa sebagai penopang penduduk kampung Ansus dan Wimoni. Berkembangnya kawasan ini perlu diwaspadai timbulnya permasalahan lingkungan terkait dengan kebersihan dan limbah yang dihasilkan.</p>	<p>Capaian target ke depan secara ekonomi penataan kawasan pada aspek perdagangan perlu ditata dan dikelola secara terpadu. Selain itu diperlukan sistem pengelolaan dan pengolahan sampah serta perencanaan system jaringan limbah sehingga dalam kurun waktu kedepan tidak akan menimbulkan pencemaran dikawasan waterfront Ansus Kepulauan Yapen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Program Lingkungan Sehat Perumahan - Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 	<p>Interpretasi kawasan belum tercapai</p>
3.	<p>Aspek komoditas potensial dalam kawasan ini lebih ditekankan pada sector industry baik rumah tangga maupun industry skala pabrik, sector barang dan jasa, serta sector industry pariwisata.</p>	<p>Pencapaian target pada kawasan waterfront Kampung Ansus kedepan dapat dijadikan sebagai salah satu pusat industry, barang, jasa dan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Yapen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Program Fasilitasi Peningkatan SDMBidang Informasi dan Komunikasi - Program Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 	<p>Interpretasi kawasan sudah sesuai</p>
4.	<p>Kawasan Pendukung Waterfront Kampung Ansus Kepulauan Yapen</p>	<p>Pencapaian target dalam meminimalisir terjadinya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 	<p>Interpretasi kawasan belum tercapai</p>

LAPORAN AKHIR

No.	Kelompok Analisis	Capaian Target Analisis (5 tahun kedepan)	Program Bupati	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
	berpotensi rawan bencana alam abrasi, tsunami, longsor dan gempa tektonik.	bencana alam pada kawasan pengembangan ini, konsep mitigasi bencana diperlukan sejak awal penataan kawasan, sehingga kedepan kesadaran akan ancaman bahaya seperti abrasi, tsunami, longsor dan gempa tektonik dapat diminimalisir.	- Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	
5.	Aspek budaya lokal pada kawasan masih ada di beberapa wilayah, namun seiring perkembangan dari fungsi kawasan dikawatirkan akan terjadi pergeseran budaya menjadi lebih modern.	Target pencapaian di kawasan Pendukung Waterfront Kampung Ansum Kepulauan Yapen Untuk mengatasi pergeseran budaya tersebut diperlukan pengemasan budaya-budaya lokal dalam konsep pengembangan pariwisata agar budaya lokal di masyarakat tidak hilang dan masih bisa dipertahankan.	- Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Interpretasi kawasan belum tercapai

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

Selanjutnya analisis rumusan masalah, menguraikan tentang berbagai faktor kendala dalam pembangunan kawasan. Permasalahan pembangunan kawasan merupakan kesenjangan harapan (*gap expectation*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan kawasan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari analisis rumusan permasalahan pembangunan kawasan adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan kawasan sebelumnya. Analisis rumusan permasalahan pembangunan kawasan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kawasan.

Analisis isu-isu strategis, merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan kawasan sebagai kelanjutan dari analisis-analisis yang telah dilakukan sebelumnya.

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya terhadap pengembangan kawasan dan kesejahteraan masyarakat. Analisis isu-isu strategis dilakukan dengan identifikasi kepentingan yang berdasarkan hasil analisis permasalahan dan potensi kawasan.

Tabel 4.9. Analisis Rumusan Permasalahan Pembangunan Kawasan Strategis Agropolitan dan Minapolitan Kepulauan Yapen

- Program :
- Program Perencanaan Tata Ruang
 - Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumberdaya Air Lainnya
 - Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
 - Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 - Program Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
 - Program Pembinaan dan Pemberdayaan tingkat distrik
 - Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

Target Capaian : Terbangunnya kawasan strategis dengan komoditas potensial pertanian dan perikanan di harapkan mampu menjadi kawasan agroindustry yang mampu menopang kebutuhan pangan, pertanian maupun perikanan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Selain itu depan dalam penataan pengembangan kawasan diperlukan pendekatan mitigasi bencana dan tetap menjaga adat istiadat dan budaya lokal masyarakat.

No	Deskripsi Rumusan Permasalahan	
a.	Kawasan Strategis	Kawasan Strategis Agropolitan dan Minapolitan Kepulauan Yapen
b.	Sektor Unggulan/Aspek Prioritas	Sektor unggulan dalam kawasan ini adalah pertanian, perikanan, ekowisata, dan budaya lokal.
c.	Permasalahan pada saat perencanaan terhadap potensi kawasan	Permasalahan pengembangan kawasan strategis agropolitan dan minapolitan antara lain; pada cakupan kawasan yang cukup luas yaitu hamper 80% dari wilayah Kepulauan Yapen, kawasan tersebar di beberapa wilayah, aksesibilitas jangkauan yang tidak menyatu dalam satu kluster, aspek topografi yang berbukit-bukit, serta permasalahan pada ancaman bencana alam di masing-masing kawasan.

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

Tabel 4.10. Analisis Rumusan Permasalahan Pembangunan Kawasan Strategis Perkampungan Nelayan Tradisional

Program : - Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - Program Pengembangan Perumahan
 - Program Perencanaan Tata Ruang
 - Program Lingkungan Sehat Perumahan
 - Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
 - Program Pembinaan dan Pemberdayaan tingkat distrik
 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
 - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
 - Program Pengembangan Nilai Budaya
 - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Target Capaian : Peningkatan ekonomi dengan terbentuknya system jaringan ekonomi dan kelembagaan kelompok nelayan dengan komoditas utama perikanan tangkap, sehingga ke depan dapat menjadi penopang sumber penghasilan ikan baik untuk konsumsi lokal maupun pada sektor pemasaran keluar wilayah. Sedangkan dari sektor pariwisata capaian target kedepan bisa menjadi salah satu destinasi unggulan wisata bahari. Penataan kawasan strategis ini harus berbasis pada mitigasi bencana sertadidasarkan pada konsep lingkungan untuk mengurangi dan meminimalisir pencemaran limbah dan sampah dikawasan strategis perkampung neleyan.

No	Deskripsi Rumusan Permasalahan	
a.	Kawasan Strategis	Kawasan Strategis Perkampungan Nelayan Tradisional
b.	Sektor Unggulan/Aspek Prioritas	Sektor unggulan dalam kawasan ini adalah perikanan tangkap dan pariwisata berbasis alam dan budaya lokal.
c.	Permasalahan pada saat perencanaan terhadap potensi kawasan	Permasalahan pengembangan kawasan perkampungan nelayan tradisional antara lain; penataan bangunan permanen yang harus memenuhi kaidah batas tepian pantai, dalam perencanaan aspek budaya lokal dan adat istiadat perlu dijaga kelestariannya, system pengelolaan lingkungan yang disebabkan karena limbah rumah tangga, serta ancaman bencana tsunami karena berada di kawasan pantai.

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

Tabel 4.11. Analisis Rumusan Permasalahan Pembangunan Kawasan Pendukung Waterfront Kampung Ansus Kepulauan Yapen

- Program :
- Program Perencanaan Tata Ruang
 - Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumberdaya Air Lainnya
 - Program Lingkungan Sehat Perumahan
 - Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi
 - Program Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
 - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
 - Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
 - Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
 - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Target Capaian : Target kawasan pendukung ini sebagai kawasan permukiman yang terintegrasi sebagai pusat kota, kawasan industry, pusat rekreasi, destinasi wisata dan pelabuhan. Secara ekonomi capaian target kawasan pendukung ini sebagai pusat perdagangan dan dikelola secara terpadu. Pada penataan kawasan kedepan berbasis pada mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan untuk pengelolaan limbah dan persampah dikawasan pendukung ini.

No	Deskripsi Rumusan Permasalahan	
a.	Kawasan Strategis	Kawasan Pembangunan Kawasan Pendukung Waterfront Kampung Ansus Kepulauan Yapen
b.	Sektor Unggulan/Aspek Prioritas	Sektor unggulan dalam kawasan ini adalah industri dan pariwisata.
c.	Permasalahan pada saat perencanaan terhadap potensi kawasan	Permasalahan pengembangan kawasan Waterfront Kampung Ansus antara lain; penataan bangunan memerlukan perencanaan khusus karena berorientasi ke garis pantai dan jalur sirkulasi, ekosistem di tepi perairan (ekosistem mangrove)terancam kerusakannya, pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas rumah tangga dan industry, kawasan yang berada di tepi perairan laut maka ancaman utama adalah bencana tsunami.

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

Berdasarkan hasil identifikasi selanjutnya dilakukan penguraian isu strategis yang secara umum menjelaskan kondisi yang harus diperhatikan karena dampaknya yang sangat signifikan terhadap pembangunan kawasan.

Perumusan isu strategis sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah;
- b. Mendukung prioritas pembangunan nasional;
- c. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap kawasan dan masyarakat;
- d. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan kawasan; dan
- e. Kemudahan untuk dikelola.

LAPORAN AKHIR

Tabel 4.12. Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis Pengembangan Kawasan Kawasan Strategis Agropolitan dan Minapolitan Kepulauan Yapen

No	Permasalahan/Potensi Pembangunan Kawasan Strategis	Kriteria				
		Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional	Memiliki Pengaruh Yang Besar/Signifikan Terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah	Memberikan Dampak Positif Terhadap Kawasan dan Masyarakat	Memiliki Daya Ungkit Yang Signifikan Terhadap Pembangunan Kawasan	Kemudahan Untuk Dikelola
1.	Cakupan kawasan yang cukup luas yaitu hampir 80% dari wilayah Kepulauan Yapen.	√	√	√	√	
2.	Kawasan tersebar di beberapa wilayah.	√	√	√	√	
3.	Akseibilitas jangkauan yang tidak menyatu dalam satu kluster.	√	√	√	√	
4.	Aspek topografi yang berbukit-bukit.	√	√	√		
5.	Ancaman bencana alam di masing-masing kawasan.	√	√	√	√	√

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

LAPORAN AKHIR

Tabel 4.13. Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis Pengembangan Kawasan Kawasan Strategis Perkampungan Nelayan Tradisional Kepulauan Yapen

No	Permasalahan/Potensi Pembangunan Kawasan Strategis	Kriteria				
		Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional	Memiliki Pengaruh Yang Besar/Signifikan Terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah	Memberikan Dampak Positif Terhadap Kawasan dan Masyarakat	Memiliki Daya Ungkit Yang Signifikan Terhadap Pembangunan Kawasan	Kemudahan Untuk Dikelola
1.	Penataan bangunan permanen yang harus memenuhi kaidah batas tepian pantai.	√		√		√
2.	Perencanaan aspek budaya lokal dan adat istiadat perlu dijaga kelestariannya.	√	√	√	√	√
3.	System pengelolaan lingkungan yang disebabkan karena limbah rumah tangga.	√	√	√		√
4.	Ancaman bencana tsunami karena berada di kawasan pantai.	√	√	√	√	√

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

LAPORAN AKHIR

Tabel 4.14. Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis Pengembangan Kawasan Kawasan Strategis Perkampungan Nelayan Tradisional Kepulauan Yapen

No	Permasalahan/Potensi Pembangunan Kawasan Strategis	Kriteria				
		Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional	Memiliki Pengaruh Yang Besar/Signifikan Terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah	Memberikan Dampak Positif Terhadap Kawasan dan Masyarakat	Memiliki Daya Ungkit Yang Signifikan Terhadap Pembangunan Kawasan	Kemudahan Untuk Dikelola
1.	Penataan bangunan memerlukan perencanaan khusus karena berorientasi ke garis pantai dan jalur sirkulasi.	√	√	√		√
2.	Ekosistem di tepi perairan (ekosistem mangrove) terancam kerusakannya.	√		√	√	√
3.	Pencemaran dilingkungan yang disebabkan oleh aktifitas rumah tangga dan industry.	√	√	√		√
4.	Kawasan yang berada di tepi perairan laut maka ancaman utama adalah bencana tsunami.	√	√	√	√	√

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

Tabel 4.15. Perumusan Isu-Isu Strategis Pembangunan Kawasan Kabupaten Kepulauan Yapen

No.	Nama Kawasan	Permasalahan/Potensi Pembangunan Kawasan	Uraian Isu Strategis
1.	Kawasan Strategis Agropolitan dan Minapolitan Kepulauan Yapen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan kawasan yang cukup luas yaitu hampir 80% dari wilayah Kepulauan Yapen. 2. Kawasan tersebar di beberapa wilayah. 3. Aksesibilitas jangkauan yang tidak menyatu dalam satu kluster. 4. Aspek topografi yang berbukit-bukit. 5. Ancaman bencana alam di masing-masing kawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya isolasi dan kesenjangan yang tajam antar wilayah/kawasan yang cukup jauh. 2. Keterbatasan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi. 3. Hambatan budaya yang dalam batas-batas tertentu tidak kondusif bagi berlangsungnya persaingan yang sehat demi mencapai kemajuan yang lebih baik. 4. Rendahnya pendapatan yang diakibatkan oleh terbatasnya produksi dan sangat kurangnya penduduk terlibat dalam ekonomi pasar/uang. 5. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 6. Belum terbukanya aksesibilitas infrastruktur dasar secara memadai dan merata. 7. Potensi sumberdaya alam yang berlimpah. 8. Produktivitas sektor pertanian belum optimal yang salah satunya disebabkan keterbatasan sarana pengairan.
2.	Kawasan Strategis Perkampungan Nelayan Tradisional Kepulauan Yapen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan bangunan permanen yang harus memenuhi kaidah batas tepian pantai. 2. Perencanaan aspek budaya lokal dan adat istiadat perlu dijaga kelestariannya. 3. System pengelolaan lingkungan yang disebabkan karena limbah rumah tangga. 4. Ancaman bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang optimalnya pengelolaan komoditas kelautan, perikanan, dan pariwisata. 2. Rendahnya sumberdaya manusia dalam pengelolaan kawasan. 3. Rendahnya pendapatan yang diakibatkan oleh terbatasnya produksi dan sangat kurangnya penduduk terlibat dalam ekonomi pasar/uang.

LAPORAN AKHIR

No.	Nama Kawasan	Permasalahan/Potensi Pembangunan Kawasan	Uraian Isu Strategis
		tsunami karena berada di kawasan pantai.	4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 5. Potensi sumberdaya alam yang berlimpah.
3.	Kawasan Pembangunan Kawasan Pendukung Waterfront Kampung Ansus Kepulauan Yapen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan bangunan memerlukan perencanaan khusus karena berorientasi ke garis pantai dan jalur sirkulasi. 2. Ekosistem di tepi perairan (ekosistem mangrove) terancam kerusakannya. 3. Pencemaran dilingkungan yang disebabkan oleh aktifitas rumah tangga dan industry. 4. Kawasan yang berada di tepi perairan laut maka ancaman utama adalah bencana tsunami. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya industri pengolahan komoditas unggulan (pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata). 2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia. 3. Rendahnya pendapatan yang diakibatkan oleh terbatasnya produksi dan sangat kurangnya penduduk terlibat dalam ekonomi pasar/uang. 4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 5. Potensi sumberdaya alam yang berlimpah. 6. Investasi yang rendah disebabkan tingginya risiko berusaha & tingkat kepastian usaha yang rendah.

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

Analisis strategi dan kebijakan, merupakan pedoman dalam merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan kawasan terpadu dan sesuai dengan visi, misi, program dan target capaian bupati. Analisis dimaksud, didasarkan pada hasil analisis gambaran umum kawasan, hasil analisis permasalahan/potensi pembangunan kawasan, dan hasil rumusan isu-isu strategis kawasan yang telah dilakukan sebelumnya terhadap masing-masing kawasan.

Untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program indikatif, maka rumusan strategi harus dipetakan (*strategy mapping*) berdasarkan isu-isu

strategis yang merupakan kegiatan-kegiatan pada program kewilayahan dengan mempertimbangkan antara lain:

- a. Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai kendala (*cost-effectiveness*) untuk mencapai manfaat yang terbesar dari kemampuan keuangan daerah yang terbatas (*efficiency allocation*).
- b. Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat memberikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya.
- c. Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan keterpaduan dalam perencanaan program/kegiatan dan waktu pelaksanaannya dari masing-masing SKPD.

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi (kegiatan) agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.

Penyusunan Indikasi Program Kewilayahan dan Kebutuhan Pendanaan, penyusunan indikasi program kewilayahan beserta kebutuhan pendanaannya di setiap kawasan PWT disusun berdasarkan hasil analisis sektor unggulan/aspek prioritas dari masing-masing kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota, dan kawasan yang mendukung pengembangan kawasan strategis nasional/provinsi.

Indikasi program kewilayahan di setiap kawasan strategis provinsi dan Kabupaten Kepulauan Yapen, serta kawasan pendukung kawasan strategis nasional/ provinsi.

LAPORAN AKHIR

Tabel 4.16. Indikasi Program Kewilayahan Kabupaten Kepulauan Yapen

No	Nama Kawasan	Sektor Unggulan/Aspek Prioritas	Lokasi	Isu Strategis	Strategi	Program Pengembangan Kawasan	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Kawasan Strategis Agropolitan dan Minapolitan Kepulauan Yapen	Pertanian, perikanan, ekowisata, dan budaya lokal.	- Distrik Angkaisera - Distrik Yepen Barat - Distrik Kasiwo - Distrik Poom - Distrik Teluk Ampimoi - Distrik Windesi - Distrik Wonawa - Distrik Tepen Selatan - Distrik Tepen Timur - Distrik Tepen Utara	- Adanya isolasi dan kesenjangan yang tajam antar wilayah/kawasan yang cukup jauh. - Keterbatasan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi. - Belum terbukanya aksesibilitas infrastruktur dasar secara memadai dan merata. - Potensi sumberdaya alam yang berlimpah. - Produktivitas sektor pertanian belum optimal yang salah satunya rendahnya pendapatan yang diakibatkan oleh terbatasnya produksi dan sangat kurangnya penduduk terlibat dalam ekonomi pasar/uang. - Hambatan budaya yang dalam batas-batas tertentu tidak kondusif bagi berlangsungnya persaingan yang sehat demi mencapai kemajuan yang lebih baik. - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	- Mewujudkan rencana detail kawasan strategis di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai acuan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. - Pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian SDA dan lingkungan hidup secara berkelanjutan (<i>pro-environment</i>). - Meningkatkan persentase nilai perdagangan produk olahan - Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya air sebagai sumber energi (listrik). - Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum	- Program Pengembangan Kawasan Permukiman - Program Penataan Kawasan Rawan Gempa - Program Penataan Kawasan Rawan Banjir - Program Penataan Kawasan Rawan Longsor - Program Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) - Program Pembangunan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan - Program Pembangunan Kawasan Perkebunan - Program Pembangunan Kawasan Tanaman Holtikultura - Program Pembangunan Kawasan Peternakan - Program Pembangunan Kawasan Perikanan Darat - Program Pengembangan		- Semakin berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menumbuhkembangkan kegiatan pertanian, kelautan dan perikanan yang berbasis pada konsep magropolitan dan minapolitan, serta pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal. Melanjutkan upaya mewujudkan sektor pertanian, kelautan dan perikanan dan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan pertumbuhan ekonomi, dan peran koperasi terus ditingkatkan dengan pelaku UKM yang berkualitas dan sentra-sentra UKM yang mandiri, tangguh dan berorientasi pada pasar global.	- Terciptanya kawasan Agropolitan dan Minapolitan yang mampu menumbuhkan sentra-sentra UKM yang mandiri, tanggung dan berorientasi pada pasar global dengan tidak meninggalkan budaya lokal sehingga mampu memberikan peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen.

LAPORAN AKHIR

No	Nama Kawasan	Sektor Unggulan/Aspek Prioritas	Lokasi	Isu Strategis	Strategi	Program Pengembangan Kawasan	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Kinerja
				- disebabkan keterbatasan sarana pengairan.	- Mendorong terciptanya peluang usaha/pasar - Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya air sebagai sumber energi (listrik). - Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum - Meningkatkan pencegahan pencemaran air dan udara dari industri dan domestic - Meningkatkan peran serta masyarakat desa hutan dalam pengamanan kawasan hutan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup kinerja pengelolaan Persampahan - Mengembangkan lingkungan	Kawasan Pariwisata Bahari - Program Pengembangan Kawasan Agrowisata - Program Pengembangan Kawasan Wisata Budaya - Program Pengembangan Kawasan Wisata Kuliner - Program Pengembangan Pulau-Pulau Kecil - Program Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan - Program Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap - Program Pengembangan Kawasan Jasa Perdagangan - Program Pembangunan Kawasan Industri Kecil dan Menengah		- Meningkatkan pembinaan pada sanggar seni dan, sehingga masyarakat semakin memiliki kesadaran akan akar budayanya. Terus melakukan pendataan terhadap berbagai peninggalan budaya Kepulauan Yapen baik berupa peninggalan sejarah maupun dalam bentuk naskah tulisan. Mencegah agar peninggalan budaya Papua tidak punah dan hilang ditelan masa dan dapat melakukan revitalisasi peninggalan budaya Papua yang mengalami kerusakan dan kepunahan. - Pelatihan relawan inti penanggulangan dan mitigasi bencana terus ditingkatkan.	

LAPORAN AKHIR

No	Nama Kawasan	Sektor Unggulan/Aspek Prioritas	Lokasi	Isu Strategis	Strategi	Program Pengembangan Kawasan	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Kinerja
					<p>permukiman sehat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan inkubator bisnis KUKMK - Meningkatkan sarana dan prasarana gelar karya dan kreativitas seni & budaya Papua yang <i>representative</i>. 				
2.	Kawasan Strategis Perkampungan Nelayan Tradisional Kepulauan Yapen	Perikanan tangkap dan pariwisata berbasis alam dan budaya lokal.	<ul style="list-style-type: none"> - Kampung Serui Laut Distrik Yapen Selatan - Kampung Mariadei Distrik Yapen Selatan - Kampung Ambai Distrik Kepulauan Ambai 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi sumberdaya alam yang berlimpah. - Kurang optimalnya pengelolaan komoditas kelautan, perikanan, dan pariwisata. - Rendahnya sumberdaya manusia dalam pengelolaan kawasan. - Rendahnya pendapatan yang diakibatkan oleh terbatasnya produksi dan sangat kurangnya penduduk terlibat dalam ekonomi pasar/uang. - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan rencana detail kawasan strategis di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai acuan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. - Mengembangkan lingkungan permukiman sehat - Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya air sebagai sumber energi (listrik). - Meningkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Kawasan Permukiman - Program Penataan Kawasan Kumuh - Program Penataan Kawasan Rawan Banjir - Program Penataan Kawasan Rawan Gempa - Program Penataan Kawasan Rawan Longsor - Program Pengembangan Kawasan Cagar Budaya - Program Pengembangan Kawasan Bangunan Bersejarah - Program 		<ul style="list-style-type: none"> - Sektor Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata harus dibungkus dengan baik oleh sektor perdagangan sehingga perlu segera diperhatikan dan dikordinasikan terkhusus lagi di sektor pariwisata yang akan dicoba dijual dan menjadi salah satu ikon dari Kabupaten Kepulauan Yapen. - Terus mengembangkan potensi pertanian, kelautan dan perikanan dan Pariwisata dan terus melakukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terciptanya kawasan perkampungan nelayan yang mampu mengelola potensi-potensi kelautan dan perikanan dengan tidak meninggalkan budaya dan kearifan lokal dengan menerapkan konsep pariwisata bahari, sehingga mampu meningkatkan nilai jual dan menjadi salah

LAPORAN AKHIR

No	Nama Kawasan	Sektor Unggulan/Aspek Prioritas	Lokasi	Isu Strategis	Strategi	Program Pengembangan Kawasan	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Kinerja
					<p>ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan jumlah dan volume usaha ekonomi produktif masyarakat - Meningkatkan kinerja pengelolaan Persampahan - Mengembangkan inkubator bisnis KUKMK 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kawasan Konservasi - Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Bahari - Program Pengembangan Kawasan Wisata Budaya - Program Pengembangan Kawasan Wisata Kuliner - Program Pengembangan Kawasan Pesisir - Program Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap - Program Pengembangan Kawasan Jasa Perdagangan - Program Penataan Kawasan Jasa Perdagangan - Program Pembangunan Kawasan Industri Kecil dan Menengah 		<p>pembinaan masyarakat agar semakin berdaya dalam mengembangkan kemampuannya dan meningkatkan produktivitasnya. Pembinaan tenaga lokal baik dari peralatan, teknologi dan permodalan dan pemasaran hasil terus dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperhatikan pembangunan berwawasan lingkungan dan melakukan pengawasan secara intensif terhadap pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. - Pembangunan dilakukan dengan mengoptimalkan fasilitas yang terpadu, dengan terus melakukan pengembangan potensi dan pengawasan yang berkelanjutan dan terkoordinasi dan disejajarkan 	<p>satu ikon dari Kabupaten Kepulauan Yapen</p>

LAPORAN AKHIR

No	Nama Kawasan	Sektor Unggulan/Aspek Prioritas	Lokasi	Isu Strategis	Strategi	Program Pengembangan Kawasan	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Kinerja
								dengan pembangunan infrastruktur perekonomian. - Pembangunan pariwisata terus ditingkatkan untuk mendorong ekonomi daerah serta pelibatan sektor publik dalam pengelolaan objek dan destinasi wisata.	
3.	Kawasan Pendukung Waterfront Kampung Ansus Kepulauan Yapen	Industri dan pariwisata.	- Kampung Ansus Distrik Yapen Barat - Kampung Wimoni Distrik Yapen Barat	- Potensi sumberdaya alam yang berlimpah. - Belum optimalnya industri pengolahan komoditas unggulan (pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata). - Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia. - Investasi yang rendah disebabkan tingginya risiko berusaha & tingkat kepastian usaha yang rendah. - Rendahnya pendapatan yang diakibatkan oleh terbatasnya produksi dan sangat kurangnya penduduk terlibat dalam ekonomi pasar/uang. - Rendahnya partisipasi	- Mewujudkan rencana detail kawasan pendukung Waterfront Kampung Ansus di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai acuan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. - Mengembangkan kerangka regulasi dalam penataan ruang. - Meningkatkan pembangunan &	- Program Pengembangan Kawasan Pendidikan - Program Pengembangan Kawasan IPTEK - Program Pengembangan Kawasan Permukiman - Program Pengembangan Kawasan Perkantoran - Program Pembangunan Kawasan Pelabuhan - Program Penataan Kawasan Rawan Banjir - Program Penataan Kawasan Rawan Gempa - Program Penataan		- Dalam bidang perdagangan terus dilakukan upaya peningkatan daya saing produk dan pelaku usaha, disertai peningkatan pengawasan barang dan jasa dan peningkatan standar dan kualitas produksi dalam negeri dengan pemanfaatan teknologi dan pembinaan pengembangan ekonomi kreatif. Terus meningkatkan	- Terciptanya kawasan Waterfront Kampung Ansus sebagai kawasan permukiman, sentral industri dan tujuan destinasi pariwisata Kabupaten Kepulauan Yapen

LAPORAN AKHIR

No	Nama Kawasan	Sektor Unggulan/Aspek Prioritas	Lokasi	Isu Strategis	Strategi	Program Pengembangan Kawasan	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Kinerja
				masyarakat dalam pembangunan.	<p>pengembangan sarana dan prasarana transportasi (pelabuhan dan lapangan terbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan lingkungan permukiman sehat - Meningkatkan peranserta masyarakat desa hutan dalam pengamanan kawasan hutan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup - Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya air sebagai sumber energi (listrik). - Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum - Meningkatkan kinerja pengelolaan Persampahan - Meningkatkan 	<p>Kawasan Rawan Longsor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Kawasan Bangunan Bersejarah - Program Pembangunan Kawasan Olah Raga - Program Pengembangan Kawasan Konservasi - Program Pengembangan Kawasan Hutan Kota - Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Bahari - Program Pengembangan Kawasan Wisata Kuliner - Program Pengembangan Kawasan Wisata Budaya - Program Pengembangan Kawasan Pesisir - Program Pengembangan Kawasan Jasa Perdagangan - Program Penataan Kawasan Jasa Perdagangan - Program 		<p>pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dan penguatan daya saing ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan pelabuhan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen baik pelabuhan Utama maupun pelabuhan perintis merupakan bagian dari sistem transportasi antar wilayah. - Semakin berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan tetap menumbuhkembangkan kegiatan pertanian, kelautan dan perikanan dan Pariwisata. Mewujudkan pertanian, kelautan dan perikanan dan Pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan pertumbuhan ekonomi, dan peran 	

LAPORAN AKHIR

No	Nama Kawasan	Sektor Unggulan/Aspek Prioritas	Lokasi	Isu Strategis	Strategi	Program Pengembangan Kawasan	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Kinerja
					<p>sarana dan prasarana gelar karya dan kreativitas seni dan budaya Papua yang representative</p>	<p>Pembangunan Kawasan Industri Besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Kawasan Industri Besar - Program Penataan Kawasan Industri Besar - Program Pembangunan Kawasan Industri Kecil dan Menengah. - Meningkatkan jumlah dan volume usaha ekonomi produktif masyarakat - Mengembangkan inkubator bisnis KUKMK 		<p>koperasi ditingkatkan sebagai pelaku UKM dan mandiri, tangguh dan berorientasi pada pasar global</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam bidang industri terus ditingkatkan kualitas dan kuantitas industri kecil agar mandiri dan pelaku usaha ekonomi kecil dan masyarakat terus berkembang baik jumlah maupun peranannya. Terus mengembangkan sistem usaha dan kemitraan antara penduduk lokal dengan perusahaan dan usaha mikro dan kecil ditata, dibina dan diberdayakan secara berkelanjutan. - Meningkatkan sarana dan prasarana dan jenis wisata yang akan dikembangkan dan selanjutnya dibina serta diberdayakan tenaga-tenaga 	

LAPORAN AKHIR

No	Nama Kawasan	Sektor Unggulan/Aspek Prioritas	Lokasi	Isu Strategis	Strategi	Program Pengembangan Kawasan	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Kinerja
								<p>pariwisata lokal agar lebih profesional dan memiliki nilai kompetensi yang tinggi dan pro pembangunan daerah dengan pendidikan dan pelatihan secara terus menerus. Terus dilakukan promosi wisata di Kabupaten Kepulauan Yapen ke negara sumber wisatawan potensial luar negeri maupun dalam negeri dengan metode yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan.</p>	

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

Tabel 4.17. Indikasi Program Kewilayahan Kabupaten Kepulauan Yapen

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1					URUSAN WAJIB
1	03	1			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
1	03	1	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1	03	1	15	03	Pembangunan Jalan
1	03	1	15	03	Perencanaan Pembangunan Jembatan
1	3	1	18		Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1	3	1	18	3	Pemeliharaan Jalan
1	3	1	18	4	Pemeliharaan Jembatan
1	03	01	24		Program pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1	03	1	24	01	Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
1	03	1	24	06	Pembangunan Jaringan Air Bersih
1	03	01	30		Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1	03	01	30	02	Penataan Jalan dan Jembatan Perdesaan
1	03	01			Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1	03	1	17	03	Pembangunan Pengaman Pantai
1	03	1	15		Program Pengembangan Perumahan
1	03	1	15	07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat sederhana
1	06	1			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	06	1	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	1	21	08	Penyusunan RKPD Tahun 2016
1	06	1	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1	06	1	22		Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan (lanjutan)
1	06	1	23		Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1	06	1	23	01	Penyusunan Masterplan kesehatan Kab. Kep. Yapen (Lanjutan)
1	06	1	23	01	Penyusunan Masterplan pendidikan Kab. Kep. Yapen
1	06	1	24		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1	06	1	20		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	1	20	01	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
1	06	1	16		Program Pemanfaatan Ruang
1	05	1	16	05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
1	05	1	16		DED Taman Kota (Alun-alun)
1	05	1	16		Penyusunan Master Plan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga
1	05	1	16		Pemutahiran Data Blue Print
1	05	1	16		Penyusunan RPWTJMD Kabupaten Kepulauan Yapen
1	05	1	16		Penyusunan RDTRK Distrik Kosiwo
1	05	1	16		Penyusunan RDTRK Distrik Angkaisera
1	05	1	16		Penyusunan Rencana Induk Ibukota DOB YABARU
1	05	1	16		Penyusunan Rencana Induk Ibukota DOB TIMUR JAUH

LAPORAN AKHIR

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1	05	1	16		Survey Terbuka Hijau Kabupaten Kepulauan Yapen
1	05	1	16		Penyusunan Perda RDTRK Distrik Yapen Selatan
1.	07	1			DINAS PERHUBUNGAN
1.	07	1	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.	07	1	15	01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.	07	1	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.	07	1	16	02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
1.	07	1	16	05	Pemeliharaan Lampu Pengatur Lalu Lintas (Traffic Light & Warning light)
1.	07	1	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.	07	1	17	12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
1	08	01			BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1	08	01	18		Program Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan SDA
1	08	01	18	01	Penelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Eстуaria dan Teluk
1	08	01	18	03	Rehabilitasi Hutan & lahan
1	08	01	19		Program Peningkatan Kualitas & Akses Informasi SDA & LH
1	08	01	19	06	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
1	08	01	19	08	kajian Strategis Pembangunan Bidang LH
1	15	1			DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1	15	01	15		Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Konduksif
1	15	01	15	06	Perencanaan, Koordinasi & Pengembangan UMKM
1	15	01	15	07	Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil Menengah
1	15	01	16		Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif bagi Usaha Mikro Kecil menengah
1	15	01	16	06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
1	15	01	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
					Fasilitas bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
2	07	02	17		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
2	07	02	17	01	Pembinaan Kemampuan Teknologi industri
2	07	02	17	03	PERLUASAN PENERAPAN SNI UNTUK MENDORONG DAYA SAING
2	07	02	18		Program Pendataan Struktur Industri
2	07	02	18	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri
2					URUSAN PILIHAN
2	01	1			DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
2	01	1	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
2	01	1	16	09	Pemanfaatan pekarangan untuk tanaman hortikultura
2	01	1	16	13	Pengembangan cadangan pangan daerah
2	01	1	16	17	Pengembangan pertanian pada lahan kering
2	01	1	16	20	Pengembangan perbenihan/perbibitan

LAPORAN AKHIR

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2	01	1	16	21	Pengembangan system informasi pasar komoditas pertanian
2	01	1	22		Program peningkatan produksi hasil peternakan
2	01	1	22	01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
2	01	1	23		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
2	01	1	23	10	Penyuluhan permintaan informasi pasar atas hasil produksi peternakan
2	01	1	24		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
2	01	1	24	01	Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna
2	01	02			DINAS PERKEBUNAN
2	01	02	07		PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
2	01	02	07	02	Pembinaan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
2	02	1			DINAS KEHUTANAN
2	02		15		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
2	02		15	03	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
2.	04	01			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	04	1	17		Program Pengembangan Kemitraan
2.	04	1	17	01	Pengembangan dan Penguatan Informasi Data Base :
2.	04	1	16.		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.	04	1	16.	01	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
2.	04	1	18.		Program Pengembangan Nilai Budaya
2.	04	1	18.	01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
2.	04	1	18.	02	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
					Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka termasuk naska Kuno
2.	04	1	18.	03	Program Pengembangan Kemitraan
1	17	17			Pengelolaan Keragaman Budaya
1	17	17	1		Pengembangan Kesenian & Kebudayaan Daerah
1	17	17	2		Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
2	05	1			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	05	1	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2	05	1	20	03	Budidaya Air Laut
2	05	1	20	02	Budidaya Air Tawar
2	05	1	20	01	Pembuatan kolam ikan rakyat (semi permanen)
2	05	1	21		Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2	05	1	21	05	Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap
2	05	1	23		Program Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan
2	05	1	23	01	Pelatihan Pengolahan
2	05	1	15		Program Pembinaan Sumberdaya Masyarakat Pesisir
2	05	1	15	01	Survey Inventarisasi data dan Identifikasi wilayah konservasi

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

LAPORAN AKHIR

Tabel 4.18. Kawasan PWT Terpilih Kabupaten Kepulauan Yapen

No	Nama Kawasan	Sektor Unggulan/Aspek Prioritas	Isu Strategis	Program Pengembangan Kawasan
1.	Kawasan Strategis Agropolitan dan Minapolitan Kepulauan Yapen	Pertanian, perikanan, ekowisata, dan budaya lokal.	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya isolasi dan kesenjangan yang tajam antar wilayah/kawasan yang cukup jauh. - Keterbatasan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi. - Belum terbukanya aksesibilitas infrastruktur dasar secara memadai dan merata. - Potensi sumberdaya alam yang berlimpah. - Produktivitas sektor pertanian belum optimal yang salah satunya rendahnya pendapatan yang diakibatkan oleh terbatasnya produksi dan sangat kurangnya penduduk terlibat dalam ekonomi pasar/uang. - Hambatan budaya yang dalam batas-batas tertentu tidak kondusif bagi berlangsungnya persaingan yang sehat demi mencapai kemajuan yang lebih baik. - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. - disebabkan keterbatasan sarana pengairan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Kawasan Permukiman - Program Penataan Kawasan Rawan Gempa - Program Penataan Kawasan Rawan Banjir - Program Penataan Kawasan Rawan Longsor - Program Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) - Program Pembangunan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan - Program Pembangunan Kawasan Perkebunan - Program Pembangunan Kawasan Tanaman Holtikultura - Program Pembangunan Kawasan Peternakan - Program Pembangunan Kawasan Perikanan Darat - Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Bahari - Program Pengembangan Kawasan Agrowisata - Program Pengembangan Kawasan Wisata Budaya - Program Pengembangan Kawasan Wisata Kuliner - Program Pengembangan Pulau-Pulau Kecil - Program Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan - Program Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap - Program Pengembangan Kawasan Jasa Perdagangan - Program Pembangunan Kawasan Industri Kecil dan Menengah
2.	Kawasan Strategis Perkampungan Nelayan Tradisional Kepulauan Yapen	Perikanan tangkap dan pariwisata berbasis alam dan budaya lokal.	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi sumberdaya alam yang berlimpah. - Kurang optimalnya pengelolaan komoditas kelautan, perikanan, dan pariwisata. - Rendahnya sumberdaya manusia dalam pengelolaan kawasan. - Rendahnya pendapatan yang diakibatkan oleh terbatasnya produksi dan sangat kurangnya penduduk terlibat dalam ekonomi pasar/uang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Kawasan Permukiman - Program Penataan Kawasan Kumuh - Program Penataan Kawasan Rawan Banjir - Program Penataan Kawasan Rawan Gempa - Program Penataan Kawasan Rawan Longsor - Program Pengembangan Kawasan Cagar Budaya - Program Pengembangan Kawasan Bangunan Bersejarah - Program Pengembangan Kawasan Konservasi - Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Bahari - Program Pengembangan Kawasan Wisata Budaya

LAPORAN AKHIR

No	Nama Kawasan	Sektor Unggulan/Aspek Prioritas	Isu Strategis	Program Pengembangan Kawasan
			- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	- Program Pengembangan Kawasan Wisata Kuliner - Program Pengembangan Kawasan Pesisir - Program Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap - Program Pengembangan Kawasan Jasa Perdagangan - Program Penataan Kawasan Jasa Perdagangan - Program Pembangunan Kawasan Industri Kecil dan Menengah
3.	Kawasan Pendukung Waterfront Kampung Ansus Kepulauan Yapen	Industri dan pariwisata.	- Potensi sumberdaya alam yang berlimpah. - Belum optimalnya industri pengolahan komoditas unggulan (pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata). - Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia. - Investasi yang rendah disebabkan tingginya risiko berusaha & tingkat kepastian usaha yang rendah. - Rendahnya pendapatan yang diakibatkan oleh terbatasnya produksi dan sangat kurangnya penduduk terlibat dalam ekonomi pasar/uang. - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	- Program Pengembangan Kawasan Pendidikan - Program Pengembangan Kawasan IPTEK - Program Pengembangan Kawasan Permukiman - Program Pengembangan Kawasan Perkantoran - Program Pembangunan Kawasan Pelabuhan - Program Penataan Kawasan Rawan Banjir - Program Penataan Kawasan Rawan Gempa - Program Penataan Kawasan Rawan Longsor - Program Pengembangan Kawasan Bangunan Bersejarah - Program Pembangunan Kawasan Olah Raga - Program Pengembangan Kawasan Konservasi - Program Pengembangan Kawasan Hutan Kota - Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Bahari - Program Pengembangan Kawasan Wisata Kuliner - Program Pengembangan Kawasan Wisata Budaya - Program Pengembangan Kawasan Pesisir - Program Pengembangan Kawasan Jasa Perdagangan - Program Penataan Kawasan Jasa Perdagangan - Program Pembangunan Kawasan Industri Besar - Program Pengembangan Kawasan Industri Besar - Program Penataan Kawasan Industri Besar - Program Pembangunan Kawasan Industri Kecil dan Menengah. - Meningkatkan jumlah dan volume usaha ekonomi produktif masyarakat - Mengembangkan inkubator bisnis KUKMK

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

4.3. PEMBOBOTAN

Dalam melakukan analisis PWT dilakukan dengan melakukan pembobotan untuk setiap kawasan yang direncanakan. Pembobotan dilakukan atas kawasan strategis provinsi, kabupaten, atau kawasan yang mendukung kawasan strategis nasional/provinsi yang terpilih sesuai dengan kawasan yang telah ada. Pembobotan ini ditujukan untuk menemukan tingkat kepentingan aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan terhadap peran kawasan terpilih melalui penghitungan bobot faktor-faktor yang terdapat pada masing-masing aspek.

Salah satu model dalam melakukan pembobotan dapat menggunakan metode Skala Likert, sebagaimana yang dilakukan dalam permendagri ini. Selain metode tersebut, tim penyusun dapat menggunakan metode lain yang sesuai dengan kebutuhandan kapasitas dalam penentuan prioritas kawasan PWT, misalnya Proses Analisis Hierarki (AHP).

Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden/tim penyusun menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

LAPORAN AKHIR

Tabel 4.19. Hasil Bobot Kepentingan Variabel terhadap PWT Kawasan Strategis Agropolitan dan Minapolitan

Nama	Variabel									
	ke-1	ke-2	ke-3	ke-4	ke-5	ke-6	ke-7	ke-8	ke-9	ke-10
Responden 1	3	5	5	3	4	4	4	3	2	2
Responden 2	4	4	4	3	4	3	4	3	2	3
Responden 3	2	4	4	3	3	3	4	3	2	3
Responden 4	4	5	5	4	4	4	5	4	2	2
Responden 5	4	5	5	4	4	4	5	3	2	2
Responden 6	3	5	5	3	4	4	4	3	2	2
Responden 7	4	4	4	3	4	3	4	3	2	3
Responden 8	2	4	4	3	3	3	4	3	2	3
Responden 8	4	5	5	4	4	4	5	4	2	2
Responden 10	4	5	5	4	4	4	5	3	2	2
RATA- RATA	3.40	4.60	4.60	3.40	3.80	3.60	4.40	3.20	2.00	2.40
BOBOT	0.019	0.026	0.026	0.019	0.021	0.020	0.025	0.018	0.011	0.014

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

LAPORAN AKHIR

Tabel 4.20. Hasil Bobot Kepentingan Variabel terhadap PWT Kawasan Strategis Perkampungan Nelayan Tradisional

Nama	Variabel									
	ke-1	ke-2	ke-3	ke-4	ke-5	ke-6	ke-7	ke-8	ke-9	ke-10
Responden 1	4	5	4	4	4	3	5	3	1	2
Responden 2	4	4	5	4	4	4	5	4	1	3
Responden 3	5	5	5	4	4	4	4	4	2	2
Responden 4	4	5	5	4	4	3	4	4	1	2
Responden 5	4	4	5	4	3	3	4	2	1	2
Responden 6	4	5	4	4	4	3	5	3	1	2
Responden 7	4	4	5	4	4	4	5	4	1	3
Responden 8	5	5	5	4	4	4	4	4	2	2
Responden 8	4	5	5	4	4	3	4	4	1	2
Responden 10	4	4	5	4	3	3	4	2	1	2
RATA- RATA	4.20	4.60	4.80	4.00	3.80	3.40	4.40	3.40	1.20	2.20
BOBOT	0.023	0.026	0.027	0.022	0.021	0.019	0.024	0.019	0.007	0.012

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

LAPORAN AKHIR

Tabel 4.21. Hasil Bobot Kepentingan Variabel terhadap PWT Kawasan Pendukung Waterfront Kampung Ansus

Nama	Variabel									
	ke-1	ke-2	ke-3	ke-4	ke-5	ke-6	ke-7	ke-8	ke-9	ke-10
Responden 1	5	4	4	4	4	3	4	5	2	4
Responden 2	4	4	5	4	4	3	5	5	2	4
Responden 3	5	4	4	5	3	3	5	5	2	4
Responden 4	5	4	4	4	4	3	5	4	1	3
Responden 5	5	4	4	5	4	3	4	5	2	4
Responden 6	5	4	4	4	4	3	4	5	2	4
Responden 7	4	4	5	4	4	3	5	5	2	4
Responden 8	5	4	4	5	3	3	5	5	2	4
Responden 8	5	4	4	4	4	3	5	4	1	3
Responden 10	5	4	4	5	4	3	4	5	2	4
RATA- RATA	4.80	4.00	4.20	4.40	3.80	3.00	4.60	4.80	1.80	3.80
BOBOT	0.024	0.020	0.021	0.022	0.019	0.015	0.023	0.024	0.009	0.019

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

4.4. PENENTUAN PRIORITAS KAWASAN PWT

Penghitungan dan penentuan besarnya bobot kawasan, dilakukan dengan penilaian terhadap masing-masing kawasan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Mendukung prioritas nasional;
3. Memiliki dampak positif terhadap kawasan dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan kawasan; dan
5. Kemudahan untuk dikelola.

Tabel 4.22. Kesepakatan Hasil Bobot Kawasan Strategis Agropolitan dan Minapolitan

No.	Variabel	Bobot
1	Ketersediaan Infrastruktur	0.019
2	Sektor Unggulan	0.026
3	Sumber Daya Alam	0.026
4	Ketersediaan Tenaga Kerja	0.019
5	Kearifan Lokal	0.021
6	Situs Warisan Budaya	0.020
7	Kesejahteraan Masyarakat	0.025
8	Infrastruktur Pelayanan Umum	0.018
9	Rawan Bencana	0.011
10	Keseimbangan Ekologi	0.014
	Jumlah	0.200

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

Tabel 4.23. Kesepakatan Hasil Bobot
Kawasan Strategis Perkampungan Nelayan Tradisional

No.	Variabel	Bobot
1	Ketersediaan Infrastruktur	0.023
2	Sektor Unggulan	0.026
3	Sumber Daya Alam	0.027
4	Ketersediaan Tenaga Kerja	0.022
5	Kearifan Lokal	0.021
6	Situs Warisan Budaya	0.019
7	Kesejahteraan Masyarakat	0.024
8	Infrastruktur Pelayanan Umum	0.019
9	Rawan Bencana	0.007
10	Keseimbangan Ekologi	0.012
	Jumlah	0.200

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

Tabel 4.24. Kesepakatan Hasil Bobot
Kawasan Pendukung Waterfront Kampung Ansus

No.	Variabel	Bobot
1	Ketersediaan Infrastruktur	0.024
2	Sektor Unggulan	0.020
3	Sumber Daya Alam	0.021
4	Ketersediaan Tenaga Kerja	0.022
5	Kearifan Lokal	0.019
6	Situs Warisan Budaya	0.015
7	Kesejahteraan Masyarakat	0.023
8	Infrastruktur Pelayanan Umum	0.024
9	Rawan Bencana	0.009
10	Keseimbangan Ekologi	0.019
	Jumlah	0.200

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

LAPORAN AKHIR

Tabel 4.25. Hasil Nilai Kawasan terhadap Prioritas PWT

No	Nama Anggota Tim	Kawasan Strategis Agropolitan dan Minapolitan	Kawasan Strategis Perkampungan Nelayan Tradisional	Kawasan Pendukung Waterfront Kampung Ansus
1	A	19	19	23
2	B	19	19	24
3	C	19	23	23
4	D	24	21	23
5	E	19	21	25
6	A	19	19	23
7	B	19	19	24
8	C	19	23	23
9	D	24	21	23
10	E	19	21	25
Nilai Rata - Rata		20,00	20,60	23,60

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

Tabel 4.26. Penilaian/Skoring Kawasan Strategis Agropolitan dan Minapolitan

No	Nama Variabel	Bobot	Nilai Kawasan	Skor Kawasan (3) x (4)
1	Ketersediaan Infrastruktur	0.019	20.00	0.38
2	Sektor Unggulan	0.026	20.00	0.52
3	Sumber Daya Alam	0.026	20.00	0.52
4	Ketersediaan Tenaga Kerja	0.019	20.00	0.38
5	Kearifan Lokal	0.021	20.00	0.43
6	Situs Warisan Budaya	0.020	20.00	0.41
7	Kesejahteraan Masyarakat	0.025	20.00	0.50
8	Infrastruktur Pelayanan Umum	0.018	20.00	0.36
9	Rawan Bencana	0.011	20.00	0.23
10	Keseimbangan Ekologi	0.014	20.00	0.27
	Jumlah	0.200	20.00	4.00

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

Tabel 4.27. Penilaian/Skoring Kawasan Strategis Perkampungan Nelayan Tradisional

No	Nama Variabel	Bobot	Nilai Kawasan	Skor Kawasan (3) x (4)
1	Ketersediaan Infrastruktur	0.023	20.60	0.48
2	Sektor Unggulan	0.026	20.60	0.53
3	Sumber Daya Alam	0.027	20.60	0.55
4	Ketersediaan Tenaga Kerja	0.022	20.60	0.46
5	Kearifan Lokal	0.021	20.60	0.43
6	Situs Warisan Budaya	0.019	20.60	0.39
7	Kesejahteraan Masyarakat	0.024	20.60	0.50
8	Infrastruktur Pelayanan Umum	0.019	20.60	0.39
9	Rawan Bencana	0.007	20.60	0.14
10	Keseimbangan Ekologi	0.012	20.60	0.25
	Jumlah	0.200	20.60	4.12

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

Tabel 4.28. Penilaian/Skoring Kawasan Pendukung Waterfront Kampung Ansus

No	Nama Variabel	Bobot	Nilai Kawasan	Skor Kawasan (3) x (4)
1	Ketersediaan Infrastruktur	0.024	23.60	0.58
2	Sektor Unggulan	0.020	23.60	0.48
3	Sumber Daya Alam	0.021	23.60	0.51
4	Ketersediaan Tenaga Kerja	0.022	23.60	0.53
5	Kearifan Lokal	0.019	23.60	0.46
6	Situs Warisan Budaya	0.015	23.60	0.36
7	Kesejahteraan Masyarakat	0.023	23.60	0.55
8	Infrastruktur Pelayanan Umum	0.024	23.60	0.58
9	Rawan Bencana	0.009	23.60	0.22
10	Keseimbangan Ekologi	0.019	23.60	0.46
	Jumlah	0.200	23.60	4.72

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

Tabel 4.29. Ranking Prioritas Pengembangan Kawasan

No	Nama Kawasan	Total Skor	Ranking Prioritas
1.	Kawasan Strategis Agropolitan dan Minapolitan	4.00	III
2.	Kawasan Strategis Perkampungan Nelayan Tradisional	4.12	II
3.	Kawasan Pendukung Waterfront Kampung Ansus	4.72	I

Sumber: Hasil Analisis Studio, 2015

4.5. PENETAPAN PROGRAM KEWILAYAHAN

Berdasarkan ranking prioritas pengembangan kawasan, kemudian menentukan kawasan prioritas untuk dikembangkan. Berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan pada program kewilayahan disusunlah tahapan kegiatan sesuai dengan prioritas yang mengacu dukungan dan ketersediaan kawasan.

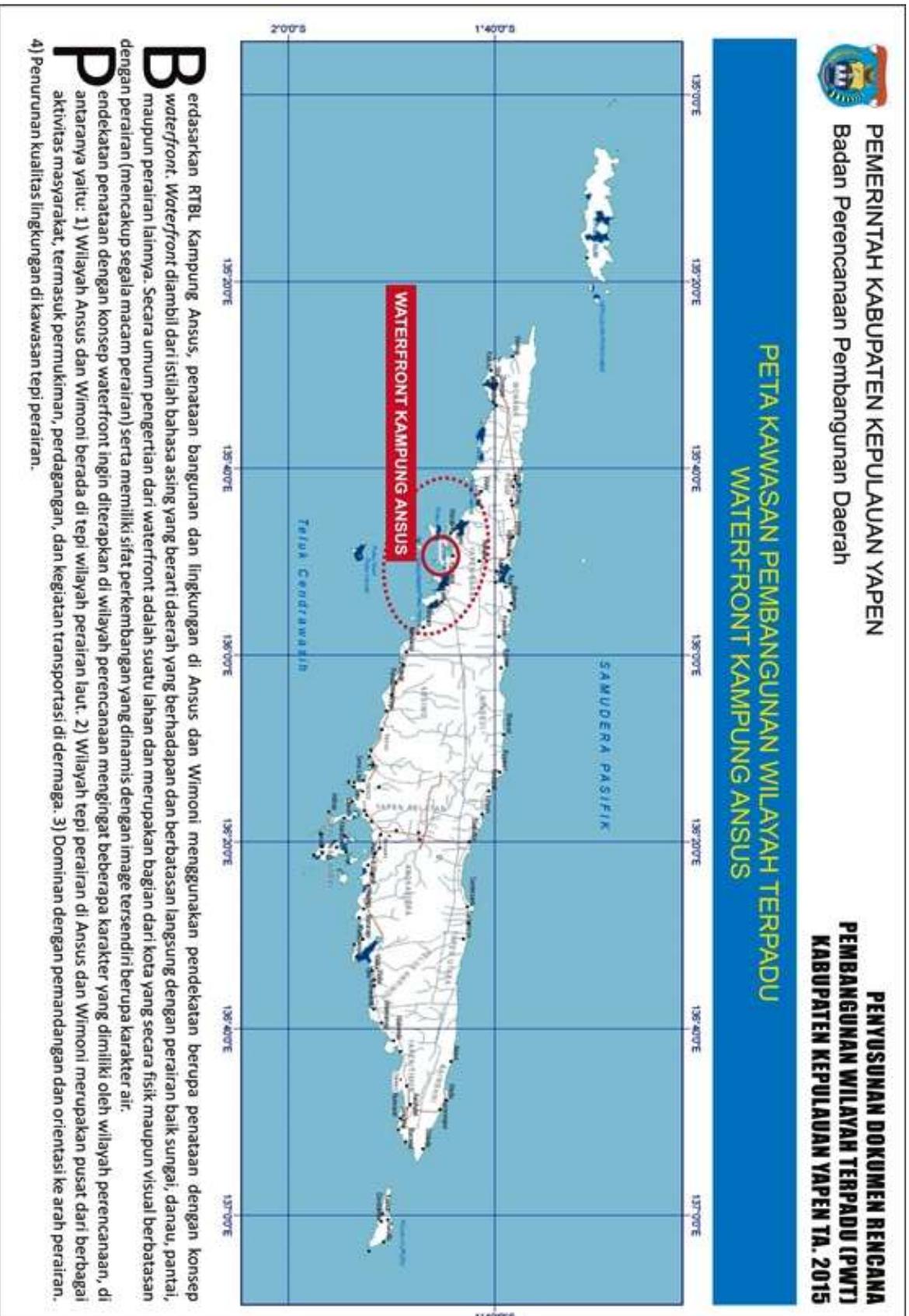
Tahapan prioritas kegiatan ditentukan melalui aspek-aspek pembangunan yang merupakan variabel dalam tipologi kawasan. Aspek pembangunan yang mempunyai nilai bobot tertinggi dijadikan prioritas pertama pada pembangunan kawasan PWT, kemudian disusul dengan aspek pembangunan prioritas kedua, ketiga dan seterusnya. Tahapan prioritas kegiatan PWT tidak menggambarkan tahun pelaksanaan kegiatan, karena kegiatan dapat dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran.

Program yang ditetapkan dalam PWTJM merupakan acuan bagi SKPD sesuai dengan tupoksinya untuk menyusun Renstra SKPD yang dijabarkan pada program dan kegiatan tahunan dalam periode lima tahunan. Tahapan tata cara penyusunan Renstra SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Program kewilayahan di Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan analisis Pembangunan Wilayah Terpadu terdiri dari:

LAPORAN AKHIR

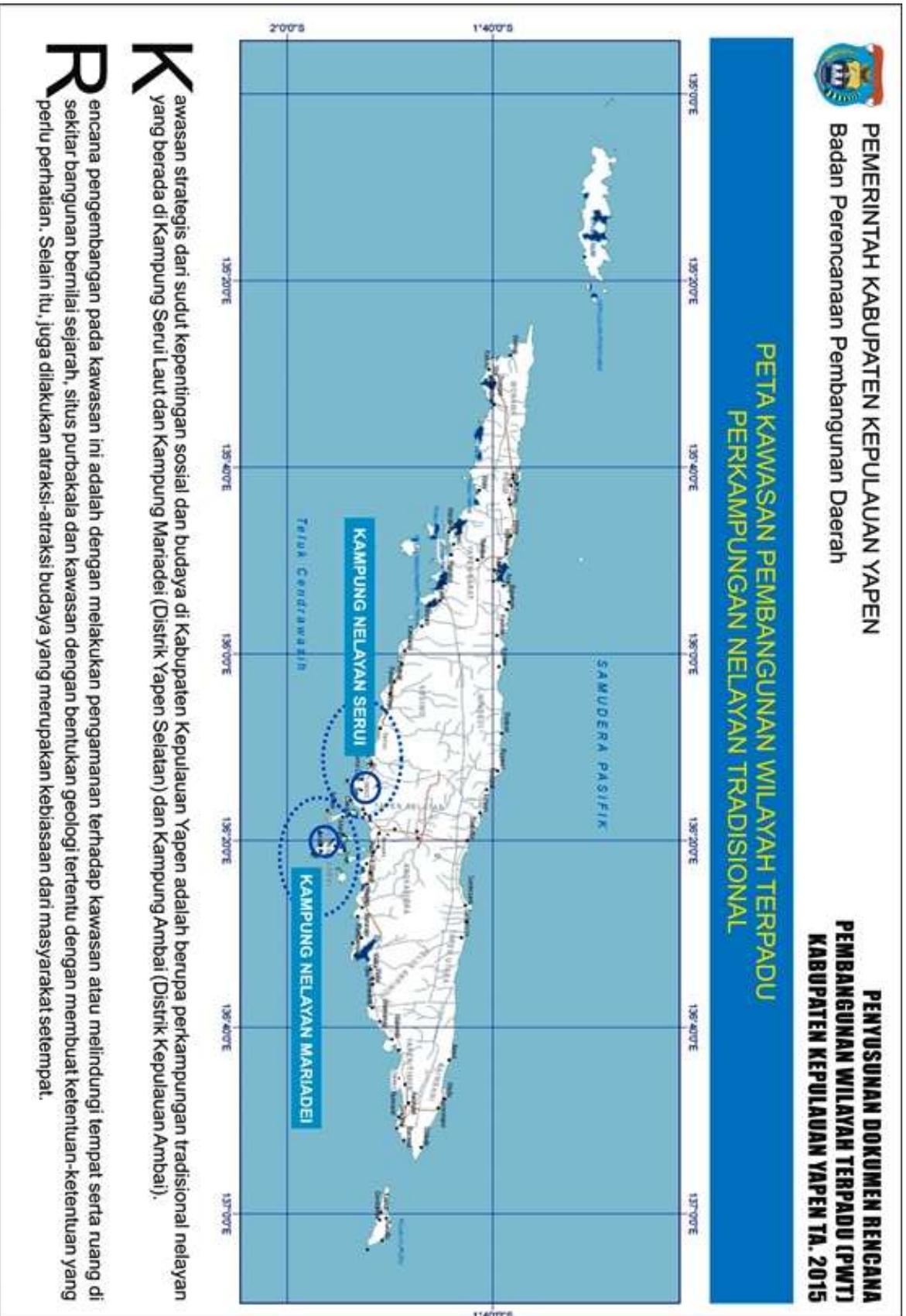
1. Kawasan Waterfront Kampung Ansus merupakan kawasan Utama,
2. Kawasan Perkampungan Nelayan Tradisional merupakan kawasan Pendukung,
3. Kawasan Agropolitan dan Minapolitan merupakan kawasan Pendukung.

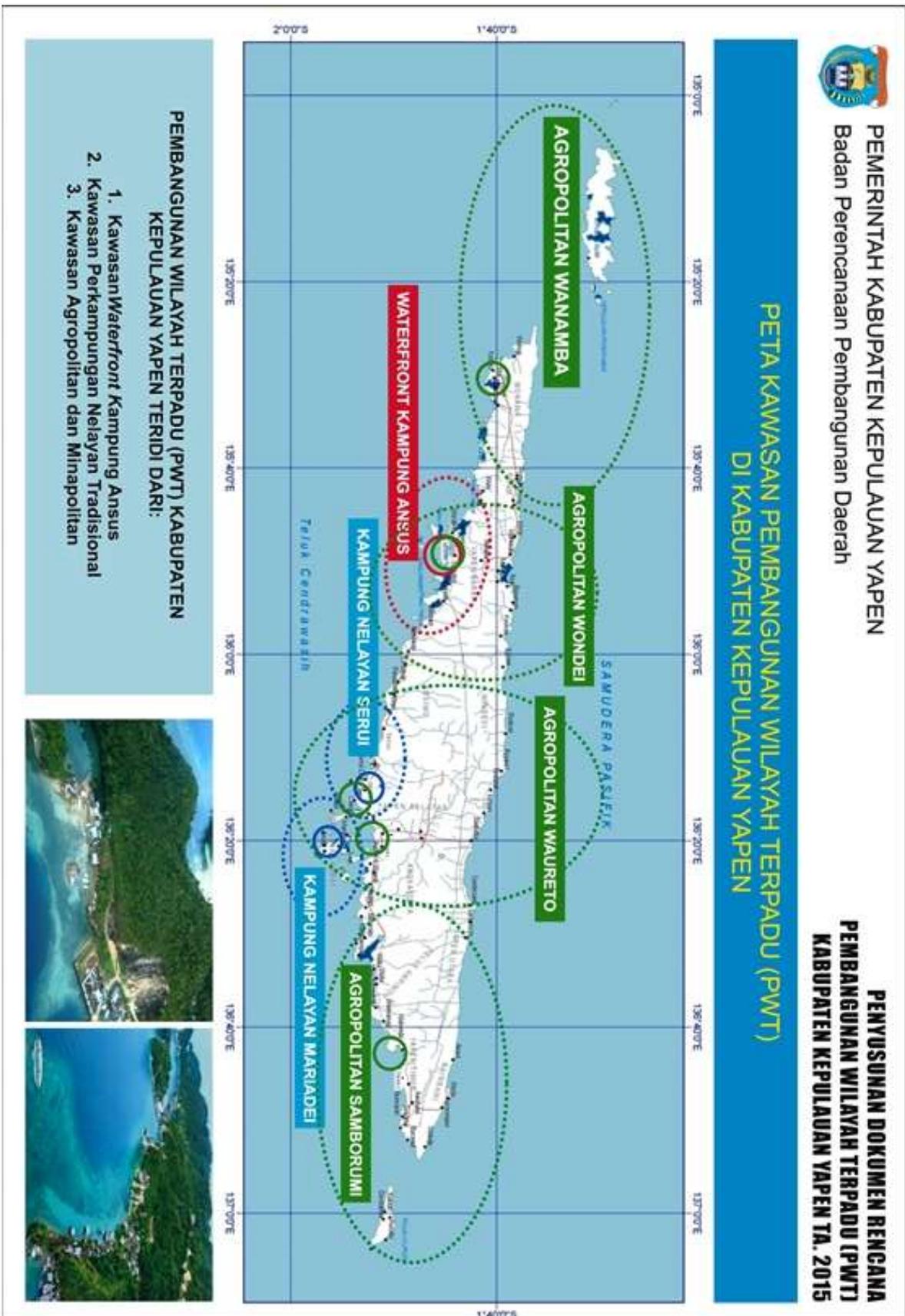


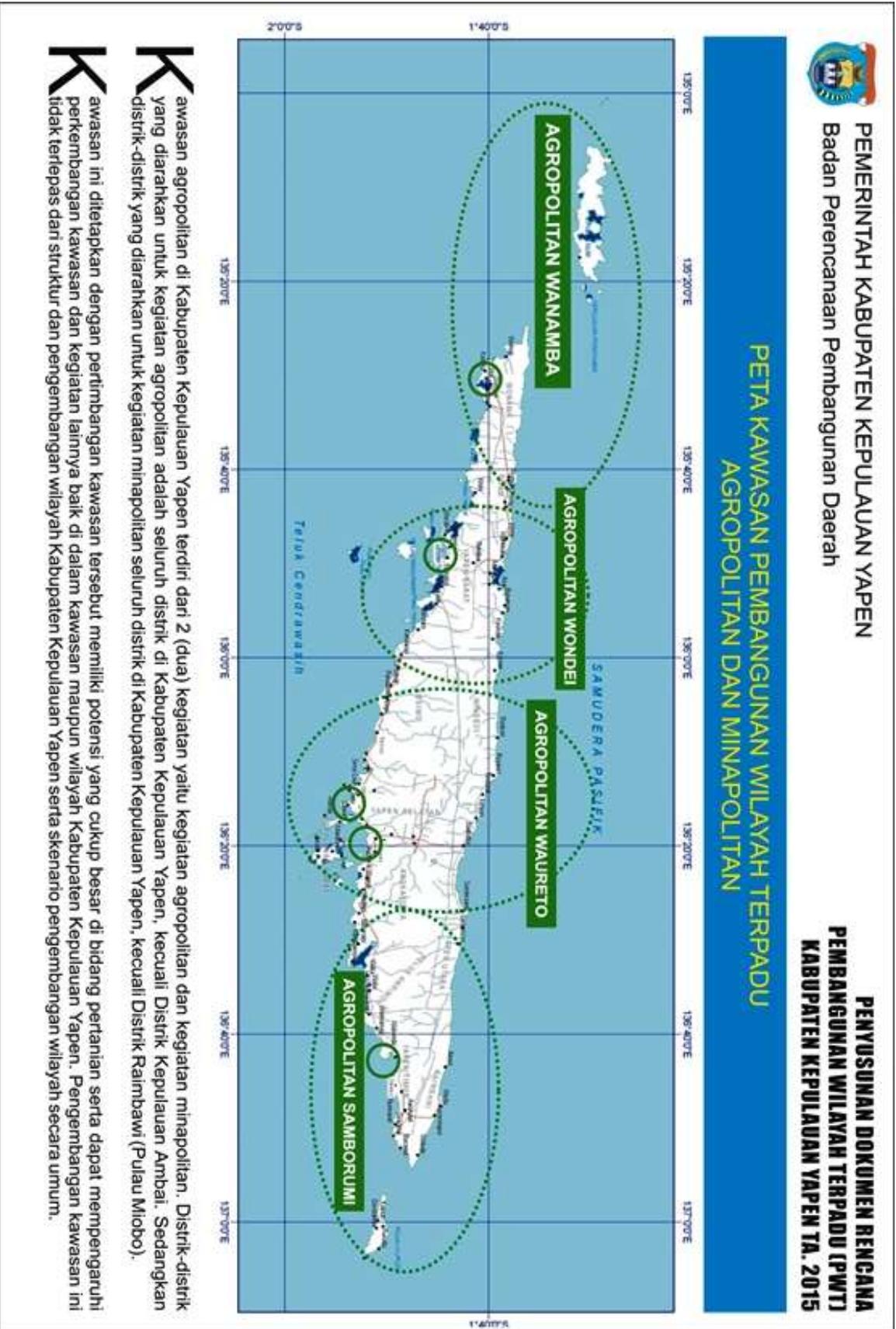
Berdasarkan RTBL Kampung Ansus, penataan bangunan dan lingkungan di Ansus dan Wimoni menggunakan pendekatan berupa penataan dengan konsep *waterfront*. *Waterfront* diambil dari istilah bahasa asing yang berarti daerah yang berhadapan dan berbatasan langsung dengan perairan baik sungai, danau, pantai, maupun perairan lainnya. Secara umum pengertian dari *waterfront* adalah suatu lahan dan merupakan bagian dari kota yang secara fisik maupun visual berbatasan dengan perairan (mencakup segala macam perairan) serta memiliki sifat perkembangan yang dinamis dengan *image* tersendiri berupa karakter air.

Pendekatan penataan dengan konsep *waterfront* ingin diterapkan di wilayah perencanaan mengingat beberapa karakter yang dimiliki oleh wilayah perencanaan, di antaranya yaitu: 1) Wilayah Ansus dan Wimoni berada di tepi wilayah perairan laut. 2) Wilayah tepi perairan di Ansus dan Wimoni merupakan pusat dari berbagai aktivitas masyarakat, termasuk permukiman, perdagangan, dan kegiatan transportasi di dermaga. 3) Dominan dengan pemandangan dan orientasi ke arah perairan.

4) Penurunan kualitas lingkungan di kawasan tepi perairan.







Kawasan agropolitan di Kabupaten Kepulauan Yapen terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan agropolitan dan kegiatan minapolitan. Distrik-distrik yang diarahkan untuk kegiatan agropolitan adalah seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen, kecuali Distrik Kepulauan Ambai. Sedangkan distrik-distrik yang diarahkan untuk kegiatan minapolitan seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen, kecuali Distrik Raimbawi (Pulau Miobo).

Kawasan ini ditetapkan dengan pertimbangan kawasan tersebut memiliki potensi yang cukup besar di bidang pertanian serta dapat mempengaruhi perkembangan kawasan dengan kegiatan lainnya baik di dalam kawasan maupun wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. Pengembangan kawasan ini tidak terlepas dan struktur dan pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen serta skenario pengembangan wilayah secara umum.



ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

5.1. ARAH PEMBANGUNAN

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan Visi Kabupaten Kepulauan Yapen “Kabupaten Kepulauan Yapen Unggul dalam Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata, Yang Berbasis Budaya Papua di Kawasan Teluk Cendrawasih Tahun 2005-2025” sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju Kabupaten Kepulauan Yapen yang maju dan sejahtera adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perlu dijabarkan dalam sasaran- sasaran pokok sebagai berikut :

5.1.1. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen Dalam Memenuhi Seluruh Kebutuhan Dasar Hidupnya Secara Layak

1. Tersedianya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan medis lainnya. Terlayannya seluruh lapisan dan kelompok masyarakat baik di daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan dan fasilitas kesehatan hingga ke wilayah terpinggir dari Kabupaten Kepulauan Yapen dan kalau memungkinkan anggaran, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dapat menyediakan pusat pelayanan kesehatan yang berskala lokal, nasional dan mungkin regional sebagai rujukan bagi daerah lainnya.
2. Tersedianya kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik, air bersih, pengolahan Sampah wilayah perkotaan dan perdesaan, angkutan, perumahan, keamanan, dan sanitasi lingkungan dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha dan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja bagi seluruh penduduk usia kerja dan kesempatan untuk membuka lapangan kerja baru khususnya bagi Penduduk Asli Papua guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan tujuan mendukung tumbuhnya kegiatan ekonomi yang berorientasi pada sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata dengan harapan dapat mengurangi tingkat pengangguran dari tahun ke

tahun, meningkat pula kualitas sumber daya manusia pencari kerja serta menerapkan kebijakan affirmative pada unit-unit yang melakukan usaha skala besar di daerah terhadap pekerja lokal.

4. Terwujudnya kelestarian sumber daya hayati dan lingkungan bagi upaya menjaga kelangsungan hidup dan kehidupan penduduk. Berkurangnya kerusakan lingkungan akibat menurunnya kualitas lingkungan dengan melibatkan semua pihak terkait baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
5. Tersedianya kebutuhan dasar masyarakat dengan jumlah dan harga terjangkau melalui upaya pengendalian harga dan menjamin lancarnya distribusi barang kebutuhan pokok sepanjang tahun, dan pengembangan potensi daerah lainnya seperti pertanian dan pengembangan perikanan sehingga menjadi kegiatan ekonomi yang produktif guna mendukung sektor-sektor lainnya seperti jasa dan perdagangan.
6. Terwujudnya pelayanan publik yang prima, cepat, murah dan mudah melalui pelayanan yang modern dan dengan dukungan sarana dan prasarana dan sistem yang berkualitas, maju dan modern.
7. Terkelolanya kawasan untuk pertanian dan pengembangan perikanan baik laut maupun darat yang ada di Kepulauan Yapen guna pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen dan dalam mengambil kebijakan dengan menjadikan Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai wilayah pengembangan pemenuhan kebutuhan bidang Pertanian dan Kelautan dan Perikanan untuk wilayah

Teluk Cendrawasih perlu didukung oleh pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

8. Terkendalinya perkembangan dan distribusi penduduk pada kawasan potensial yang ada dan yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, baik kawasan potensial Pertanian, Perdagangan, Industri, Kelautan dan Perikanan maupun Kawasan Potensial lainnya untuk pengembangan permukiman dengan tetap memerhatikan daya dukung dan daya tampung lahan.
9. Meningkatnya kualitas pelayanan medis baik di rumah sakit maupun di puskesmas dengan dukungan ketersediaan tenaga medis dan para medis yang profesional, memadai dan berkualitas dengan sarana dan prasarana yang maju dan modern. Tersedianya akses pelayanan kesehatan masyarakat dengan harga terjangkau termasuk harga obat dan perbekalan kesehatan.
10. Meningkatnya angka harapan hidup dan status gizi dan didukung dengan upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai penyakit menular secara berkesinambungan seperti demam berdarah, HIV/AIDS dan penyakit menular berbahaya lainnya.
11. Meningkatnya kesadaran untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, terwujudnya sistem informasi kesehatan yang optimal, cepat, akurat dan valid sehingga dapat mempercepat penentuan kebijakan dan intervensi yang perlu dilakukan.

5.1.2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih, Aparatur Pemerintahan Yang Berdisiplin Tinggi, Profesional, Bersih dan Berwibawa Serta Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Pembangunan diarahkan untuk mendorong terwujudnya *Good Local Governance* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen, yang berdasarkan pada 4 (empat) prinsip, yaitu prinsip kepastian hukum, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas dan prinsip partisipasi.

1. Pembangunan diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya mendorong peningkatan perangkat hukum di daerah tanpa pengecualian, peningkatan tertib hukum dan budaya hukum
2. Pembangunan diarahkan untuk menciptakan transparansi dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya mendorong pengembangan sistem informasi manajemen, peningkatan penyediaan informasi dan komunikasi, peningkatan keakuratan dan kevalidan data informasi
3. Pembangunan diarahkan untuk menciptakan prinsip akuntabilitas dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya mendorong meningkatkan sistem prestasi kerja pegawai negeri sipil, meningkatkan profesionalitas dan moralitas pegawai negeri sipil, mengembangkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen
4. Pembangunan diarahkan untuk menciptakan prinsip partisipasi dengan berbagai kebijakan yang pada

dasarnya mendorong meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pembangunan partisipatif di Kabupaten Kepulauan Yapen, meningkatkan keterlibatan kelompok masyarakat dalam proses perencanaan, perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik yang diproduksi oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, meningkatkan kebijakan publik yang aspiratif masyarakat.

5. Meningkatnya kualitas hidup sumberdaya manusia termasuk perempuan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG) sehingga mampu memberikan peranan dan kontribusi dalam pembangunan daerah dan tidak menjadi beban pembangunan.
6. Meningkatnya kualitas pendidikan yang didukung oleh penataan sistem dan manajemen pendidikan serta pemerataan pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dilihat dari jumlah dan presentase lulusan, presentase lulusan yang melanjutkan pendidikan tinggi dan presentase lulusan yang mampu masuk ke pasar kerja dan menciptakan lapangan kerja.
7. Dilaksanakannya penerapan reward and punishment di lingkungan pemerintah dan masyarakat yang dititikberatkan pada disiplin terhadap perundang-undangan seperti tertib lalu lintas, ketaatan dalam pemanfaatan ruang/lahan, budaya bersih, budaya antri, dan taat pajak serta perundang-undangan.
8. Berkembangnya sikap profesional bagi aparatur dan masyarakat untuk meningkatkan etos kerja. Penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan

kompetensinya dan didukung dengan sistem penggajian yang berbasis kinerja. Terwujudnya sistem dan berkembangnya penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional dan prosedur (SOP) dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat. Terwujudnya penerapan standarisasi terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha

9. Terwujudnya merit system dalam peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan karier berbasis kinerja dan sistem recruitment by expertise. Terwujudnya tenaga kerja yang bermutu dan berdaya saing melalui peningkatan mutu tenaga kerja lokal.
10. Tertatanya kelembagaan, perangkat dan kewenangan antara pihak keamanan dengan pihak terakit sehingga keamanan masyarakat dapat terjamin, dan terwujudnya rasa aman dilingkungan masyarakat dan kemitraan antara pihak keamanan dan masyarakat.
11. Tersedianya pendidikan unggulan pada sektor Pertanian, keluataan dan Perikanan dan Pariwisata yang sesuai dengan kondisi daerah dan tersedianya pendidikan dasar dan menengah yang murah tapi berkualitas dan mudah diakses serta pendidikan gratis bagi masyarakat miskin atau rawann sosial.

5.1.3. Meningkatkan Daya Saing Daerah Agar Mampu Melaksanakan Pembangunan Dalam Perekonomian Di Tingkat Lokal Papua, Tingkat Nasional Dan Global Khususnya Dalam Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata;

Dalam mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berdaya saing, pembangunan diarahkan untuk mengembangkan Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata yang diarahkan pada potensi perdagangan dan Jasa khususnya untuk Masyarakat Lokal Papua dengan dukungan akomodasi dan transportasi yang baik. Dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang tangguh dengan ciri memiliki fondasi yang kokoh serta mampu secara nyata memberikan kesejahteraan pada masyarakat secara berkeadilan, maka diperlukan strategi dan kebijakan ekonomi dengan arahan sebagai berikut:

1. Meningkatnya produktivitas dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong peningkatan investasi dalam skala besar maupun kecil, Pemanfaatan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan daya saing, modernisasi Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), peningkatan nilai tambah produksi, pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan global untuk mendapatkan input dan jalur pemasaran produksi, pemanfaatan optimal kerjasama strategis bagi kemajuan ekonomi, pengembangan riset sebagai salah satu basis pengambilan keputusan
2. Terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam sistem distribusi yang dapat menjamin kepastian berusaha dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat

mendorong perluasan kesempatan berusaha secara adil termasuk untuk mendapatkan akses pada sumberdaya ekonomi, terwujudnya sistem tata niaga yang kondusif tanpa tumpang tindih regulasi, persaingan yang sehat dan perlindungan yang layak bagi Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) khususnya yang di kelola oleh masyarakat lokal.

3. Pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia lokal secara optimal dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong pengembangan Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata yang diarahkan untuk pengembangan Perdagangan dan jasa Masyarakat Lokal, pengembangan pola kemitraan, pengembangan pola produksi berbasis masyarakat, pengembangan sumber daya energi alternatif yang mendukung pembangunan berkelanjutan
4. Terwujudnya struktur ekonomi yang berbasis ketiga sektor unggulan Kepulauan Yapen yang diiringi mantapnya perdagangan, jasa dan transportasi dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong terarahnya pengembangan SDM dan IPTEK kepada sektor-sektor ekonomi yang ramah lingkungan, pengembangan sentra perdagangan dan penetapan struktur perwilayahan untuk pertanian, Kelautan dan Perikanan dan pariwisata, perkembangan sektor jasa dan sektor lainnya selaras dengan perkembangan ekonomi masyarakat lokal Papua.
5. Terwujudnya pembangunan pertanian berkelanjutan dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong jaminan bagi intensifikasi pengolahan lahan

pertanian, peningkatan ketersediaan sarana produksi dan infrastruktur pendukung bagi peningkatan produktivitas, jaminan ketahanan pangan dan taraf hidup petani yang layak, reorientasi agribisnis disertai sistem informasi pasar dan jaminan mutu produk, pengembangan sentra-sentra agribisnis dalam suatu kawasan terpadu secara luas masyarakat mulai dari level perencanaan sampai dengan pemanfaatannya, penganekaragaman hasil Pertanian

6. Berkembangnya pengusaha daerah dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong prioritas keikutsertaan pengusaha daerah dalam berbagai kegiatan pembangunan, prioritas kepemilikan pengusaha daerah dalam berbagai aset.
7. Seiring dengan pergeseran peranan sektor pertanian ke sektor Kelautan dan Perikanan dan Sektor Pariwisata maka sektor Perdagangan, Angkutan dan Komunikasi harus terus dikembangkan dan ketiga sektor ini merupakan leading sectors dalam perekonomian Kabupaten Kepulauan Yapen.
8. Terpenuhinya pasokan listrik (elektrifikasi) yang memadai, handal dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik kebutuhan rumah tangga, bisnis khususnya dibidang Pertanian, Kelautan dan perikanan dan pariwisata, sosial dan kebutuhan publik lainnya. Terselenggaranya pelayanan air bersih bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan (serui) dan daerah cepat tumbuh serta pengadaan dan pengembangan sarana sumber air bersih bagi kebutuhan masyarakat pedesaan.

9. Tersedianya produk hukum di bidang investasi dan penanaman modal serta perlindungan usaha ekonomi kerakyatan dengan koordinasi bersama semua pihak baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Meningkatnya investasi domestik dan investasi asing serta tersedianya peraturan yang lebih menjamin kepastian hukum bagi pekerja dan pelaku usaha serta didukung dengan penegakan hukum yang berorientasi kepada kepentingan nasional dan daerah.
10. Meningkatnya kualitas dan etos kerja sumber daya manusia dalam semua bidang terutama di sektor unggulan yaitu Pertanian, Kelautan dan perikanan dan pariwisata agar mampu mengikuti perkembangan dan sejajar dengan daerah lain dengan dukungan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki Kabupaten Berkepribadian yang sesuai dengan karakter dan budaya Papua.
11. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja lokal dan tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan meningkatnya sistem informasi pasar kerja. Seluruh perusahaan yang melakukan investasi di Kabupaten Kepulauan Yapen menerapkan sistem perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja sebagaimana diatur oleh Undang-undang dan Organisasi Tenaga Kerja Internasional (ILO).
12. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan Kejuruan dan Lembaga Diklat Ketenagakerjaan yang menfokuskan pembinaan di bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata yang memadai baik melalui kerjasama pelatihan, pengembangan lembaga

dan lainnya. Tersedianya pegawai teknis ketenagakerjaan seperti mediator, instruktur, pengawas tenaga kerja dan lainnya.

5.1.4. Mewujudkan Tata Ruang Dan Infrastruktur Wilayah Yang Handal Dan Terintegrasi Serta Lingkungan Hidup Yang Asri Yang Berorientasi Pada Terwujudnya Masyarakat Kepulauan Yapen Yang Sehat dan Sejahtera

1. Pembangunan prasarana dan sarana ini diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan akomodasi dan transportasi yang berkualitas dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong perbaikan dan pemelihara prasarana dan sarana transportasi dan akomodasi yang telah ada, pembangunan prasarana dan sarana transportasi baru, peningkatan jaringan transportasi inter dan antar moda yang terpadu, peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan dan transportasi.
2. Penyediaan dan Peningkatan Air Bersih dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan cakupan pelayanan air bersih, terpeliharanya sumber air baku secara berkesinambungan dan peningkatan instalasi pengolahan air bersih berbasis pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan dan pembangunan listrik dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kapasitas pelayanan listrik, pemanfaatan sumber energi alternatif, terciptanya sistem pemeliharaan efektif dan efisien.
3. Pemeliharaan dan pembangunan pendidikan dengan

berbagai kebijakan yang dapat mendorong Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan, pembangunan sarana pendidikan, peningkatan kualitas fasilitas pendidikan yang bermuara kepada pemanfaatan sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata.

4. Pemeliharaan dan pembangunan kesehatan dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan, Pembangunan sistem rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas pelayanan yang responsif.
5. Pemeliharaan dan pembangunan telematika dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong Peningkatan cakupan pelayanan dan Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas telematika, peningkatan peranan swasta dalam penyediaan layanan pengembangan dan Peningkatan Perumahan dan Permukiman dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan dan pemeliharaan perumahan dan permukiman, perluasan akses pembiayaan dan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan peningkatan peranan swasta. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang prasarana dan sarana adalah Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Transportasi yang Terpadu untuk mendukung percepatan aktivitas ekonomi di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen.
6. Terimplementasinya sebagian tata ruang secara fungsional wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen

5.1.5. Mewujudkan Rasa Aman, Sentosa, Tentram, dan Damai Melalui Penegakkan Supremasi Hukum Dan Hak Azasi Manusia Serta Proteksi Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat Yang Bersendikan Nilai-nilai Budaya Papua;

1. Pembangunan yang berkeadilan diawali dengan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kepulauan Yapen sebagai salah satu wilayah yang memiliki kawasan Perairan laut yang luas dan memiliki kawasan hutan lindung yang luas pula sehingga para investor dan masyarakat adat yang masih memakai Hukum Adat harus dilindungi dan diatur secara bersama-sama dengan pola kehidupan yang baik dan supremasi hukum yang jelas.
2. Pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan ketentraman dan ketertiban mendasar dengan profesionalitas penyelenggara pemerintahan yang akuntabel, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
3. Terciptanya Toleransi antar Umat Beragama yang berimplikasi pada terwujudnya kerukunan antar umat beragama.
4. Meningkatkan Partisipasi Umat Beragama dalam melaksanakan pembangunan.
5. Pembangunan pemerintahan pada saat ini berorientasi kepada pelayanan publik yang cepat, mudah, murah dan bertanggungjawab serta jelas secara hukum. Sehingga di masa yang akan datang pengembangan sarana publik menjadi prioritas terdepan yang dimulai dari pemerintahan terendah di tingkat desa hingga ke tingkat kabupaten terkhususnya untuk masyarakat asli

Papua dalam penetapan prioritas pembangunan.

6. Pengembangan investasi yang terus berkembang di kabupaten Kepulauan Yapen membutuhkan akses sarana publik yang cukup pula sehingga investor harus dibantu dalam memberikan akses bagi pengembangan bisnis di Kabupaten Kepulauan Yapen. Efek ganda (multiflier effect) dari terpenuhinya sarana dan prasarana publik bagi pengembangan investor adalah terserapnya tenaga kerja yang notabene adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen dan sekitarnya, sehingga perlu kiranya Pemerintah daerah memikirkan solusi terindah untuk kepastian hukum bagi para investor yang hingga sekarang terbentur dengan hukum adat yang mengatakan bahwa Tanah Papua adalah tanah adat.

5.2. SASARAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN

Agar ada tahap-tahap yang jelas menuju tercapainya visi Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut, maka ditetapkan sasaran pembangunan lima tahunan pada bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata sebagai berikut :

BIDANG PERTANIAN :

1. Periode Persiapan (2005 – 2010)

Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai Pusat Pertanian yang berorientasi pada Penguatan masyarakat petani Lokal Berbasis Budaya Papua

2. Periode Pengembangan (2011 – 2015)

Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai Pusat Pertanian yang didukung dengan Penguatan sarana dan Prasarana Pertanian.

3. Periode Penguatan (2016 – 2020)

Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai Pusat Pertanian yang mengadakan kekuatan teknologi ramah lingkungan guna terwujudnya pola-pola pertanian yang maju

4. Periode Pemantapan (2021 – 2025)

Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai Pusat Pertanian yang mampu mengembangkan hingga di pasar Teluk Cendrawasih, Papua, Pulau Papua, Nasional dan Mancanegara dengan didukung Jaringan perdagangan internasional.

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN :

1. Periode Persiapan (2005 – 2010)

Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai Pusat Produksi Kelautan dan Perikanan yang berorientasi pada Penguatan Masyarakat Nelayan Lokal Berbasis Budaya Papua

2. Periode Pengembangan (2011 – 2015)

Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai Pusat Kelautan dan Perikanan baik Tangkap maupun Tangkar yang didukung dengan Penguatan sarana dan Prasarana Pengembangan Produksi Kelautan dan Perikanan

3. Periode Penguatan (2016 – 2020)

Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai Pusat Produksi Kelautan dan Perikanan yang mengadakan kekuatan teknologi ramah lingkungan guna terwujudnya pola-pola Pengembangan Produksi Kelautan dan Perikanan yang maju

4. Periode Pemantapan (2021 – 2025)

Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai Pusat Produksi Kelautan dan Perikanan yang mampu mengembangkan hingga di pasar Teluk Cendrawasih, Papua, Pulau Papua, Nasional dan

LAPORAN AKHIR

Mancanegara dengan didukung Jaringan perdagangan internasional

BIDANG PARIWISATA :

1. Periode Persiapan (2005 – 2010)

Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai Pusat Pariwisata berbasis budaya Papua dengan dukungan Sumber Daya Lokal Baik Manusia maupun Budaya dan Sumber Daya Alam yang masih Asli.

2. Periode Pengembangan (2011 – 2015)

Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai Pusat Pariwisata berbasis budaya Papua dengan dukungan wisata industri kreatif (kerajinan Tangan) khas Tanah Serui.

3. Periode Penguatan (2016 – 2020)

Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai Pusat Pariwisata berbasis Budaya Papua dengan dukungan Sarana dan Prasarana yang memadai dan sistem informasi manajemen kepariwisataan yang Inovatif.

4. Periode Pemantapan (2021 – 2025)

Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai pusat pariwisata berbasis Budaya Papua dengan dukungan jaringan market Regional, nasional dan Internasional

Selanjutnya Sasaran Pembangunan Lima Tahunan ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan tahapan tersebut di atas.

1. Skenario penyusunan Visi pada RPJMD ke-1 (2005-2010) tidak jauh dari sasaran:

”Terwujudnya Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai Pusat Pertanian yang berorientasi pada Penguatan masyarakat petani Lokal, Pusat Produksi Kelautan dan Perikanan yang berorientasi pada Penguatan Masyarakat Nelayan Lokal dan sebagai Pusat Pariwisata berbasis budaya Papua dengan dukungan Sumber Daya Lokal Baik Manusia maupun Budaya dan Sumber Daya Alam yang masih Asli.

Indikator Pencapaian Keberhasilan :

Periode ini menjadi periode awal dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah sehingga indikator pencapaian keberhasilan hanyalah berupa pemaparan hasil-hasil kegiatan pembangunan pada Tahun 2005 hingga 2010 dengan harapan akan menjadi kelanjutan pada periode perencanaan pembangunan selanjutnya, namun keberhasilan tersebut akan dipandang sebagai alat ukur untuk konfirmasi dasar kegiatan keseharian pemerintahan dan pembangunan seperti :

- a. Tersusunnya Produk Hukum (Perda) yang mengatur tentang Kewenangan/urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kepulauan Yapen menurut PP Nomor 38 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
- b. Tersusunnya Produk Hukum (Perda) yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan pembangunan Nasional
- c. Tersusunnya Produk Hukum (Perda) yang mengatur

- tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kabupaten Kepulauan Yapen yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007
- d. Tersusunnya Produk Hukum (Perda) yang mengatur tentang Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD
 - e. Tersusunnya Produk Hukum (Perda) yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Kepulauan Yapen
 - f. Tersusunnya Produk Hukum (Perda) yang Mengatur tentang Pajak dan Retribusi di Kabupaten Kepulauan Yapen
 - g. Tersusunnya Produk Hukum (Perda) yang mengatur tentang Mekanisme penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) di Kabupaten Kepulauan Yapen
 - h. Tersusunnya Produk Hukum (Perda) teknis yang mengatur tentang Hubungan Kerja Bupati dan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Satuan Kerja Perangkat Daerah baik Unsur Staf, Lini maupun Auxiliary, Kepegawaian, Keuangan, Aset, Kecamatan, Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - i. Tersusunnya Produk Hukum (Perda) teknis yang mengatur tentang Pengembangan Aparatur baik Grand Design Penataan dan Pengembangan Daerah otonom, Grand Design Penataan dan Pengembangan Aparatur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja Pgeawai dan

Analisis pemberian Tunjangan/Insentif berbasis Kinerja

Produk hukum diatas menjadi payung awal bagi Pemerintah Daerah dan Seluruh Masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mewujudkan visi pembangunan diatas, karena konsep awal untuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat Kepulauan Yapen melalui Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata adalah Penguatan Tingkat Sumber daya Manusia yang tinggal di Kabupaten Kepulauan Yapen, karena apabila Investor masuk maka akan cepat berkembang ketiga sektor diatas sehingga menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen agar mengubah pola pikir yang ada saat ini bahwa *"Masyarakat Kepulauan Yapen Yang Selama Ini Hanya Menjadi Penonton, Mulai Sekarang Harus Menjadi Pemain Dalam Setiap Pengembangan Ekonomi pada sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan pariwisata Yang Ada Di Kabupaten Kepulauan Yapen Yaitu Dengan Memulai Komitmen Mendirikan Pusat-Pusat Pendidikan Dasar, Menengah, Atas/Kejuruan Dan Mungkin Perguruan Tinggi Pada Sektor-Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan pariwisata Yang Ada Dan Akan Di Bangun Di Kabupaten Kepulauan Yapen"*.

Sejalan dengan itu ekonomi yang kuat akan mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga diharapkan bahwa kekuatan selanjutnya yang akan dikembangkan oleh pemerintah Kepulauan Yapen pada sektor perdagangan dan jasa yang mendukung pengembangan ketiga sektor diatas guna menjadi acuan pembangunan selanjutnya. Jika diperhatikan dari kaca mata posisi Kabupaten Kepulauan Yapen yang menjadi Kota

Transit bagi Kabupaten Waropen dan Kabupaten Membramo Raya dan menjadi jalur pelayaran nasional trans Timur dan Barat, maka mau tidak mau Kepulauan Yapen pasti menerima imbas adanya pola perdagangan bebas sehingga diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dan DPRD harus mulai memiliki pemikiran yang komprehensif dalam menghadapi perdagangan bebas sehingga dalam penyusunan produk hukum/kebijakan daerah (peraturan daerah) yang terkesan berorientasi pada pengembangan pasar bebas dan akhirnya mematikan pedagang kecil yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen terkhusus untuk masyarakat Lokal, harus dikaji ulang dan diputuskan secara bersama-sama, namun jika di lihat dari kaca mata yang mengikuti isi dari visi RPJPD diatas maka mau tidak mau pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen harus membuat produk hukum yang berpihak kepada masyarakat dan melakukan program-program yang melakukan revitalisasi pasar-pasar desa (kampung) dan Distrik (kecamatan) agar Visi yang dituliskan diatas dapat terlaksana karena sektor jasa dan perdagangan di Kepulauan Yapen harus diperhatikan, sehingga Sektor Perdagangan yang akan dikembangkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen haruslah berbasis pada masyarakat lokal.

Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata harus dibungkus dengan baik oleh sektor Perdagangan sehingga perlu segera diperhatikan dan dikordinasikan terkhusus lagi di sektor Pariwisata yang akan dicoba dijual dan menjadi salah satu ikon dari Visi Kabupaten Kepulauan Yapen. Pariwisata di Kepulauan Yapen pada dasarnya dalam pengelolaannya sama dengan pariwisata yang dikembangkan di

Daerah lain, namun begitu setiap daerah juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain dan ini menjadi kekuatan yang akan dikembangkan oleh Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pariwisata di Kepulauan Yapen memiliki potensi pengembangan pada kekuatan Budaya asli Papua khususnya Budaya Pesisir Pantai dan keindahan alam pada hutan cagar alam yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Yapen, kondisi ini yang menunjukkan bahwa Kepulauan Yapen dapat menjadi salah satu tujuan pariwisata baik wisata sejarah, Wisata rohani, Wisata Budaya dan Wisata Alam. Kekuatan sumber daya alam seperti pengembangan area wisata pantai di Kabupaten Kepulauan Yapen yang wilayahnya langsung Berhadapan dengan laut lambat laun dapat dikembangkan dan dipublikasikan oleh pemerintah daerah Bekerjasama dengan Pihak Swasta.

Pertanian di Kepulauan Yapen pada saat ini masih tradisional dan masih berfokus paada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Melihat kondisi ini mau tidak mau pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen harus bekerja keras untuk memperjuangkan masyarakat petani yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen sebelum lanjut ke pembangunan pertanian lanjutan, karena pergeseran pola tanam pada masyarakat lokal Papua dapat berakibat fatal seperti yang pernah terjadi di Kabupaten Yahukimo.

2. Skenario penyusunan Visi pada RPJMD ke-2 (2011-2015) tidak jauh dari sasaran:

”Terwujudnya Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai Pusat Pertanian yang didukung dengan Penguatan sarana dan Prasarana Pertanian, Pusat Kelautan dan Perikanan baik Tangkap maupun Tangkar yang didukung dengan Penguatan sarana dan Prasarana Pengembangan Produksi, Pusat Pariwisata berbasis budaya Papua dengan dukungan wisata industri kreatif (kerajinan Tangan) khas Tanah Serui”.

Indikator Pencapaian Keberhasilan :

Berlandaskan hasil dari pelaksanaan, pencapaian dan kondisi serta sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2 ditujukan untuk memantapkan penataan kembali penyelenggaraan pemerintahan dengan menekankan kepada peningkatan sumberdaya manusia yang mampu mengelola sumberdaya alam dengan menyiapkan pemanfaatan ilmu dan teknologi guna meningkatkan daya saing daerah dalam skala regional, nasional dan global. Periode ini diprioritaskan untuk melanjutkan penataan organisasi pemerintahan daerah, memantapkan sistem, membina dan meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan agar lebih mampu menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Semakin efektifnya lembaga pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan publik. Tersedianya perangkat pemerintahan yang didukung dengan jumlah pegawai yang memadai serta tenaga guru dan paramedis dan pelayanan lainnya yang seimbang. Meningkatkan karakter dan budaya

masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen ditandai dengan semakin meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai agama di seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya kesadaran dan disiplin masyarakat di bidang hukum dan perundang-undangan; meningkatnya etos kerja dan kinerja dalam melaksanakan pembangunan oleh masyarakat dan pemerintah. Semakin meningkatnya pelaksanaan demokrasi yang beretika dan santun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin efektif menuju masyarakat sipil yang madani. Pelayanan publik diberikan dengan lebih baik sesuai dengan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan sebagai pengayom dan pelayan dengan dukungan peningkatan kesejahteraan yang proporsional dan adil. Berkembangnya kesadaran dan disiplin masyarakat dalam memanfaatkan rencana tata ruang yang sudah dibuat yang ditandai dengan semakin tertatanya pembangunan perkotaan dan pedesaan dengan prinsip saling melengkapi dan mendukung sebagai suatu sistem wilayah pembangunan.

Pendidikan dan pembinaan nilai agama dan budaya terus ditingkatkan baik bentuk dan metodenya pada semua jenjang pendidikan dan lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan. Pendidikan akhlak, budi pekerti dan budaya daerah (Budaya Papua) tidak saja dimasukkan dalam kurikulum pendidikan yang bersifat muatan lokal pada pendidikan dasar (SD dan SMP) tapi juga pendidikan menengah (SMA/SMK). Terus memberdayakan peran dan fungsi lembaga keagamaan dan lembaga adat dan kesenian agar kesadaran masyarakat terhadap pengembangan kesenian tradisional dan aset kebudayaan tetap terjaga.

Lembaga agama dan organisasi masyarakat termasuk sanggar seni dan budaya terus ditingkatkan pembinaannya, sehingga masyarakat semakin memiliki kesadaran akan akar budayanya. Terus melakukan pendataan terhadap berbagai peninggalan budaya Papua baik berupa peninggalan sejarah maupun dalam bentuk naskah tulisan yang terdapat di daerah Kabupaten Kepulauan Yapen maupun di tempat lain. Mencegah agar peninggalan budaya Papua tidak punah dan hilang ditelan masa dan dapat melakukan revitalisasi peninggalan budaya Papua yang mengalami kerusakan dan kepunahan.

Jiwa keteladanan di masyarakat terus ditingkatkan khususnya pemberian penghargaan kepada tokoh dan masyarakat yang berprestasi. Peningkatan kualitas pemuda sebagai sumber daya manusia yang produktif, berdaya saing dan berwawasan kebangsaan terus dilakukan baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun dengan menyediakan fasilitas olahraga serta pemberian beasiswa bagi yang berprestasi dan atau dari keluarga yang tidak mampu.

Pelatihan relawan inti penanggulangan bencana dan kesadaran bela negara terus ditingkatkan, menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antar intelejen dengan pimpinan daerah terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kerukunan beragama, persatuan dan kesatuan bangsa.

Terus menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan kompetitif dengan membangun infrastruktur wilayah yang lengkap dan modern dan mewujudkan peraturan kebijakan yang menjamin keamanan untuk kepentingan investasi. Semakin meningkatnya pelaksanaan peraturan perundang-

undangan bidang politik dan hukum dalam rangka terciptanya tata pemerintahan yang baik dan dasar hukum untuk memperkuat kelembagaan demokrasi yang semakin berkembang.

Terus meningkatkan dan menyediakan sarana pendukung di pusat pemerintahan yang representatif. Meningkatkan kualitas dan jumlah fasilitas kantor untuk mendukung pelayanan publik dan akselerasi perekonomian daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terus dilakukan reward and punishment di lingkungan aparatur sehingga pelayanan publik dapat meningkat dan sudah melaksanakan SPM dan SOP untuk setiap jenis pelayanan. Kinerja sudah mulai diterapkan dengan disertai penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur pemda yang didahului dengan penetapan standar kinerja utama.

Dalam bidang investasi dan perekonomian terus melakukan pembenahan pelayanan dengan menyempurnakan proses keimigrasian, pabean, perijinan, pajak dan tenaga kerja. Kepastian hukum terus ditingkatkan terutama bagi para investor dan terus memberikan insentif kepada investor yang mau berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Melaksanakan peraturan kebijakan investasi yang menarik dalam upaya mewujudkan Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal, regional, dan nasional.

Berkembangnya pusat-pusat pengembangan kawasan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah sebagai bagian penting bagi kepastian pengembangan potensi wilayah. Meningkatkan infrastruktur pendukung investasi dan mengoptimalkan pusat pelayanan satu atap

bidang pelayanan perizinan investasi disertai dengan dukungan perda tentang investasi.

Semakin berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menumbuhkembangkan kegiatan Pertanian, kelautan dan perikanan dan Pariwisata berbasis Budaya Papua. Melanjutkan upaya mewujudkan Sektor Pertanian, kelautan dan perikanan dan Pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan pertumbuhan ekonomi, dan peran koperasi terus ditingkatkan dengan pelaku UKM yang berkualitas dan sentra-sentra UKM yang mandiri, tangguh dan berorientasi pada pasar global dan mewujudkan pariwisata yang mendukung ekonomi daerah serta didukung oleh pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur

Penanganan penyakit sosial seperti prostitusi dan perdagangan orang menjadi perhatian, dengan mengharapkan partisipasi masyarakat melalui lembaga agama, organisasi masyarakat, keluarga serta lingkungan pendidikan.

Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen terus berkembang dan maju yang ditandai dengan semakin meningkatnya PDRB Kabupaten Kepulauan Yapen serta semakin meningkatnya peranan sumberdaya manusia dalam mengelola sumberdaya bagi kepentingan pembangunan. Semakin berkembangnya pembangunan infrastruktur ekonomi baik transportasi, perhubungan, kelistrikan, air bersih, telematika dan pemukiman perumahan.. Daya saing Kabupaten Kepulauan Yapen semakin meningkat yang dilihat semakin berperannya tenaga kerja daerah, dunia usaha dan pemerintah daerah pergaulan ekonomi regional, nasional dan internasional. Peningkatan kemajuan pembangunan didukung

oleh pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan pelestarian lingkungan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi dan rehabilitasi lingkungan. Sumberdaya hayati tidak dieksploitasi dengan sembarangan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing daerah.

Melaksanakan pembangunan dengan berdasarkan perencanaan daerah, baik jangka panjang maupun rencana tata ruang. Rencana tata ruang sudah menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan periode berikutnya. Terus melakukan penataan organisasi pemerintahan daerah, memfungsikan sistem, membina dan mengembangkan kemampuan aparatur pemerintahan yang mampu menjalankan tugas-tugas perencanaan, pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam bidang Pertanian, kelautan dan perikanan dan Pariwisata terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar mandiri dan kesejahteraan pelaku usaha ekonomi kecil dan masyarakat mulai berkembang. Pengembangan sistem usaha dan kemitraan antara penduduk lokal dengan pengusaha-pengusaha swasta perlu terus ditingkatkan. Dalam bidang usaha mikro dan kecil terus dilakukan penataan, pembinaan dan pemberdayaan UMKM Produksi Hasil Pertanian, kelautan dan perikanan secara konsisten dan berkelanjutan. Data potensi Sumber Daya Alam tersedia dengan baik dan dapat diakses dengan mudah sehingga mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui semua sektor.

Dalam bidang pertambangan perlu disusun Perda yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan umum dan Perda air tanah yang disejalankan dengan optimalisasi potensi

sumber daya mineral, geologi dan air tanah yang terintegrasi. Meningkatkan upaya pemantauan dan evaluasi perusahaan pertambangan dan pemanfaatan air tanah termasuk kerjasama dan koordinasi dengan instansi dan stakeholder lainnya dalam pengawasan. Terus dilakukan optimalisasi pengawasan dan monitoring usaha pertambangan dan air tanah baik dalam bentuk produksi air mineral produk lokal. Dalam bidang SDA non-migas dan migas terus diupayakan peningkatannya sehingga keuangan daerah terus meningkat. Terus melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan migas dan program community development secara efektif dan berkesinambungan.

Dalam sektor sumberdaya energi perlu dipikirkan pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga listrik nasional agar dapat mendukung pertumbuhan sektor lainnya di Kabupaten Kepulauan Yapen, dan tidak menutup kemungkinan bidang Industri baik Industri Kecil, sedang dan Besar dengan menggunakan inovasi dan kreatifitas ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dibidang pariwisata, terus meningkatkan sarana dan prasarana dan jenis wisata yang akan dikembangkan dan selanjutnya dibina serta diberdayakan tenaga-tenaga pariwisata lokal agar lebih profesional dan memiliki nilai kompetensi yang tinggi dan pro pembangunan daerah dengan pendidikan dan pelatihan secara terus menerus. Terus dilakukan promosi wisata di Kabupaten Kepulauan Yapen ke negara sumber wisatawan potensial luar negeri maupun dalam negeri dengan metode yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan. Meningkatkan kerja sama promosi dan pembinaan

kepada pelaku jasa pariwisata baik dalam dan luar negeri
Dibidang infrastruktur, terus membangun dan menyediakan infrastruktur dasar dengan cara menyediakan dan meningkatkan sarana parasarana pemerintahan dan aparatur pemerintah agar pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip manajemen modern.

Dalam bidang informatika dan telekomunikasi, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sudah mampu memberikan manfaat bagi penerapan e-government guna melanjutkan implementasi atas sistem aplikasi dan telematika lainnya penguasaan telekomunikasi melalui layanan internet, web, hp dan sebagainya hruas terus ditingkatkan terutama bagi kegiatan yang berhubungan dengan peningkian akses informasi dari dan ke luar daerah. Implementasi telekomunikasi dan pelayanan pos lainnya terus diperluas baik jaringan telekomunikasi dan pelayanan pos antar wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat terjalin dengan baik.

Perhatian dibidang pendidikan juga dititikberatkan pada peningkatan kualitas tenaga guru melalui pendidikan dan latihan yang terprogram dan berkelanjutan sesuai dengan standar. Pelaksanaan pendidikan dasar sembilan tahun tetap dijalankan sambil menyiapkan program wajib belajar 12 tahun. Pembangunan pendidikan tetap memprioritaskan pada peningkatan APK SMP dan MTs, APK SMA/SMK/MA, APK pendidikan tinggi dan mutu pendidikan serta sertifikasi guru. Fasilitas pendidikan terus ditingkatkan baik jumlah dan kualitasnya secara merata di seluruh wilayah bagi semua jenjang pendidikan termasuk melanjutkan pemberian beasiswa

bagi keluarga yang tidak mampu. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sudah memanfaatkan perpustakaan sebagai bagian pendidikan yang terintegrasi. Menerapkan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) di seluruh jenis dan jenjang sekolah terus ditingkatkan, sejalan dengan terus meningkatkan jumlah guru yang memenuhi standar nasional dan bersertifikasi.

Pembangunan pelabuhan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen baik pelabuhan Utama maupun pelabuhan perintis merupakan bagian dari sistem transportasi antar wilayah. Diharapkan dalam periode ini Kabupaten Kepulauan Yapen harus memiliki dokumen tatanan transportasi wilayah trans Papua untuk Kepulauan Yapen agar dokumen ini dapat menjadi sumber perencanaan dan diharapkan dapat masuk dan menjadi agenda bagi Provinsi Papua dan pemerintah Pusat sehingga nantinya menjadi perhatian dan perlu mendapat kebijakan pemberian bantuan dana penguatan sistem transportasi darat/laut/udara di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam bidang transportasi jalan mulai menyediakan fasilitas sarana lalu lintas angkutan jalan dan membangun terminal AKDP di Kabupaten Kepulauan Yapen serta menyediakan angkutan Laut yang murah dan efisien terutama bagi pekerja dan anak sekolah antar wilayah di Kepulauan Yapen.

Dalam bidang peningkatan derajat kesehatan masyarakat terus dilakukan pengendalian penyakit bersumber dari binatang dan menular langsung serta meningkatkan terus upaya pencegahannya yang disejalkan dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas. Menjalankan Sistem informasi kesehatan secara bertahap di Puskesmas, Rumah Sakit Kabupaten/Kota, RS Provinsi, Dinas Kesehatan

Kabupaten/kota dan Provinsi secara berjenjang.

Dalam bidang perdagangan terus dilakukan upaya peningkatan daya saing produk dan pelaku usaha, disertai peningkatan pengawasan barang dan jasa dan peningkatan standar dan kualitas produksi dalam negeri dengan pemanfaatan teknologi dan pembinaan pengembangan ekonomi kreatif. Terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dan penguatan daya saing ekspor.

Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen terus meningkat yang ditandai dengan semakin meningkatnya indikator pembangunan manusia seperti meningkatnya pendapatan dan daya beli, menurunnya angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin; menurunnya jumlah dan tingkat pengangguran dengan semakin berkembangnya lapangan kerja dan meningkatnya peluang usaha masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat terus meningkat sejalan dengan semakin baiknya penyelenggaraan pendidikan dan manajemen pengelolaan sekolah dan kurikulum yang sesuai dengan potensi lokal. Meningkatnya kesejahteraan sejalan dengan semakin terkendalinya pertumbuhan penduduk yang memberikan peluang lebih baik bagi peningkatan pelayanan dasar masyarakat; menurunnya kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar kawasan dan daerah; semakin meningkatnya hasil pembangunan dari perkembangan Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Lokal, Regional, dan nasional. Meningkatnya kesejahteraan ditandai dengan semakin tingginya usia harapan hidup yang didukung dengan semakin meningkatnya pelayanan kesehatan dan peningkatan gizi anak dan ibu hamil. Tersedianya jaminan kesejahteraan sosial yang ditandai

dengan semakin meningkatnya pemanfaatan asuransi kesehatan bagi penduduk.

Terus menjamin tersedianya kebutuhan bahan pokok dengan harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara pengadaan dan pendistribusian bahan kebutuhan pokok yang terencana. Dalam bidang sarana prasarana dasar, terus meningkatkan perhatian terhadap pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk melayani kebutuhan masyarakat diseluruh wilayah.

Di bidang kesehatan terus membangun sarana dan prasarana kesehatan dan mulai melaksanakan kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat miskin secara murah, mudah dan gratis yang pelaksanaannya dibebankan dan ditanggung pembiayaannya secara bersama antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan pihak-pihak lainnya. Terus menyediakan tenaga guru dan medis yang merata di semua jenjang pendidikan dan pusat pelayanan kesehatan.

Terus memperhatikan pembangunan berwawasan lingkungan dan menumbuhkan kawasan ekonomi khusus serta melakukan pengawasan secara intensif terhadap pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Mengembangkan kawasan yang memiliki potensi dan terus melakukan pembinaan masyarakat Kepulauan Yapen agar semakin berdaya dalam mengembangkan kemampuannya.

Di bidang Perdagangan dan Pariwisata mulai memanfaatkan potensi dan disejalankan pembinaannya baik dari peralatan, teknologi dan permodalan dan pemasaran hasil. Pembangunan sektor Perdagangan dan Pariwisata dilakukan dengan mengoptimalkan potensi dan terus melakukan pengembangan

potensi dan pengawasan yang berkelanjutan dan terkoordinasi dan disejalankan dengan pembangunan infrastruktur perekonomian.

Dalam bidang pembangunan manusia terus meningkatkan umur harapan hidup seluruh penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi 70 tahun termasuk menurunkan angka kematian bayi (AKB) berkurang menjadi 15/1.000 kelahiran hidup, angka kematian Ibu (AKI) berkurang menjadi 75/100.000 kelahiran hidup dan menurunkan status gizi Buruk menjadi 1-2%.

Terus meningkatkan kualitas dan jumlah sarana dan prasarana kesehatan dan membuat suatu sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang murah, mudah dan gratis bagi keluarga miskin dan rawan sosial dan pelaksanaannya dibebankan dan ditanggung pembiayaannya bersama pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten Kepulauan Yapen serta pihak lainnya. Menyediakan tenaga guru dan medis yang merata di semua jenjang pendidikan dan pusat pelayanan kesehatan.

Terus meningkatkan pelayanan perumahan dan penataan lingkungan pemukiman khususnya di perkotaan dan perdesaan yang tertinggal dan masuk kategori tertinggal dan slum dengan program percepatan pembangunan Kampung (desa) dan program pengembangan Distrik (kecamatan). Meningkatkan penurunan persentase dan jumlah keluarga miskin dan sangat miskin dengan perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi. Dalam bidang kelistrikan dan energi terus melaksanakan upaya pemenuhan kebutuhan listrik berdasarkan pemetaan kebutuhan listrik, meningkatkan cakupan pelayanan listrik

terutama di daerah yang cepat tumbuh, dengan meningkatkan sarana dan prasarana pembangkit listrik dan bekerjasama dengan semua pihak.

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan melaksanakan Standar Baku Mutu Lingkungan Hidup dan pengendaliannya serta didukung dengan semakin meningkat dan berkembangnya infrastruktur lingkungan hidup. Terus meningkatkan peran serta stakeholders (Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat) dalam pengendalian dampak lingkungan dan meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pengelola lingkungan dalam pengendalian dampak lingkungan.

1. Skenario penyusunan Visi pada RPJMD ke-3 (2016-2020) tidak jauh dari sasaran:

”Terwujudnya Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai Pusat Pertanian yang mengadakan kekuatan teknologi ramah lingkungan guna terwujudnya pola-pola pertanian yang maju, Pusat Produksi Kelautan dan Perikanan yang mengadakan kekuatan teknologi ramah lingkungan guna terwujudnya pola-pola Pengembangan Produksi Kelautan dan Perikanan yang maju dan sebagai Pusat Pariwisata berbasis Budaya Papua dengan dukungan Sarana dan Prasarana yang memadai dan sistem informasi manajemen kepariwisataan yang Inovatif”.

Indikator Pencapaian Keberhasilan :

Berlandaskan pada hasil pelaksanaan, pencapaian dan kondisi dan sebagai kelanjutan dari RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh

di berbagai bidang dengan menekankan kepada peningkatan daya saing ekonomi yang berlandaskan kepada pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berkualitas baik dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus menerus. Pada periode ini diprioritaskan untuk terus melanjutkan penataan, pembinaan dan pengembangan organisasi pemerintahan daerah. Pemerintah dan lembaga pemerintahan mulai menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip penyelenggaraan manajemen modern, baik dalam menjalankan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan publik. Meningkatkan mutu dan kualitas perangkat pemerintahan yang didukung dengan jumlah pegawai yang memadai serta didukung dengan pemakaian teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Sejalan dengan semakin meningkatnya karakter dan budaya masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen terus dilakukan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai agama di seluruh lapisan masyarakat dengan kaderisasi yang terencana. Hukum dan perundang-undangan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan hubungan antar daerah. Disiplin sudah mulai menjadi bagian budaya daerah yang maju dan menjadi kebanggaan masyarakat untuk menjadi tertib dan berbudaya. Pelayanan publik semakin baik dan maju dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi dan peningkatan peran masyarakat sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sudah berorientasi kepada standar pelayanan dan kinerja, sehingga mampu mendukung daya saing daerah sejalan dengan

semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan aparaturnya pemerintah daerah.

Pengamalan nilai agama, hukum dan moral serta budaya terus ditingkatkan pada semua lapisan masyarakat baik lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Pendidikan akhlak dan budaya sudah mulai masuk ke perguruan tinggi dengan tetap memantapkan kurikulum pendidikan dasar (SD dan SMP) dan pendidikan menengah (SMA/SMK). Lembaga keagamaan dan organisasi sosial kemasyarakatan semakin memiliki peran dalam memantapkan moral dan akhlak masyarakat. Peninggalan budaya dapat dicegah kemusnahannya dengan membuat manuskrip dan salinan digital serta alat peraga dalam museum daerah. Peningkatan peran museum sejarah terus ditingkatkan sebagai wadah pembelajaran bagi generasi muda.

Peningkatan kualitas pemuda terus dilakukan untuk mewujudkan pemuda yang produktif, berdaya saing dan berwawasan kebangsaan serta berakhlak dengan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan maupun dengan meningkatkan kualitas sarana pemebinaan dan pengembangan bakat dan keterampilan.

Kesadaran bela negara semakin meningkat, dan pelatihan relawan inti penanggulangan bencana terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nasionalisme dan kerukunan beragama, persatuan dan kesatuan bangsa.

Lingkungan usaha yang kondusif dan kompetitif terus dipelihara dan ditingkatkan terutama dengan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang lengkap

dan modern dan kebijakan menjamin keamanan untuk kepentingan investasi. Semakin meningkatnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang politik dan hukum dalam rangka terciptanya tata pemerintahan yang lebih baik sebagai dasar meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada pemerintah.

Terus meningkatkan kualitas dan menyediakan sarana pendukung di pusat pemerintahan yang lebih maju dan modern. Meningkatkan kualitas dan fasilitas kantor pelayanan publik yang lebih maju, efisien dan nyaman.

Reward and punishment menjadi bagian dari pelaksanaan manajemen pemerintahan yang modern didukung dengan penerapan standar kinerja di lingkungan aparatur sehingga pelayanan publik berdasarkan SPM dan SOP untuk setiap jenis pelayanan. Penilaian kinerja diterapkan dengan disertai dengan sistem penggajian yang rasional dan proporsional aparatur pemerintah daerah.

Terus membangun dan menyediakan infrastruktur dasar dengan cara menyediakan dan meningkatkan sarana parasarana pemerintahan dan aparatur pemerintah agar pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip manajemen modern.

Berkembangnya pusat-pusat pengembangan kawasan yang sudah tertuang dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dengan disertai upaya peninjauan terhadap kebijakan yang sudah ada. Terus meningkatkan infrastruktur pendukung investasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan termasuk mengoptimalkan pusat pelayanan satu atap bidang pelayanan atau mungkin menjadi satu pintu yang lebih unggul dan Vital.

Semakin berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan tetap menumbuhkembangkan kegiatan pertanian, kelautan dan perikanan dan Pariwisata. Mewujudkan pertanian, kelautan dan perikanan dan Pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan pertumbuhan ekonomi, dan peran koperasi ditingkatkan sebagai pelaku UKM dan mandiri, tangguh dan berorientasi pada pasar global.

Penyakit sosial seperti prostitusi dan perdagangan orang terus dikurangi, dengan melibatkan semua pihak baik melalui lembaga agama, organisasi masyarakat, keluarga serta lingkungan pendidikan karena hal ini bertentangan dengan nilai agama dan moral serta merusak citra daerah.

Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen maju dan terus berkembang yang ditandai dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita penduduk. PDRB yang meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya peran dan kontribusi lapangan usaha sektor jasa dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Kepulauan Yapen. Peranan sumberdaya manusia semakin meningkat dalam mengelola sumberdaya bagi kepentingan pembangunan dalam rangka mempersiapkan untuk mengelola sendiri dengan diawali transfer teknologi. Semakin meningkatnya kualitas dan sistem jaringan infrastruktur ekonomi baik transportasi, perhubungan, kelistrikan, air bersih, telematika dan pemukiman perumahan. Daya saing Kabupaten Kepulauan Yapen semakin kuat dan kompetitif yang ditandai dengan semakin terintegrasinya pembangunan semua sektor maupun antar daerah. Peningkatan kemajuan pembangunan terus didukung oleh pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan pengelolaan

sumber daya alam yang bijaksana dan pelestarian lingkungan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi dan rehabilitasi lingkungan.

Terus melakukan pembangunan berdasarkan perencanaan yang terarah dan sistematis, dengan memanfaatkan data dan kemajuan teknologi informasi. Pengendalian pembangunan berdasarkan sistem pengendalian yang terpadu dan terintegrasi dalam mewujudkan pencapaian kinerja pembangunan yang terfokus. Pembangunan jangka menengah sudah memperhatikan rencana jangka panjang maupun rencana tata ruang. Rencana tata ruang sudah menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan penataan kelembagaan dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam bidang industri terus ditingkatkan kualitas dan kuantitas industri kecil agar mandiri dan pelaku usaha ekonomi kecil dan masyarakat terus berkembang baik jumlah maupun peranannya. Terus mengembangkan sistem usaha dan kemitraan antara penduduk lokal dengan perusahaan dan usaha mikro dan kecil ditata, dibina dan diberdayakan secara berkelanjutan.

Perda pengelolaan pertambangan umum dan Perda air tanah yang sudah tersusun sebelumnya diharapkan dapat berjalan efektif dan dapat memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan daerah dengan optimalisasi potensi sumber daya mineral, geologi dan air tanah yang terintegrasi. Terus meningkatkan pemantauan dan evaluasi perusahaan pertambangan dan pemanfaatan air tanah termasuk kerjasama dan koordinasi dengan instansi dan stakeholders lainnya

dalam pengawasan. Dalam bidang SDA migas terus diupayakan peningkatan DBH dari hasil minyak dan gas sehingga keuangan daerah terus meningkat, disejalankan dengan memberikan peran BUMD dalam mengelola sumberdaya alam di daerah. Terus melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan migas dan program community development secara efektif dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi dan perkembangan sistem hubungan komunikasi organisasi.

Dalam sektor sumberdaya energi, sumberdaya listrik dapat terus terpelihara dan ditingkatkan kemampuannya untuk mendukung industri sumberdaya mineral skala menengah dan besar, disamping skala kecil yang sudah terbangun pada periode RPJM Daerah ke-1 dan ke-2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dari industri sumberdaya mineral untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing daerah dalam skala regional, nasional dan global.

Perda pengelolaan pertambangan sumberdaya mineral dan perda air tanah diharapkan dapat berjalan efektif dan dapat memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan daerah dengan optimalisasi potensi sumberdaya mineral, geologi dan air tanah yang terintegrasi. Terus meningkatkan pemantauan dan evaluasi perusahaan pertambangan sumberdaya mineral dan pemanfaatan air tanah dengan kerjasama dan koordinasi bersama instansi dan stakeholders lainnya dalam pengawasan. Konservasi sumberdaya mineral (memperpanjang usia penambangan sumberdaya mineral), meningkatkan nilai tambah ekonomi sumberdaya mineral, menambah lapangan kerja, kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional mulai dirasakan. Dalam bidang

sumberdaya alam migas terus diupayakan peningkatan sehingga keuangan daerah terus meningkat. Peran BUMD ditingkatkan dalam mengelola sumberdaya mineral di daerah baik penambangan maupun pengolahan menjadi bahan industri berbasis sumberdaya mineral. Terus melakukan evaluasi dan dan monitoring kegiatan eksplorasi dan produksi migas dan program pengembangan masyarakat secara efektif dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi dan perkembangan sistem hubungan komunikasi organisasi.

Sebagai implementasi dari pengembangan pertanian berkelanjutan maka perlu disusun konsep perwilayahan komoditas pertanian tanaman pangan menuju produk pertanian dengan komoditas unggulan sesuai dengan kondisi fisik lingkungan setempat. Untuk mendukung program pengembangan sektor pertanian diikuti dengan pemberdayaan masyarakat pertanian dan lembaga-lembaga pertanian yang sesuai seperti pembinaan petugas lapangan, lembaga keuangan mikro. Di bagian lain upaya diversifikasi komoditas dan diversifikasi produk untuk pasar domestik dan ekspor. Oleh karena itu peningkatan kapasitas dan kinerja aparat pertanian perlu ditingkatkan.

Dibidang pariwisata, terus meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di kabupaten dan membina serta memberdayakan tenaga pariwisata yang profesional dan memiliki nilai kompetensi yang tinggi dan pro pembangunan daerah dengan pendidikan dan pelatihan secara terus menerus. Terus dilakukan promosi wisata Kepulauan Yapen dan Papua ke negara sumber wisatawan potensial luar negeri maupun dalam negeri dengan metode yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan. Meningkatkan kerja sama promosi dan

pembinaan kepada pelaku jasa pariwisata baik dalam dan luar negeri

Dalam bidang informatika dan telekomunikasi, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sudah mampu memberikan manfaat bagi penerapan e-government. melanjutkan implementasi atas sistem aplikasi dan telematika lainnya. Penguasaan telekomunikasi melalui layanan internet, web, hp dan sebagainya terus meningkat terutama bagi kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan akses informasi dari dan ke luar daerah. Implementasi telekomunikasi dan pelayanan pos lainnya terus diperluas baik jaringan telekomunikasi dan pelayanan pos antar wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen terjalin dengan baik.

Perhatian di bidang pendidikan tetap dititikberatkan pada peningkatan kualitas tenaga guru melalui pendidikan dan latihan sesuai dengan standar. Pelaksanaan pendidikan dasar sembilan tahun tetap dijalankan sambil melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Pembangunan pendidikan tetap memprioritaskan pada peningkatan APM SMP dan MTs, APK SMA/SMK/MA, APK pendidikan tinggi dan mutu pendidikan serta sertifikasi guru. Fasilitas pendidikan terus ditingkatkan baik jumlah dan kualitasnya secara merata di seluruh wilayah terutama daerah yang cepat tumbuh bagi semua jenjang pendidikan termasuk melanjutkan pemberian beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu.

Terus menata organisasi dan kelembagaan balai latihan kerja dimulai dengan melengkapi sarana dan prasarana latihan kerja, menyediakan sistem informasi ketenagakerjaan berbasis IT, dan konsultasi ketenagakerjaan secara online. Peningkatan status BLK menjadi Pusat Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang

diakui. Melaksanakan peraturan yang komprehensif dibidang ketenagakerjaan dan mengembangkan peningkatan mutu tenaga kerja melalui penyediaan tenaga instruktur kewirausahaan yang profesional dan merencanakan untuk memfungsikan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pembinaan dan pelatihan tenaga kerja. Terus melakukan up grade sarana dan prasarana sejalan dengan terus melakukan pemetaan dan pengembangan potensi unggulan daerah. Melaksanakan peningkatan mutu tenaga kerja serta mulainya upaya untuk menetapkan status BLK dan memfungsikan BLK yang ada. Tersedianya pegawai teknis ketenenagakerjaan (Pengantar Kerja, Mediator, Instruktur, Pengawas Tenaga Kerja) di Kabupaten Kepulauan Yapen dan mulainya disiapkan perencanaan tenaga instruktur kewirausahaan yang profesional. Mulai diupayakan meningkatkan jumlah investor dan ekonomi tumbuh serta tingkat pengangguran berkurang. Dalam bidang usaha ekonomi kecil dan koperasi terus dilakukan pelatihan kewirausahaan terutama disektor yang strategis.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat terus dilakukan baik dengan pengendalian penyakit bersumber dari binatang dan menular langsung maupun terus meningkatkan upaya pencegahannya yang disejalankan dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas. Sistem informasi kesehatan sudah terlaksana dengan baik dalam sistem yang terpadu mulai dari Puskesmas, Rumah Sakit Kabupaten/Kota dan RS Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan Provinsi secara berjenjang. Dalam upaya pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Dalam bidang perdagangan terus dilakukan peningkatan daya saing produk dan pelaku usaha, dengan tetap disertai oleh peningkatan pengawasan barang dan jasa dan peningkatan standar dan kualitas produksi dalam negeri dengan pemanfaatan teknologi dan pembinaan pengembangan ekonomi kreatif.

Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen terus meningkat yang ditandai dengan terus meningkatnya indikator pembangunan manusia seperti meningkatnya pendapatan dan daya beli, menurunnya angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin; menurunnya jumlah dan tingkat pengangguran dengan semakin berkembangnya lapangan kerja dan meningkatnya peluang usaha masyarakat. Pembangunan wilayah terus berkembang sejalan dengan meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat dan ekonomi. Tingkat pendidikan masyarakat terus meningkat sejalan dengan semakin baiknya penyelenggaraan pendidikan dan manajemen pengelolaan sekolah dan kurikulum yang sesuai dengan potensi lokal serta berkembangnya pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi didukung dengan pengembangan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kebutuhan akan listrik dan air bersih semakin meningkat pelayanannya terutama di perkotaan dan daerah yang cepat tumbuh. Pengembangan sumber energi listrik dan sumber air bersih semakin meningkat baik dengan dilaksanakan sendiri maupun dengan kerjasama dengan pihak lain.

Terus menjamin ketahanan pangan dengan menyediakan kebutuhan pokok yang terjangkau baik dengan cara pengadaan, pendistribusian dan pergudangan bahan kebutuhan pokok yang terencana. Sarana prasarana dasar

terus ditingkatkan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk melayani kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah.

Di bidang kesehatan terus membangun sarana dan prasarana kesehatan dan melaksanakan kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat miskin secara murah, mudah dan gratis namun tetap berkualitas yang pelaksanaannya ditanggung bersama antara pemerintah pusat, Kabupaten Kepulauan Yapen dan kabupaten/kota serta pihak lainnya.

Terus memperhatikan pembangunan berwawasan lingkungan dan melakukan pengawasan secara intensif terhadap pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Terus mengembangkan potensi pertanian, kelautan dan perikanan dan Pariwisata dan terus melakukan pembinaan masyarakat agar semakin berdaya dalam mengembangkan kemampuannya dan meningkatkan produktivitasnya. Pembinaan tenaga lokal baik dari peralatan, teknologi dan permodalan dan pemasaran hasil terus dilakukan. Pembangunan dilakukan dengan mengoptimalkan fasilitas yang terpadu, dengan terus melakukan pengembangan potensi dan pengawasan yang berkelanjutan dan terkoordinasi dan disejalankan dengan pembangunan infrastruktur perekonomian.

Dalam bidang pembangunan manusia terus meningkatkan umur harapan hidup seluruh penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi 71 tahun termasuk menurunkan angka kematian bayi (AKB) berkurang menjadi 13/1.000 kelahiran hidup, angka kematian Ibu (AKI) berkurang menjadi 70/100.000 kelahiran hidup dan menurunkan status gizi buruk menjadi 0-1%.

Terus meningkatkan kualitas dan jumlah sarana dan prasarana kesehatan dan melaksanakan sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang murah, mudah dan gratis bagi keluarga miskin dan rawan sosial dan pelaksanaannya dibebankan dan ditanggung pembiayaannya bersama Pemerintah, Pemerintah Provisis dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen serta pihak lainnya.

Terus meningkatkan pembangunan perumahan dan penataan lingkungan pemukiman khususnya diperkotaan slum dengan tujuan meningkatkan kualitas perkotaan dan pedesaan yang tertinggal dengan program percepatan pembangunan Kampung (desa) dan program pengembangan Distrik (kecamatan). Meningkatkan penurunan persentase dan jumlah keluarga miskin dan sangat miskin dengan perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih terkordinasi dan terintegrasi. Elektrifikasi bidang kelistrikan dan energi ditingkatkan pemenuhan kebutuhan listrik, meningkatkan cakupan pelayanan listrik yang menjangkau daerah yang cepat tumbuh lainnya, dengan meningkatkan sarana dan prasarana pembangkit listrik dan bekerjasama dengan semua pihak.

Terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan melaksanakan Standar Baku Mutu Lingkungan Hidup dan pengendaliannya dan didukung dengan meningkat dan berkembangnya infrastruktur lingkungan hidup serta terus meningkatkan peran serta stakeholders (Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat) dalam Pengendalian dampak Lingkungan.

2. Skenario penyusunan Visi pada RPJMD ke-4 (2021-2025) tidak jauh dari sasaran:

”Terwujudnya Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai Pusat Pertanian dan Pusat Produksi Kelautan dan Perikanan yang mampu mengembangkan hingga di pasar Teluk Cendrawasih, Papua, Pulau Papua, Nasional dan Mancanegara dengan didukung Jaringan perdagangan internasional, dan sebagai pusat pariwisata berbasis Budaya Papua dengan dukungan jaringan market Regional, nasional dan Internasional”.

Indikator Pencapaian Keberhasilan :

Periode ini merupakan periode terakhir dari RPJP Daerah 2005-2025 dan merupakan periode yang terberat. Periode ini menggambarkan apa yang diarahkan dalam arah pembangunan jangka panjang, maka fokus utama pencapaian dalam periode ini adalah mewujudkan tujuan jangka panjang sebagaimana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berlandaskan pada hasil pelaksanaan, pencapaian dan kondisi sebagai kelanjutan RPJM ke-3, maka RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kepulauan Yapen yang bermartabat, maju dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan menekankan pembangunan sektor ekonomi yang berdaya saing diseluruh wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, cerdas, berakhlak dan berbudaya. Periode ini disamping melanjutkan apa yang sudah dibuat pada periode sebelumnya juga menyelesaikan apa yang belum dapat diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya. Tatakelola dan penyelenggaraan pemerintahan

dalam menjalankan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan publik sudah berjalan dengan efisien dan efektif mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi dan menganut prinsip manajemen modern. Di dalam menjalankan tugasnya, jumlah pegawai aparatur pemerintahan sudah mulai dibatasi sesuai dengan spesialisasi dan keahlian terutama dengan semakin meningkatnya kemajuan birokrasi dan lembaga yang efisien sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, murah dan efektif

Karakter dan budaya masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen terus semakin berkembang dan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai agama terus dilakukan di seluruh lapisan masyarakat. Hukum dan perundang-undangan terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan hubungan antar daerah secara konsekuen. Disiplin sudah menjadi bagian budaya daerah yang maju dan telah menjadi kebanggaan masyarakat. Pelayanan publik terus semakin baik dan maju dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi dan peningkatan peran masyarakat sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sudah berorientasi kepada standar pelayanan dan kinerja, sehingga mampu mendukung daya saing daerah sejalan dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan aparatur pemerintah daerah.

Terwujudnya pengamalan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari secara konsekuen sehingga membentuk budaya masyarakat yang madani dan didukung dengan semakin berkurangnya tindak pelanggaran yang merusak moral dan

akhlak. Penyelenggaraan pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi dan kehidupan masyarakat telah mencerminkan budaya daerah yang maju.

Kualitas pemuda dan remaja semakin meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya daya saing penduduk dan daerah, prestasi di bidang olahraga, seni dan ilmu pengetahuan semakin meningkat dengan disertai pelaksanaan event di berbagai bidang yang mengembangkan bakat dan kemampuan pemuda dan remaja. Wawasan kebangsaan semakin meningkat dengan terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa yang hakiki dan tingkat perbedaan dan konflik yang semakin minim.

Lingkungan sosial dan lingkungan hidup sudah terjaga dengan kondusif dan berkelanjutan ditingkatkan terutama dengan telah terwujudnya pemerataan pembangunan di segala bidang dan seluruh wilayah. Tata pemerintahan sudah terwujud dengan baik dan berwibawa dengan penerapan manajemen pemerintahan yang modern dan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan dan modern. Sarana di pusat pemerintahan telah terpenuhi menurut standar yang ditetapkan baik kualitas yang lebih modern dan kriteria yang lebih baik. Penyelenggaraan pemerintahan tetap memperhatikan kinerja dan penilaian sudah mengikuti standar kinerja yang mengutamakan manfaat daripada produk, orientasi penyelenggaraan pemerintahan sudah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada pemerintah. Infrastruktur dasar sudah disediakan menurut standar pelayanan minimal dan optimal, sehingga tingkat pelayanan bagi masyarakat tercapai dengan optimal. Sejalan dengan itu terus melakukan peningkatan kualitas dan peningkatan peran

masyarakat dalam memelihara sarana dan prasana publik. Kawasan strategis dan cepat tumbuh terus berkembang sehingga memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah, pemerataan dan pemanfaatan sumber daya alam sudah terlaksana dengan adil dan proporsional. Pemanfaatan rencana tata ruang sudah mampu memberikan arah bagi pembangunan spasial yang mencakup kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada tingkat sebelumnya bahkan jika perlu ditingkatkan dengan produk migas dan nonmigas. Terus melakukan recovery ekonomi dengan peningkatan daya saing dan kinerja pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.

Penyakit sosial seperti prostitusi dan perdagangan orang sudah dapat ditekan seminimal mungkin, sejalan dengan semakin meningkatnya kualitas pengamalan nilai agama dan moral baik yang dilakukan oleh lembaga agama, organisasi masyarakat, keluarga serta lingkungan pendidikan.

Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen maju dan terus berkembang yang ditandai dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita penduduk. PDRB yang meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya peran dan kontribusi lapangan usaha sektor jasa dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Kepulauan Yapen. Peranan sumberdaya manusia semakin meningkat dalam mengelola sumberdaya bagi kepentingan pembangunan dalam rangka mempersiapkan untuk mengelola sendiri dengan diawali transfer teknologi. Semakin meningkatnya kualitas dan sistem jaringan infrastruktur ekonomi baik transportasi, perhubungan,

kelistrikan, air bersih, telematika dan pemukiman perumahan. Daya saing Kabupaten Kepulauan Yapen semakin kuat dan kompetitif yang ditandai dengan semakin terintegrasinya pembangunan semua sektor maupun antar daerah. Peningkatan kemajuan pembangunan terus didukung oleh pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan pelestarian lingkungan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi dan rehabilitasi lingkungan.

Pembangunan dilaksanakan dengan prinsip perencanaan yang modern, terbuka dan partisipatif dengan memanfaatkan kemajuan IT dan ilmu pengetahuan lainnya. Perencanaan sudah disusun dengan memperhitungkan pentingnya data dan informasi sehingga perencanaan dan pembangunan sebagai sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Industri berkembang sebagai motor penggerak ekonomi daerah dengan ditopang oleh sektor lain seperti jasa yang terus meningkat kontribusinya sejalan dengan kemajuan pembangunan daerah. Potensi Pertambangan yang ada dikelola dengan tetap memperhatikan kelestariannya, karena pertambangan sebagai sumber daya yang terbatas maka eksploitasi yang berlebihan akan memberikan keterbatasan persediaan bagi generasi yang akan datang. Pengawasan dan monitoring serta penegakan hukum sektor pertambangan sudah berjalan dengan efektif. Demikian juga pengelolaan air permukaan dan air bawah tanah dikendalikan dengan mempertimbangkan prinsip kelestariannya.

Dalam sektor sumberdaya energi, sumberdaya listrik dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan kemampuannya seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik.

Perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi industri berbasis sumberdaya mineral dalam skala kecil, menengah dan besar baik dalam kualitas dan kuantitasnya mengingat persaingan global semakin kompetitif.

Pengelolaan pertambangan sumberdaya mineral dikelola dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, konservasi sumberdaya mineral ditingkatkan (umur penambangan sumberdaya mineral diperpanjang). Kelestarian lingkungan dipertahankan dan ditingkatkan, perda pertambangan sumberdaya mineral dan air tanah berjalan sangat efektif. Pengawasan dan monitoring serta penegakan hukum di sektor pertambangan sumberdaya mineral dan air tanah dikendalikan dengan mempertimbangkan kelestariannya.

Pada RPJM tahap IV ini sektor pertanian setidaknya mampu mendukung ketahanan dan kecukupan pangan secara lokal di Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk mendukung hal tersebut, maka pemantapan pengembangan wilayah berbasis komoditas dan diversifikasi pertanian yang berkelanjutan menjadi titik tolak pembangunan jangka panjang selanjutnya. Hal yang tetap harus mendapat pengendalian yang tegas adalah upaya alih fungsi lahan pertanian ke arah fungsi lain agar tingkat produksi pertanian dapat dipertahankan dan bahkan dapat ditingkatkan.

Pembangunan pariwisata terus ditingkatkan untuk mendorong ekonomi daerah serta pelibatan sektor publik dalam pengelolaan objek dan destinasi wisata. Sejalan dengan itu peran sektor lain dalam pengembangan pariwisata seperti perhubungan, transportasi dan sektor jasa meningkat.

Pemanfaatan bidang informatika dan telekomunikasi, sudah

menjadi bagian penting dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik termasuk penguasaan dan pengembangannya bagi kepentingan nasional dan keamanan daerah. Kemajuan informatika juga dimanfaatkan bagi pendeteksian potensi kekayaan alam dan aspek lain yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Pendidikan 12 tahun sudah berjalan dengan efektif dengan tetap memperhatikan pendidikan dasar sejalan dengan peningkatan kualitas dan sebaran pelayanan pendidikan serta manajemen pengelolaan pendidikan yang maju. Kualitas lulusan sekolah di semua tingkatan sudah memiliki daya saing baik untuk memasuki pasar kerja maupun dalam memperoleh peluang meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi. Peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia tetap dengan mempertimbangkan kemajuan akhlak dan budi pekerti, sehingga sumber daya manusia yang diharapkan tercapai baik kualitas fisik dan mental.

Lembaga latihan kerja sudah berfungsi sebagai pusat pelatihan yang kredibel dan menjadi rujukan bagi penetapan standar kompetensi kerja sesuai dengan jenis dan kebutuhan lapangan kerja. Penataan lembaga dan organisasi balai latihan kerja sehingga profesional dan dapat diandalkan dan tetap menjalin kerjasama dengan dunia usaha terutama bidang yang sesuai. Pengembangan bursa kerja sudah melalui pemanfaatan kemajuan IT dan ilmu pengetahuan lainnya.

Sarana perhubungan terus dibina dan kualitasnya terus ditingkatkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi nyaman, aman, cepat dan mudah serta efisien. Kesehatan sudah dapat meningkatkan angka harapan hidup mencapai 72 tahun sebagaimana yang direncanakan, pembangunan sarana

dan prasarana kesehatan yang berkualitas terus dilakukan. Sistem informasi kesehatan sudah terlaksana dengan baik dalam sistem yang terpadu mulai dari Puskesmas, Rumah Sakit Kabupaten/Kota dan RS Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan Provinsi secara berjenjang. Termasuk di Kabupaten Kepulauan Yapen minimal sudah memiliki RSUD minimal tipe B yang dikelola dengan baik dan berkualitas baik. Perdagangan terus ditingkatkan terutama dalam rangka pemasaran hasil dan produk dari pengolahan potensi daerah, sehingga neraca perdagangan terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan sejalan dengan peningkatan daya saing produk dan pelaku usaha. Pelaksanaan standar dan kualitas produksi dalam negeri dan peningkatan legalitas hasil perdagangan yang mampu bersaing di pasaran global serta pemasaran dengan pemanfaatan teknologi dan pembinaan pengembangan ekonomi yang kreatif. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen terus meningkat yang ditandai dengan terus meningkatnya indikator pembangunan manusia seperti meningkatnya pendapatan dan daya beli, menurunnya angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin; menurunnya jumlah dan tingkat pengangguran dengan semakin berkembangnya lapangan kerja dan meningkatnya peluang usaha masyarakat. Pembangunan wilayah terus berkembang sejalan dengan meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat dan ekonomi. Tingkat pendidikan masyarakat terus meningkat sejalan dengan semakin baiknya penyelenggaraan pendidikan dan manajemen pengelolaan sekolah dan kurikulum yang sesuai dengan potensi lokal serta berkembangnya pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi didukung dengan pengembangan keahlian

yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kebutuhan akan listrik dan air bersih semakin meningkat pelayanannya terutama di perkotaan dan daerah yang cepat tumbuh. Pengembangan sumber energi listrik dan sumber air bersih semakin meningkat baik dengan dilaksanakan sendiri maupun dengan kerjasama dengan pihak lain.

Ketahanan pangan terus dijaga, baik dengan menyediakan kebutuhan pokok yang terjangkau maupun dengan meningkatkan produksi dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan serta potensi lainnya. Distribusi tetap terjaga dengan melibatkan sektor terkait dan kerjasama dengan daerah lain serta dukungan pemerintah dan dunia usaha.

Pelayanan kesehatan terus ditingkatkan terutama dalam melaksanakan kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat yang rawan sosial dan miskin secara murah, mudah dan gratis namun tetap berkualitas yang pelaksanaannya ditanggung bersama antara pemerintah pusat, Proinsi dan Kabupaten Kepulauan Yapen serta pihak lainnya.

Pembangunan berwawasan lingkungan terus diwujudkan untuk mempersiapkan daya dukung lingkungan pada periode berikutnya, dan untuk itu pengawasan terus dilakukan secara intensif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Terus mengembangkan potensi Industri, perdagangan dan pariwisata dan pembinaan masyarakat lokal agar semakin berdaya dalam mengembangkan kemampuannya dan meningkatkan produktivitasnya. Pembinaan masyarakat lokal baik dari peralatan, teknologi dan permodalan dan pemasaran hasil terus dilakukan. Pembangunan perikanan terus dilakukan dengan mengoptimalkan petani perikanan darat dan laut yang terpadu, dengan terus melakukan pengembangan potensi dan

pengawasan yang berkelanjutan dan terkoordinasi dan disejalankan dengan pembangunan infrastruktur perekonomian.

Dalam bidang pembangunan manusia terus meningkatkan umur harapan hidup seluruh penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi 72 tahun termasuk menurunkan angka kematian bayi (AKB) berkurang menjadi 8/1.000 kelahiran hidup, angka kematian Ibu (AKI) berkurang menjadi 50/100.000 kelahiran hidup dan menurunkan status gizi kurang menjadi 0%.

Terus meningkatkan kualitas dan jumlah sarana dan prasarana kesehatan dan melaksanakan sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang murah, mudah dan gratis bagi keluarga miskin dan rawan sosial namun dengan cara yang lebih selektif dan pelaksanaannya dibebankan dan ditanggung pembiayaannya bersama pemerintah pusat, Kabupaten Kepulauan Yapen dan kabupaten/kota serta pihak lainnya.

Terus mengupayakan peningkatan kualitas rumah dan meningkatkan pembangunan perumahan dan penataan lingkungan pemukiman baik perkotaan dan pedesaan dan melengkapi sarana prasarana perumahan yang lebih baik sehingga tercipta kawasan pemukiman yang manusiawi dan berbudaya. Semakin menurunnya persentase dan jumlah keluarga miskin dan sangat miskin dengan perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi serta semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin yang berubah status ekonomi menjadi penduduk tidak miskin.

Elektrifikasi bidang kelistrikan dan energi ditingkatkan pemenuhan kebutuhan listrik, meningkatkan cakupan pelayanan listrik yang menjangkau terutama di daerah yang

LAPORAN AKHIR

cepat tumbuh, dengan meningkatkan sarana dan prasarana pembangkit listrik dan bekerjasama dengan semua pihak.



PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TERPADU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

6.1. MATRIK RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TERPADU

Tahapan prioritas kegiatan ditentukan melalui aspek-aspek pembangunan yang merupakan variabel dalam tipologi kawasan. Tahapan prioritas kegiatan PWT tidak menggambarkan tahun pelaksanaan kegiatan, karena kegiatan dapat dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran. Tahapan prioritas PWT tersebut akan menjadi lampiran pada RPJMD.

Program yang ditetapkan dalam PWTJM merupakan acuan bagi SKPD sesuai dengan tupoksinya untuk menyusun Renstra SKPD yang dijabarkan pada program dan kegiatan tahunan dalam periode lima tahunan. Tahapan tata cara penyusunan Renstra SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

LAPORAN AKHIR

Tabel 6.1. Rencana Program Kewilayahan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan PWT Kawasan Waterfront Kampung Ansus

No	Nama Kegiatan PWT	Sasaran	Kode				Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada PWTJM (tahun 0)	Pendanaan					
										Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
										Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
1	Kawasan Waterfront Kampung Ansus		1	03	1	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan								
			1	03	1	15	03	Pembangunan Jalan			6.850.000.000	7.192.500.000	7.552.125.000	7.929.731.250	8.326.217.813
			1	03	1	15	03	Perencanaan Pembangunan Jembatan			1.000.000.000	1.050.000.000	1.102.500.000	1.157.625.000	1.215.506.250
			1	3	1	18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				-	-	-	-	-
			1	3	1	18	3	Pemeliharaan Jalan			50.250.000.000	52.762.500.000	55.400.625.000	58.170.656.250	61.079.189.063
			1	03	01	24	Program pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				-	-	-	-	-
			1	03	1	24	01	Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kawasan Ansus			2.100.000.000	2.205.000.000	2.315.250.000	2.431.012.500	2.552.563.125
			1	03	1	24	06	Pembangunan Jaringan Air Bersih			10.800.000.000	11.340.000.000	11.907.000.000	12.502.350.000	13.127.467.500
			1	03	01	30	Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan				-	-	-	-	-
			1	03	01	30	02	Penataan Jalan dan Jembatan Perdesaan			8.732.500.000	9.169.125.000	9.627.581.250	10.108.960.313	10.614.408.328
			1	03	01		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh				400.000.000	420.000.000	441.000.000	463.050.000	486.202.500
			1	03	1	17	03	Pembangunan Pengaman Pantai			9.025.000.000	9.476.250.000	9.950.062.500	10.447.565.625	10.969.943.906
			1	03	1	15	Program Pengembangan Perumahan				-	-	-	-	-
			1	03	1	15	07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat sederhana			10.360.000.000	10.878.000.000	11.421.900.000	11.992.995.000	12.592.644.750
			1	06	1	16	Program Pemanfaatan Ruang				-	-	-	-	-
	1	05	1	16	DED Taman Kota Ansus				750.000.000	787.500.000	826.875.000	868.218.750	911.629.688		
	1	05	1	16	Penyusunan Master Plan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga				750.000.000	787.500.000	826.875.000	868.218.750	911.629.688		

LAPORAN AKHIR

No	Nama Kegiatan PWT	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada PWTJM (tahun 0)	Pendanaan				
											Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
											Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
			1	05	1	16		Penyusunan RDTRK Kawasan Ansus			500.000.000	525.000.000	551.250.000	578.812.500	607.753.125
			1	05	1	16		Survey Terbuka Hijau Kawasan Ansus			500.000.000	525.000.000	551.250.000	578.812.500	607.753.125
			1.	07	1	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				-	-	-	-
			1.	07	1	15	01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			185.000.000	194.250.000	203.962.500	214.160.625	224.868.656
			1.	07	1	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				-	-	-	-
			1.	07	1	16	05	Pemeliharaan Lampu Pengatur Lalu Lintas (Traffic Light & Warning light)			60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500	72.930.375
			1.	07	1	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				-	-	-	-
			1.	07	1	17	12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan			5.200.000.000	5.460.000.000	5.733.000.000	6.019.650.000	6.320.632.500
			1	08	01	18		Program Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan SDA				-	-	-	-
			1	08	01	18	01	Penloalaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Eстуaria dan Teluk			100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500	121.550.625
			1	08	01	18	03	Rehabilitasi Hutan & lahan			120.000.000	126.000.000	132.300.000	138.915.000	145.860.750
			1	08	01	19		Program Peningkatan Kualitas & Akses Informasi SDA & LH				-	-	-	-
			1	08	01	19	06	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Kawasan Ansus			100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500	121.550.625
			1	08	01	19	08	Kajian Strategis Pembangunan Bidang LH Kawasan Ansus			200.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000	243.101.250
			1	15	01	15		Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Konduksif				-	-	-	-
			1	15	01	15	06	Perencanaan, Koordinasi & Pengembangan UMKM			200.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000	243.101.250

LAPORAN AKHIR

No	Nama Kegiatan PWT	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada PWTJM (tahun 0)	Pendanaan				
											Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
											Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
			1	15	01	15	07	Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil Menengah			2.770.000.000	2.908.500.000	3.053.925.000	3.206.621.250	3.366.952.313
			1	15	01	16		Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif bagi Usaha Mikro Kecil menengah				-	-	-	-
			1	15	01	16	06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan			600.000.000	630.000.000	661.500.000	694.575.000	729.303.750
			1	15	01	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				-	-	-	-
								Fasilitas bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya			870.000.000	913.500.000	959.175.000	1.007.133.750	1.057.490.438
			2	07	02	17		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				-	-	-	-
			2	07	02	17	01	Pembinaan Kemampuan Teknologi industri			704.000.000	739.200.000	776.160.000	814.968.000	855.716.400
			2.	04	1	17		Program Pengembangan Kemitraan				-	-	-	-
			2.	04	1	17	01	Pengembangan dan Penguatan Informasi Data Base			950.000.000	997.500.000	1.047.375.000	1.099.743.750	1.154.730.938
			2.	04	1	16.		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				-	-	-	-
			2.	04	1	16.	01	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan			4.168.000.000	4.376.400.000	4.595.220.000	4.824.981.000	5.066.230.050
			2.	04	1	18.		Program Pengembangan Nilai Budaya				-	-	-	-
			2.	04	1	18.	01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah			3.000.000.000	3.150.000.000	3.307.500.000	3.472.875.000	3.646.518.750
			2.	04	1	18.	02	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				-	-	-	-
								Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka dan naska Kuno			1.550.000.000	1.627.500.000	1.708.875.000	1.794.318.750	1.884.034.688
			2.	04	1	18.	03	Program Pengembangan Kemitraan				-	-	-	-
			1	17	17			Pengelolaan Keragaman Budaya				-	-	-	-

LAPORAN AKHIR

No	Nama Kegiatan PWT	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada PWTJM (tahun 0)	Pendanaan				
											Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
											Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
			1	17	17	1		Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah			1.000.000.000	1.050.000.000	1.102.500.000	1.157.625.000	1.215.506.250
			1	17	17	2		Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah			2.200.000.000	2.310.000.000	2.425.500.000	2.546.775.000	2.674.113.750
			2	05	1	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan				-	-	-	-
			2	05	1	20	03	Budidaya Air Laut			880.000.000	924.000.000	970.200.000	1.018.710.000	1.069.645.500
			2	05	1	21		Program Pengembangan Perikanan Tangkap				-	-	-	-
			2	05	1	21	05	Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap			7.543.700.000	7.920.885.000	8.316.929.250	8.732.775.713	9.169.414.498
			2	05	1	23		Program Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan			4.235.000.000	4.446.750.000	4.669.087.500	4.902.541.875	5.147.668.969
			2	05	1	16		Program Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan			1.079.900.000	1.133.895.000	1.190.589.750	1.250.119.238	1.312.625.199
			2	05	1	15		Program Pembinaan Sumberdaya Masyarakat Pesisir			5.158.397.600	5.416.317.480	5.687.133.354	5.971.490.022	6.270.064.523
JUMLAH DANA PENGEMBANGAN														176.116.520.905	

LAPORAN AKHIR

Tabel 6.2. Rencana Program Kewilayahan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan PWT Kawasan Perkampungan Nelayan Tradisional

No	Nama Kegiatan PWT	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada PWTJM (tahun 0)	Pendanaan				
											Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
											Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2	Kawasan Perkampungan Nelayan Tradisional		1	03	1	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan							
			1	03	1	15	03	Pembangunan Jalan			6.850.000.000	7.192.500.000	7.552.125.000	7.929.731.250	8.326.217.813
			1	03	1	15	03	Perencanaan Pembangunan Jembatan			1.000.000.000	1.050.000.000	1.102.500.000	1.157.625.000	1.215.506.250
			1	3	1	18		Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				-	-	-	-
			1	3	1	18	3	Pemeliharaan Jalan			50.250.000.000	52.762.500.000	55.400.625.000	58.170.656.250	61.079.189.063
			1	03	01	24		Program pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				-	-	-	-
			1	03	1	24	01	Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kawasan Permukiman Nelayan			2.100.000.000	2.205.000.000	2.315.250.000	2.431.012.500	2.552.563.125
			1	03	1	24	06	Pembangunan Jaringan Air Bersih			10.800.000.000	11.340.000.000	11.907.000.000	12.502.350.000	13.127.467.500
			1	03	01	30		Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan				-	-	-	-
			1	03	01	30	02	Penataan Jalan dan Jembatan Perdesaan			8.732.500.000	9.169.125.000	9.627.581.250	10.108.960.313	10.614.408.328
			1	03	01			Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh			400.000.000	420.000.000	441.000.000	463.050.000	486.202.500
			1	03	1	17	03	Pembangunan Pengaman Pantai			9.025.000.000	9.476.250.000	9.950.062.500	10.447.565.625	10.969.943.906
			1	03	1	15		Program Pengembangan Perumahan				-	-	-	-
			1	03	1	15	07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat sederhana			10.360.000.000	10.878.000.000	11.421.900.000	11.992.995.000	12.592.644.750

LAPORAN AKHIR

No	Nama Kegiatan PWT	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada PWTJM (tahun 0)	Pendanaan												
										Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5								
										Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.								
			1	06	1	16																
			1	05	1	16																
			1.	07	1	15																
			1.	07	1	15	01															
			1.	07	1	17																
			1.	07	1	17	12															
			1	08	01	18																
			1	08	01	18	01															
			1	08	01	18	03															
			1	15	01	15																
			1	15	01	15	06															
			1	15	01	15	07															
			1	15	01	16																
			1	15	01	16	06															
			2.	04	1	16.																

LAPORAN AKHIR

No	Nama Kegiatan PWT	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada PWTJM (tahun 0)	Pendanaan				
											Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
											Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
			2.	04	1	16.	01	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan			4.168.000.000	4.376.400.000	4.595.220.000	4.824.981.000	5.066.230.050
			2.	04	1	18.		Program Pengembangan Nilai Budaya				-	-	-	-
			2.	04	1	18.	01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah			3.000.000.000	3.150.000.000	3.307.500.000	3.472.875.000	3.646.518.750
			2.	04	1	18.	02	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				-	-	-	-
								Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka termasuk naska Kuno			1.550.000.000	1.627.500.000	1.708.875.000	1.794.318.750	1.884.034.688
			2.	04	1	18.	03	Program Pengembangan Kemitraan				-	-	-	-
			1	17	17			Pengelolaan Keragaman Budaya				-	-	-	-
			1	17	17	1		Pengembangan Kesenian & Kebudayaan Daerah			1.000.000.000	1.050.000.000	1.102.500.000	1.157.625.000	1.215.506.250
			1	17	17	2		Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah			2.200.000.000	2.310.000.000	2.425.500.000	2.546.775.000	2.674.113.750
			2	05	1	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan				-	-	-	-
			2	05	1	20	03	Budidaya Air Laut			880.000.000	924.000.000	970.200.000	1.018.710.000	1.069.645.500
			2	05	1	20	02	Budidaya Air Tawar			175.000.000	183.750.000	192.937.500	202.584.375	212.713.594
			2	05	1	21		Program Pengembangan Perikanan Tangkap				-	-	-	-
			2	05	1	21	05	Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap			7.543.700.000	7.920.885.000	8.316.929.250	8.732.775.713	9.169.414.498
			2	05	1	23		Program Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan			4.235.000.000	4.446.750.000	4.669.087.500	4.902.541.875	5.147.668.969
			2	05	1	16		Program Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan			1.079.900.000	1.133.895.000	1.190.589.750	1.250.119.238	1.312.625.199
			2	05	1	15		Program Pembinaan Sumberdaya Masyarakat Pesisir			5.158.397.600	5.416.317.480	5.687.133.354	5.971.490.022	6.270.064.523
JUMLAH PENDANAAN														170.696.578.536	

LAPORAN AKHIR

Tabel 6.3. Rencana Program Kewilayahan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan PWT Kawasan Agropolitan dan Monapolitan

No	Nama Kegiatan PWT	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada PWTJM (tahun 0)	Pendanaan				
											Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
											Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
3	Kawasan Agropolitan dan Minapolitan		1	03	1	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan							
			1	03	1	15	03	Pembangunan Jalan			6.850.000.000	7.192.500.000	7.552.125.000	7.929.731.250	8.326.217.813
			1	03	1	15	03	Perencanaan Pembangunan Jembatan			1.000.000.000	1.050.000.000	1.102.500.000	1.157.625.000	1.215.506.250
			1	3	1	18		Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				-	-	-	-
			1	3	1	18	3	Pemeliharaan Jalan			50.250.000.000	52.762.500.000	55.400.625.000	58.170.656.250	61.079.189.063
			1	03	01	24		Program pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				-	-	-	-
			1	03	1	24	01	Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kawasan Permukiman			2.100.000.000	2.205.000.000	2.315.250.000	2.431.012.500	2.552.563.125
			1	03	1	24	06	Pembangunan Jaringan Air Bersih			10.800.000.000	11.340.000.000	11.907.000.000	12.502.350.000	13.127.467.500
			1	03	01	30		Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan				-	-	-	-
			1	03	01	30	02	Penataan Jalan dan Jembatan Perdesaan			8.732.500.000	9.169.125.000	9.627.581.250	10.108.960.313	10.614.408.328
			1	03	01			Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh			400.000.000	420.000.000	441.000.000	463.050.000	486.202.500
			1	03	1	17	03	Pembangunan Pengaman Pantai			9.025.000.000	9.476.250.000	9.950.062.500	10.447.565.625	10.969.943.906
			1	03	1	15		Program Pengembangan Perumahan				-	-	-	-
			1	03	1	15	07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat sederhana			10.360.000.000	10.878.000.000	11.421.900.000	11.992.995.000	12.592.644.750
			1	06	1	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				-	-	-	-

LAPORAN AKHIR

No	Nama Kegiatan PWT	Sasaran	Kode				Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada PWTJM (tahun 0)	Pendanaan					
										Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
										Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
			1	06	1	22		Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan (lanjutan)			500.000.000	525.000.000	551.250.000	578.812.500	607.753.125
			1	06	1	20		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah				-	-	-	-
			1	06	1	20	01	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana			990.000.000	1.039.500.000	1.091.475.000	1.146.048.750	1.203.351.188
			1	06	1	16		Program Pemanfaatan Ruang				-	-	-	-
			1	05	1	16		Penyusunan Master Plan Agropolitan dan Minapolitan			750.000.000	787.500.000	826.875.000	868.218.750	911.629.688
			1.	07	1	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				-	-	-	-
			1.	07	1	15	01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			185.000.000	194.250.000	203.962.500	214.160.625	224.868.656
			1	08	01	18		Program Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan SDA				-	-	-	-
			1	08	01	18	01	Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Eстуaria dan Teluk			100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500	121.550.625
			1	08	01	18	03	Rehabilitasi Hutan & Lahan			120.000.000	126.000.000	132.300.000	138.915.000	145.860.750
			1	15	01	15		Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Konduksif				-	-	-	-
			1	15	01	15	06	Perencanaan, Koordinasi & dan Pengembangan UMKM			200.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000	243.101.250
			1	15	01	15	07	Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil Menengah			2.770.000.000	2.908.500.000	3.053.925.000	3.206.621.250	3.366.952.313
			1	15	01	16		Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif bagi Usaha Mikro Kecil menengah				-	-	-	-
			1	15	01	16	06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan			600.000.000	630.000.000	661.500.000	694.575.000	729.303.750

LAPORAN AKHIR

No	Nama Kegiatan PWT	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada PWTJM (tahun 0)	Pendanaan				
											Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
											Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
			2	07	02	17		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri			-	-	-	-	
			2	07	02	17	01	Pembinaan Kemampuan Teknologi industri			704.000.000	739.200.000	776.160.000	814.968.000	855.716.400
			2	01	1	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)			-	-	-	-	
			2	01	1	16	09	Pemanfaatan pekarangan untuk tanaman hortikultura			190.000.000	199.500.000	209.475.000	219.948.750	230.946.188
			2	01	1	16	13	Pengembangan cadangan pangan daerah			150.000.000	157.500.000	165.375.000	173.643.750	182.325.938
			2	01	1	16	17	Pengembangan pertanian pada lahan kering			260.000.000	273.000.000	286.650.000	300.982.500	316.031.625
			2	01	1	16	20	Pengembangan perbenihan/perbibitan			50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313
			2	01	1	22		Program peningkatan produksi hasil peternakan			-	-	-	-	
			2	01	1	22	01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak			2.060.000.000	2.163.000.000	2.271.150.000	2.384.707.500	2.503.942.875
			2	01	1	23		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi			-	-	-	-	
			2	01	1	23	10	Penyuluhan permintaan informasi pasar atas hasil produksi peternakan			150.000.000	157.500.000	165.375.000	173.643.750	182.325.938
			2	01	1	24		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan			-	-	-	-	
			2	01	1	24	01	Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna			180.000.000	189.000.000	198.450.000	208.372.500	218.791.125
			2	01	02	07	02	Pembinaan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan			1.500.000.000	1.575.000.000	1.653.750.000	1.736.437.500	1.823.259.375
			2	02		15		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan			-	-	-	-	
			2	02		15	03	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu			1.150.000.000	1.207.500.000	1.267.875.000	1.331.268.750	1.397.832.188

LAPORAN AKHIR

No	Nama Kegiatan PWT	Sasaran	Kode				Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada PWTJM (tahun 0)	Pendanaan					
										Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
										Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
			2.	04	1	16.				-	-	-	-	-	
			2.	04	1	16.	01	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			4.168.000.000	4.376.400.000	4.595.220.000	4.824.981.000	5.066.230.050
			2.	04	1	18.		Program Pengembangan Nilai Budaya			-	-	-	-	-
			2.	04	1	18.	01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah			3.000.000.000	3.150.000.000	3.307.500.000	3.472.875.000	3.646.518.750
			2.	04	1	18.	02	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			-	-	-	-	-
								Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka termasuk naska Kuno			1.550.000.000	1.627.500.000	1.708.875.000	1.794.318.750	1.884.034.688
			2.	04	1	18.	03	Program Pengembangan Kemitraan			-	-	-	-	-
			1	17	17			Pengelolaan Keragaman Budaya			-	-	-	-	-
			1	17	17	1		Pengembangan Kesenian & Kebudayaan Daerah			1.000.000.000	1.050.000.000	1.102.500.000	1.157.625.000	1.215.506.250
			2	05	1	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan			-	-	-	-	-
			2	05	1	20	03	Budidaya Air Laut			880.000.000	924.000.000	970.200.000	1.018.710.000	1.069.645.500
			2	05	1	20	02	Budidaya Air Tawar			175.000.000	183.750.000	192.937.500	202.584.375	212.713.594
			2	05	1	21		Program Pengembangan Perikanan Tangkap			-	-	-	-	-
			2	05	1	21	05	Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap			7.543.700.000	7.920.885.000	8.316.929.250	8.732.775.713	9.169.414.498
			2	05	1	23		Program Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan			4.235.000.000	4.446.750.000	4.669.087.500	4.902.541.875	5.147.668.969
			2	05	1	16		Program Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan			1.079.900.000	1.133.895.000	1.190.589.750	1.250.119.238	1.312.625.199
			2	05	1	15		Program Pembinaan Sumberdaya Masyarakat Pesisir			5.158.397.600	5.416.317.480	5.687.133.354	5.971.490.022	6.270.064.523
JUMLAH PENDANAAN														171.284.883.561	

DAFTAR PUSTAKA

- Aronoft, S, 1989, "Geographic Informations System: A Manajement Perspective, WDL Publications, Ottawa, Canada.
- Arsyatd Lingcolin, 1999, Pengantar Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE
- Bendavid, Avrom, 1991, Regional and Economy Analysis for Practitioner, Praeger Publisher, One Madison Avenue New York.
- Blakely, Edward J, 1994. Planning Local Economic Development Theory and Practice, 2th edition Sage Publication Inc California
- Borrough, PA, 1988, "Principle of Geograptical Information System For Land Reserses Assessmen", Oxford University Press, New York.
- Jhingan.M.L, 1993, Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prayitno, 2000, Pengantar Sistem Informasi Geografi, Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Tarigan Robinson, 2005, Perencanaan Pembangunan Wilayah: Edisi Revisi, Jakarta: Bumu Aksara